

REFORMULASI MATERI AJAR ILMU PERBANDINGAN AGAMA PADA JURUSAN STUDI AGAMA-AGAMA

*(Studi atas Perubahan Kurikulum Berbasis KKNi pada Jurusan
Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Gunung Djati Bandung)*

Dr. H. Adeng Muchtar Ghazali, M.Ag
(Pengampu Mata Kuliah Ilmu Perbandingan Agama)

**FAKULTAS USHULUDDIN
UIN SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG**

Pasal 44

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Reformulasi Materi Ajar Ilmu Perbandingan Agama Pada Jurusan Studi Agama-Agama

Penulis : Adeng Muchtar Ghazali

Setting dan Lay-out : Busro dan Abdul Wasik

Diterbitkan Februari 2019

Oleh

Fakultas Ushuluddin

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Jl. AH. Nasution No. 105 Cibiru Bandung

Email: labushuluddin@uinsgd.ac.id

Cetakan Pertama, Februari 2019

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Yang Maha Pengasih juga Penyayang, nikmat mana yang bisa kami dustai. Segala puji bagi dzat Maha Sempurna, atas karunia segala bentuk kehidupan. Pada-Mu serta Nabiyullah Muhammad, penuntun jalan bagi kebutaan jiwa para hamba. Lantunan salawat, semoga menjadi jembatan bagi kami pemohon syafaat.

Buku ini menjelaskan hasil dari penelitian tentang Reformulasi Materi Ajar Ilmu Perbandingan Agama, semoga buku penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap keilmuan Agama-Agama.

Dalam penyusunan buku ini penulis banyak mendapat dukungan, dan masukan dari berbagai pihak, sehingga buku ini dapat selesai sebagaimana mestinya. Maka penulis ucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu, semoga Allah membalas kebaikan kita semua dengan kemuliaan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam buku ini. Oleh karena itu, diharapkan para pembaca dapat memberikan kritik bersifat konstruktif serta saran yang dapat menjadikan penulis ini menjadi lebih baik dan bermanfaat lagi. Dengan basmalah sebagai permulaannya, maka hamdalah adalah kata penutup dari kalimat ini, sekian dan terima kasih.

Bandung, Februari 2019

Peneliti

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus dan Tujuan Penelitian.....	4
C. Kerangka Pemikiran dan Tema Penelitian Sejenis.....	5
D. Metodologi Penelitian	6
BAB II PERKEMBANGAN STUDI ILMU PERBANDINGAN AGAMA.....	7
A. Fondasi dan Perkembangan Studi Agama.....	7
B. Kemunculan Religionswissenschaft.....	11
C. Wilayah Kajian Ilmu Perbandingan Agama	16
D. IPA di Indonesia.....	18
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	21
A. Profil Jurusan Studi Agama-Agama (SAA)	21
1. Asal-Usul dan Nama Jurusan	21
2. Visi dan Misi	22
B. Pengembangan Kurikulum Berbasis KKNI	26
1. Dasar Pengembangan.....	26
2. Tujuan Pengembangan Kurikulum.....	27
3. Struktur Kurikulum.....	27
4. Capaian Pembelajaran Program Studi SAA.....	31
5. Capaian Pembelajaran Bidang Keterampilan	34
6. Pemetaan dan Penetapan Bahan Kajian	36
7. Kurikulum dan Distribusi Mata Kuliah	43
C. Rekapitulasi Beban Studi dalam SKS.....	46
Distribusi Mata Kuliah	46

D. Program Pengembangan.....	50
1. Pendekatan dan Metode Pembelajaran	50
2. Penilaian Pembelajaran	54
3. Dosen Tetap	56
4. Sistem Penjaminan Mutu Akademik	66
5. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kurikulum..	71
E. Pengembangan Mata Kuliah IPA Berbasis KKNI.....	72
F. Formulasi Materi Ajar IPA	85
1. Dasar Filosofis dan Standar Kompetensi	86
2. Kurikulum.....	90
3. Materi Pokok/Fokus Kajian.....	92
4. Pandangan Para Ahli Non-Penstudi Agama-Agama Tentang IPA (Narsum Goup Discussion).....	113
5. Wacana Penelitian Agama	119
6. Agama dan Perubahan Sosial	124
7. Prioritas Penelitian.....	138
8. Penutup	147
BAB IV PENUTUP.....	150
A. Kesimpulan.....	150
B. Rekomendasi	152
DAFTAR PUSTAKA	153

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada umumnya, paradigma yang digunakan dalam kajian-kajian akademik agama di perguruan tinggi di Indonesia bukan paradigm Religious Studies (Studi Agama-Agama). Antara lain, hal ini disebabkan oleh : *pertama*, kekurangfahaman tentang karakteristik studi agama-agama (*religionwissenschaft*) sebagai bagian dari studi agama yang menggunakan “scientific methods”- bukan teologis-normatif; *kedua*, mengikuti pandangan yang ditulis oleh Suhadi yang menyebutkan faktor lain, yaitu kurang berkembangnya paradigma studi agama-agama. Sebaliknya, paradigma yang dominan adalah paradigma teologis.¹ Dalam kebijakan publik yang ada paradigma teologis ini direpresentasikan oleh konsep “pendidikan agama” dan “pendidikan keagamaan” (UU No. 20/ 2003 tentang Sisdiknas). Pendidikan agama merupakan pendidikan agama tertentu (seperti Pendidikan Agama Hindu, Islam, Kristen, dst.) yang harus diambil oleh siswa di sekolah dan mahasiswa di perguruan tinggi umum sebagai mata pelajaran atau mata kuliah wajib. Sedangkan pendidikan keagamaan berupa sistem pendidikan untuk mencetak ahli ilmu agama seperti pesantren, seminari, pasraman, Institut Agama Islam Negeri, Sekolah tinggi teologi Budha, dan lain-lain.

Di Indonesia pun telah muncul percobaan di sana-sini mengenai praktik paradigma studi agama baik di jenjang pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi. Di jantung akademik kajian Islam, di

¹ Lihat, Suhadi, “Dari Perbandingan Agama ke Studi Agama Yang Terlibat”, dalam Syamsul Ma’arif (ed), *Studi Agama di Indonesia : Refleksi Pengalaman*, Program Studi Agama dan Lintas Budaya (Center for Religious and Cross-Cultural Studies/CRCS) Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2016, hal.1

lingkungan Perguruan tinggi Agama Islam, sejak awal tahun 1960an dibuka Ilmu Perbandingan Agama yang dipelopori oleh Mukti Ali. Dalam perkembangannya, di banyak tempat di dunia Ilmu Perbandingan Agama kemudian bertransformasi menjadi Religious Studies. Pada tahun 2000 di UGM didirikan Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS) yang di tahun-tahun awal menggunakan nama Program Studi Ilmu Perbandingan Agama, kemudian diubah menjadi Program Studi Agama dan Lintas Budaya.² Di perguruan tinggi lain upaya-upaya sejenis juga berlangsung, seperti terdapat pada program Pascasarjana UIN Bandung sejak tahun 2008 membuka Prodi Religious Studies (RS) untuk mengembangkan kajian-kajian agama yang menggunakan paradigma Ilmu Perbandingan Agama - *Religionswissenschaft*.

Nama populer “ilmu perbandingan agama”, yang kemudian nama ini digunakan sebagai nama salah satu jurusan yang ada di Fakultas Ushuluddin seluruh IAIN/UIN di Indonesia yaitu Jurusan Perbandingan Agama, kurang begitu diminati oleh para calon mahasiswa. Pada umumnya, kurangnya peminat memasuki jurusan ini adalah persoalan “nama”. Maka, sekitar beberapa tahun ke belakang, fakultas Ushuluddin IAIN Bandung pernah mengusulkan ke Depag untuk mengganti nama jurusan Perbandingan Agama dengan nama jurusan “Studi Agama-Agama”. Sayangnya, tidak memperoleh respon yang diharapkan. Namun, beberapa tahun kemudian (2017), Jurusan Perbandingan Agama berubah nama menjadi Jurusan Studi Agama-Agama (Religious Studies), berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2108 Tahun 2017 tentang “Penyesuaian Nomenklatur Program Studi Agama pada UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Hal ini sejalan dengan program studi yang sedang dikembangkan oleh Program

² Ibid, hal. 12

Pascasarjana UIN Bandung yaitu Prodi Religious Studies pada jenjang S2 dan S3.

Jurusan Studi Agama-Agama (SAA) pada jenjang S1 tetap mempertahankan paradigma Ilmu Perbandingan Agama yang memiliki karakter keilmuan yang kuat berdasarkan perjalanan panjang dalam menstudi agama. Oleh karena itu, nama “perbandingan agama” dikembalikan sebagai “ilmu” dan “mata kuliah” pokok pada jurusan SAA. Berdasarkan karakter keilmuan ilmu ini menggunakan metode dan pendekatan yang khas, yaitu *sui generis* dan ilmiah, serta multidisipliner seperti menggunakan pendekatan sosiologi, sejarah, fenomenologi, antropologi, dan bahkan teologi, maka sebenarnya jurusan SAA dapat membuka prodi Antropologi dan Sosiologi Agama (ASA)³, Sejarah dan Fenomenologi Agama (SFA), dan Teologi Agama (TA). Dalam konteks IAIN/UIN, semua prodi dengan menggunakan basic keilmuan perbandingan agama ini, diarahkan untuk memperkokoh ketauhidan, menterjemahkan dan melaksanakan ajaran Islam dalam sejarah keagamaan yang beragam keyakinan dan lingkungan social cultural yang beragam pula.

Secara esensial, ilmu Perbandingan Agama mengkaji fakta-fakta keagamaan yang merupakan refleksi dari manusia beragama. Apalagi hampir semua penstudi agama sepakat bahwa agama telah ada sejak manusia itu ada. Oleh karena itulah, manusia senantiasa mengalami perkembangan kehidupan dalam beragama, yang sudah barang tentu pengalaman keagamaan yang pertama sesuai pula dengan tingkat kemampuan berpikirnya dalam memahami diri maupun lingkungan

³ Nama ini sebelumnya pernah menjadi nama jurusan di Fakultas Ushuluddin IAIN Bandung, yang kemudian “diambil” menjadi salah satu jurusan “Sosiologi” di FISIP UIN Bandung.

sosialnya, baik sesuatu yang tampak ataupun tidak.⁴ Atas dasar pemikiran dan latar belakang masalah ini, dan ikut membantu dalam upaya pengembangan prodi/jurusan SAA, penulis melakukan penelitian ini.

B. Fokus dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini dapat diidentifikasi melalui beberapa poin di bawah ini :

1. Masalah yang diteliti dapat dirumuskan bahwa kemunculan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan perubahan nama jurusan perbandingan Agama menjadi Studi Agama Agama berdampak terhadap orientasi dan kompetensi dasar penyajian kurikulum (mata kuliah), terutama Ilmu Perbandingan Agama.
2. Masalah yang memerlukan pemecahannya meliputi : penyesuaian materi ajar, metode dan pendekatan pengajaran, serta implikasi teoritis (keilmuan) dan praktis (kebijakan) yang diharapkan.
3. Penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk memperoleh pemahaman baru tentang beberapa teori dalam ilmu perbandingan agama relevansinya dengan fenomena kehidupan beragama sekarang ini. Tentu, dari hasil penelitian ini dapat memperkaya pemahaman dan penguasaan teoritis ilmu perbandingan agama, memberikan inspirasi dan kontribusi baik bagi jurusan Studi Agama-Agama, maupun

⁴ Secara lebih panjang lebar, penjelasan tentang poin ini dapat di lihat pada tulisan Adeng Muchtar Ghazali, “Memposisikan Perbandingan Agama sebagai Nama Ilmu dan Jurusan”, wawasan, Jurnal Fak. Ushuluddin.

pemerintah dalam membangun dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang rukun dan toleran.

C. Kerangka Pemikiran dan Tema Penelitian Sejenis

1. Penelitian sejenis dengan tema yang sama, tampaknya belum banyak dilakukan. Namun demikian, beberapa perguruan tinggi telah melakukan penyesuaian dengan kehadiran KKNI yang hasilnya dapat dijadikan referensi untuk pengembangan kurikulum/mata kuliah yang disajikan pada jurusan Studi Agama-Agama.
2. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori fungsional dalam studi agama yang memiliki relevansi dengan teori pengembangan kurikulum terutama materi ajar.
3. Teori di atas digunakan untuk menjelaskan sekaligus mengarahkan pada pemecahan masalah yang telah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebelumnya.
4. Pemecahan masalah melalui proses penelitian ini diharapkan dapat membantu pemegang mata kuliah Ilmu Perbandingan Agama dalam kegiatan belajar mengajarnya, membantu jurusan dalam mengembangkan kurikulum berbasis KKNI, dan membantu pemerintah, khususnya Kemenag dalam memelihara kerukunan hidup beragama.
5. Atas dasar itu, penelitian ini bisa dilakukan dengan beberapa pertimbangan bahwa a) peneliti adalah pengampu mata kuliah ilmu perbandingan agama; b) referensi cukup memadai; dan c) kesiapan mental, fisik,

dan dana yang ada membantu keberlangsungan penelitian yang dilakukan.

D. Metodologi Penelitian

1. Penelitian ini bersifat kualitatif, dengan menggunakan metode deskriptif analitis yang melibatkan pendekatan sosiologi (fungsional) dan pendidikan (Pengembangan kurikulum dan materi ajar) sebagai alat untuk menganalisis data penelitian yang diperoleh.
2. Data yang dijadikan sumber adalah sejumlah dokumen yang ada hubungannya dengan peraturan pemerintah, kurikulum jurusan SAA, terutama difokuskan pada mata kuliah ilmu perbandingan agama, serta sejumlah tulisan (buku dan jurnal) berkaitan dengan perkembangan studi agama-agama.
3. Data yang dikumpulkan menggunakan teknik observasi langsung, wawancara mendalam, dan analisis.

BAB II

PERKEMBANGAN STUDI ILMU PERBANDINGAN AGAMA

A. Fondasi dan Perkembangan Studi Agama

Ilmu Perbandingan Agama (IPA) merupakan nama yang diberikan oleh Mukti Ali dari bidang kajian Ilmu Agama-Agama (*Science of Religions*), yaitu *Comparative Study of Religion*. IPA dibangun atas tiga fondasi, yaitu filsafat, teologi, dan metode ilmiah (*scientific method*). Ketiga fondasi ini terbentuk melalui proses perkembangan studi agama sejak peradaban Yunani dan Romawi kuno, peradaban Barat Abad Pertengahan, dan peradaban Modern (kemajuan ilmu dan teknologi). Sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa disiplin keilmuan yang berkembang sekarang tidak lepas dari kontribusi pemikiran (filsafat) Yunani dan Abad Pertengahan. Demikian pula halnya dengan IPA lahir melalui proses ini. Banyak pemikiran dan teori yang dikembangkan oleh IPA berasal dari kajian-kajian sebelumnya.

Karakteristik masyarakat Yunani dan Romawi Kuno penuh dengan cerita-cerita sakral (mitologis), antropomorfis, politeistis, dan sinkretis.⁵ Karakteristik ini dapat diketahui dari pemikiran para filosof dan penstudi agama pada saat itu. Kedua Peradaban ini, baik Yunani maupun Romawi, tidak bisa dipisahkan. Sekalipun secara politis masyarakat Yunani Kuno dikuasai oleh bangsa Romawi Kuno, namun pemikiran, kepercayaan, dan tradisi Yunani masih tetap dipelihara. Oleh karena itu, keduanya memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda. Misalnya, sebutan dewa Zeus pada masyarakat Yunani

⁵ Lihat, M. Eliade, *the History of Religions, Essays in Methodology*, 1959, hlm. 213-224.

Kuno, menunjukkan kepada dewa langit yang dipandang memiliki otoritas yang tinggi di antara para dewa lainnya. Di lingkungan masyarakat Romawi disebut dewa Yupiter (dewa langit), yang memiliki otoritas sebagai dewanya para dewa.

Gambaran antropomorfis dan politeistis dapat dilihat dari pendapat para pemikir agama pada waktu itu. Misalnya, Herodotus (484-425 SM), menyatakan bahwa apa yang disembah oleh masyarakat Yunani, sekalipun banyak dewa, pada dasarnya sama, yakni dewa sebagai manifestasi dari manusia. Dalam SAA, teori ini dikenal dengan *the equivalence of gods*. Begitu juga Euhemerus (330-260 M) yang berpendapat bahwa dewa-dewa yang disembah masyarakat Yunani Kuno berasal dari manusia. Pandangan ini sering digunakan oleh kaum apologis Kristen untuk menerapkan prinsip-prinsip *euhemerisme* bagi agama-agama non-Kristen. Teori ini mengungkapkan adanya dewa-dewa yang berlainan nama dan atribut, tetapi memiliki fungsi yang sama. Oleh karena itu, dewa-dewa yang berlainan agama itu adalah sama. Demikian pula tokoh-tokoh apologia Kristen abad pertama, seperti Aristides yang menguraikan penafsirannya tentang hubungan-hubungan agama kafir, Yahudi dan Kristen. Mereka adalah para penginjil dan pembela agama Kristen.⁶

Gambaran politeistis ditunjukkan melalui pemujaan terhadap dewa Zeus (Yunani) maupun Yupiter (Romawi) sebagai dewa tertinggi, pada saat bersamaan mereka memuja para dewa lain, seperti dewa Apollo, Aphrodite, dan Hestia (Yunani) dan pemujaan terhadap dewa Mars atau Quirinus pada masyarakat Romawi. Karakteristik antropomorfis dapat diketahui dari objek yang disembahnya. Pada umumnya, objek yang disembah adalah para raja dan para pahlawan yang sudah meninggal dan masih diabadikan jasa-jasanya melalui

⁶ A.K. Malefijit, *Religion and Culture, and Introduction to Antropology of Religion*, the MacMillan Company, London, 1968, hlm. 41.

pensakralan roh-rohnya. Dewa Zeus diketahui pada masa hidupnya adalah seorang raja, sedangkan dewa Yupiter, Mars, dan Quirinus adalah gambaran anthropomorfis masyarakat Romawi dalam mempersonifikasikan alam sekitarnya. Yupiter adalah dewa langit yang digambarkan secara anthropomorfis sebagai dewa terang yang tinggal di puncak gunung. Mars adalah dewa perang yang digambarkan memiliki otoritas dalam melindungi negara dari musuh, memelihara ladang dan pertanian dari kerusakan. Adapun Quirinus digambarkan sebagai dewa perdamaian yang ditujukan terutama untuk melindungi rakyat biasa.

Kajian keagamaan yang bercorak filosofis itu ditunjukkan pula oleh Socrates, Plato, dan Aristoteles. Ketiga filosof ini sangat mempengaruhi pemikiran keagamaan Kristen Abad Pertengahan.⁷ Peradaban Barat abad pertengahan ini adalah peradaban Kristen. Pada masa ini, pengertian kultur selalu dihubungkan dengan misi penjajahan, sedangkan pengertian agama identik dengan pengetahuan, yakni agama Kristen. Oleh karena itu, dalam kajian-kajian agama yang dilakukannya, misi penjajahan dan Kristen tampak bergandengan. Munculnya kajian-kajian agama pada masa ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. **Sinkritisme**, bahwa latar belakang masyarakat Barat dalam mengkaji agama didasarkan pada fakta keagamaan yang ditemukan. Secara formal, Kristen menjadi agama orang Barat, tetapi pada kenyataannya, ada pula yang masih mempraktekkan tradisi keagamaan non-Kristen. Atas dasar ini, orang-orang Barat menelusuri asal-usul tradisi keagamaan tadi dengan maksud untuk memisahkan tradisi keagamaan Kristen dengan non-Kristen. Dari hasil kajian ini terda-

⁷ Konstruksi ketuhanan Yesus menjadi perdebatan yang panjang di lingkungan Kristiani, sehingga menghasilkan Konsili Nicea. Konsili ini untuk menyatukan pendapat, apakah Yesus sebagai Tuhan atau sebagai manusia.

pat beberapa teori, baik yang menyangkut metode maupun pendekatan tentang asal-usul agama.

2. **Penemuan area baru**, hal ini berkaitan dengan misi penjajahan, atau karena menemukan lokasi baru. Di lokasi baru ini, mereka melakukan penelitian keagamaan tentang isme-isme dan tradisi keagamaan yang berkembang. Dari hasil penelitian ini ditemukan agama-agama dan kepercayaan dan kepercayaan baru yang sebelumnya belum diketahui.
3. **Kepentingan missionari**, hal ini berkaitan dengan kepentingan agama Kristen untuk melakukan perluasan dan penyebaran agamanya.

Berdasarkan karakteristik masyarakat “Barat” di atas, muncul beberapa penstudi agama. Misalnya, Roger Bacon (1214-1294), orang Inggris yang untuk lingkungan Eropa merupakan orang pertama ahli di bidang **perbandingan sejarah agama**. Berdasarkan pendekatan perbandingan sejarah ini, ia menemukan beberapa tipologi agama yang ada di dunia, yakni: **Agama Pagan**, bercirikan penyembahan terhadap objek-objek alam; **Agama patung**, bercirikan politeistis. Ia memasukkan agama Budha pada tipologi kedua ini; **Agama Mongol**, bercirikan campuran ide monoteistis dan magi. Tipe ketiga ini dapat dilihat pada agama-agama Jepang, Korea, dan Cina; dan Agama-agama besar, yakni Islam, Kristen, dan Yahudi.

Lord Herbert (1583-1648) seorang ahli di bidang studi perbandingan, yang berkesimpulan bahwa yang menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk lainnya adalah agama. Oleh karena itu, tidak ada yang disebut **ateis**. **Ateis** hanyalah orang yang berkeberatan untuk mempercayai Tuhan. Dia mencirikan beberapa aspek yang disebut agama, yakni: ada Dzat Yang suci; ada unsur penyembahan; ada tujuan kebajikan; ada unsur tobat; dan ada sanksi, yakni pahala dan siksa. Kelima aspek ini sampai sekarang masih

menjadi pegangan para penstudi agama dalam melakukan kajiannya. Roland Robertson, misalnya, menyebutkan adanya lima dimensi dalam agama, yaitu: keyakinan, yakni doktrin agama; praktek agama, meliputi pemujaan dan ketaatan; pengalaman agama; pengetahuan agama; dan konsekuensial.⁸

Pada masa Revolusi Perancis, Robespierre pun mengungkapkan *The Cult of Divine Reason* (pemujaan terhadap akal tuhan). Sejalan dengan semangat rasionalisme, masalah teori evolusi tentang asal-usul agama menolak adanya revelation (wahyu). Buku David Hume, *Natural History of Religion* (1757) dan Voltair, *Essay* (1780) merupakan contoh yang menonjol dalam teori evolusi. Perkembangan selanjutnya ditandai dengan penyelidikan historis tentang agama. William Jones tentang Sanskrit; Champollion tentang Mesir Kuno; dan Ernest Renan itu (1822-1892) yang pertama-tama menciptakan istilah *Comparative Study of Religion*. Penyelidikan historis ini kemudian dilanjutkan oleh E.B. Tylor tentang asal-usul agama primitif secara evolusioner.⁹

B. Kemunculan Religionswissenschaft

Menjelang abad ke-19 diwarnai oleh semangat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta orientasi studi agama pun mengalami perubahan. Studi-studi agama tidak lagi bersifat primordial atau hanya untuk kepentingan penyebaran agamanya tetapi lebih didorong oleh semangat metodologis atau ilmiah, yakni berangkat atas dasar kepentingan dan perkembangan ilmu pengetahuan (scientific method). Metodologi menjadi aspek terpenting dalam sebuah kajian ilmu pengetahuan. Metodologi menentukan bagaimana cara

⁸ Roland Robertson, *Sosiologi Agama*, terjemahan, Rajawali, Jakarta, 1988, hlm. 56.

⁹ Joachim Wach, *The Comparative Study of Religions*, diedit oleh J.M. Kitagawa, Columbia University Press, New York, 1958, edisi Indonesia diterbitkan oleh Rajawali, Jakarta, 1984.

kebenaran diperoleh. Pada masa ini, studi agama tampil dengan menggunakan metode dan pendekatan yang beragam, sesuai dengan kecenderungan dan keahlian akademik para penstudi. Kecenderungan untuk mengkaji agama secara kritis dan ilmiah berkembang pesat. Agama dijadikan sebagai pokok pembicaraan, baik dari arti praktis maupun teoretis, bertujuan untuk memahami, menggali, dan menganalisis unsur-unsur yang sama dari agama-agama yang berbeda. Tiga alasan utama mengkaji agama menggunakan pendekatan ilmiah ini adalah:

1. Kemajuan pesat ilmu pengetahuan, teknologi, dan pemikiran-pemikiran ilmiah mempengaruhi dinamika kehidupan beragama sehingga minat intelektual untuk mengkaji agama secara lebih mendalam menjadi sangat tinggi;
2. Kecenderungan untuk merekonstruksi agama dalam upaya mengembangkan pada semua urusan dunia; dan
3. Pengaruh-pengaruh sosial, politik, dan peristiwa-peristiwa internasional yang mempengaruhi agama-agama¹⁰.

Salah seorang penstudi agama yang memberikan kontribusi besar terhadap studi agama dengan menggunakan *scientific method* adalah Friedrich Max Muller (1823-1900), seorang berkebangsaan Jerman yang pada tahun 1867 memperkenalkan *religionswissenschaft* untuk melakukan penelitian ilmiah terhadap agama dengan menggunakan pendekatan filologi. Menurut Mukti Ali, watak *religionswissenschaft*¹¹ dibawa oleh Muller pada masa *enlightenment* (pencerahan). Sebagaimana para pemikir agama zaman ini, Muller menekankan

¹⁰ James Hasting, ed, *Encyclopaedia of Religion and Ethic*, Vol. 10, Scribner's, New York tt, vol.10, hlm. 662.

¹¹ Secara harfiah, istilah Jerman ini menunjukkan pada ilmu pengetahuan untuk mengkaji agama. Padanan katanya dalam bahasa Inggris lebih dekat dengan istilah *science of religion*. Lihat: Mukti Ali, *Ilmu Perbandingan agama*, Yayasan Nida Yogyakarta, 1968.

“*religi naturalis*”, yakni asal-usul alami dari agama akal dan berpendapat bahwa kebenaran dapat ditemukan pada esensi yang paling universal dari agama dan bukan manifestasinya yang khas. Kemudian, Joachim Wach lebih menegaskan bahwa perintis keilmiah studi agama adalah Max Muller yang dituangkan dalam bukunya *Comparative Mythology* (1856) dan *Introduction to the Science of Religion* (1970). Kedua karya Muller ini menekankan pada kajian mitos (*mite*) dan “bagaimana memahami agama orang lain (*to understand otherreligion*)”, dengan mengedepankan objektivitas sebagai watak keilmuan yang khas, serta memelihara metode *sui generis* dalam semua studi agama.

Mircea Eliade dalam bukunya *The Sacred and the Profan* menegaskan bahwa istilah *religionswissenschaft* yang diberikan Muller adalah ilmu agama-agama (*science of religions*) atau studi perbandingan agama (*comparative study of religion*) sebagaimana terdapat dalam karya pertamanya berjudul *Chips from a German Workshop* (London, 1867). Sekalipun kunci penelitian ilmiah Muller adalah *filologi*, namun dengan mempelajari perkembangan bahasa ini esensi agama secara ilmiah dapat tercapai. Dasar pemikiran Muller menggunakan pendekatan filologi mengkaji agama secara ilmiah adalah:

1. Sejarah manusia sesungguhnya adalah sejarah agama karena disadari bahwa agama merupakan jalan menuju pengetahuan yang benar.
2. Agama mendasari sejarah manusia dan merupakan sinar dan nyawa sejarah, dan tanpa agama sejarah apapun menjadi tidak suci.¹²

Metode ilmiah yang digunakan oleh Muller dalam mengkaji agama, sesuai dengan keahliannya di bidang filologi, adalah metode perbandingan dan sejarah. Kedua metode ini digunakan untuk

¹² Eliade, *The Sacred and the Profan*, Brace & World, New York, 1960.

menganalisis unsur-unsur yang sama dari agama-agama yang berbeda sehingga dapat diketahui hukum-hukum perkembangannya, terutama untuk menemukan dan membatasi asal-usul dan bentuk pertama dari agama itu. Dari kedua metode ini pula esensi agama-agama dapat diketahui.

Joachim Wach, sebagai penerus pemikiran Muller, menambahkan bahwa studi ilmiah agama mencakup tiga bidang utama, yakni: pertama, hermeneutika; kedua, studi tentang pengalaman keagamaan; dan ketiga, sosiologi agama. Mungkin secara lebih mendasar, ilmu agama dapat dilukiskan sebagai suatu jenis ensiklopedi keagamaan, yakni hasil penyelidikan yang terorganisasi rapi mengenai karakteristik dan fungsi agama. Herman L. Beck, salah seorang editor buku *Ilmu Perbandingan Agama* di Indonesia dan Belanda (1992), secara garis besar menjelaskan asal-usul istilah *Ilmu Perbandingan Agama*. Istilah ini merupakan terjemahan harfiah dari bahasa Inggris *The Comparative Study of Religion*, yang biasanya diperpendek dengan sebutan *Comparative Religion*.

Perbandingan agama berusaha untuk memahami semua aspek yang diperoleh agama, kemudian menghubungkan atau membandingkan agama yang satu dan yang lainnya untuk mencapai dan menentukan struktur yang fundamental dari pengalaman dan konsepsi keagamaan. Ini dilakukan dengan memilih dan menganalisis persamaan dan perbedaan antara agama-agama itu. Dari analisis perbedaan ini dapat ditemukan esensi dan arti penting agama bagi kehidupan manusia.

Sehubungan cara kerja IPA sejak kemunculannya selalu menggunakan metode dan pendekatan sejarah, fenomenologi, dan sosiologi, maka nama IPA disamakan dengan sejarah agama (*history of religion*), fenomenologi agama (*phenomenology of religion*), dan sosiologi agama (*sociology of religion*). Berkaitan dengan ini, Mircea Eliade

berpendapat bahwa sejak awal perkembangannya sebutan ilmu perbandingan agama belum populer, sehingga banyak bermunculan istilah-istilah sejenis, muncullah istilah ilmu agama-agama atau ilmu sejarah agama-agama yang menjadi lebih populer pada saat itu. Menurut Eliade, universitas yang pertama kali membuka jurusan sejarah agama terletak di Geneva pada tahun 1873 yang diikuti oleh Belanda pada tahun 1876.

Pada tahun 1879, jurusan ini ditetapkan sebagai bagian dari *College de France*, dan pada tahun 1885 dilembagakan pada *Ecole des Hautes Etudes* di Sorbone sebagai bagian dari ilmu pengetahuan keagamaan. Pada tahun 1884, *Free University of Brussels* membuka pula jurusan agama-agama. Pada tahun 1910, hal ini diikuti pula oleh Jerman, yang pertama di Berlin, kemudian di Leipzig dan Bonn. Demikian pula negara-negara Eropa mengikuti kecenderungan ini.¹³

Kajian-kajian agama yang dikembangkan ilmu perbandingan agama tidak bisa dilepaskan dari situasi historis dan kultural tempat agama itu berkembang. Semangat pengetahuan, sebagaimana tersebut diatas, sangat dominan dalam mengkaji agama. Berbeda dengan pada masa-masa awal kajian agama sebelum munculnya ilmu perbandingan agama, semangat keagamaan tertentu lebih dominan dalam mengkaji agama, sehingga mengabaikan kebenaran agama orang lain. Karena semangat teologis dalam pengertian agama sendirilah yang paling benar, aspek-aspek metodologis dalam mengkaji agama menjadi terabaikan. Yang muncul ke permukaan adalah saling menuduh, saling menyalahkan, dan tidak menutup kemungkinan menyebabkan terjadinya bentrokan antar agama. Dengan begitu, sikap penstudi dalam mengkaji agama: tidak menilai benar salahnya fakta agama, biarkanlah (para penganut) agama mengekspresikan kebenaran agamanya (*sui generis*).

¹³ Eliade, *History of Religion...*, *Op.Cit*, hlm. 216-232.

C. Wilayah Kajian Ilmu Perbandingan Agama

Dengan melihat aspek ontologis dan epistemologinya, ilmu dapat dikelompokkan menjadi ilmu kealaman, ilmu sosial, ilmu budaya, dan ilmu alat. Untuk mengetahui dan membedakannya dengan ilmu-ilmu itu, ilmu agama atau nama lainnya ilmu perbandingan agama, maka perlu diperhatikan objek material dan objek formanya. Objek material ilmu ini adalah agama dalam arti luas yang meliputi seluruh manifestasi agama dalam pikiran, tindakan dan hasil tindakan atau tingkah laku atau perbuatan manusia. Jika disederhanakan, objek material ilmu ini ialah doktrin, institusi, dan sikap penganut. Kepenganutan menjadi objek yang paling penting dalam studi IPA, karena berkaitan dengan kebenaran agama yang diyakininya (*truth claim*). Adapun objek formanya adalah kerangka teoritis atau dapat juga berarti aspek atau segi, atau dapat juga berarti disiplin ilmu yang dipakai sebagai alat penggarapannya.¹⁴

Joachim Wach menyatakan bahwa mempelajari agama atau bagian agama bertujuan untuk memahaminya. Bukan untuk mengetahuinya, karena bukan hanya sekedar untuk tahu, tetapi agar **paham** atau **mengerti**. Lebih tepatnya bahwa memahami agama itu adalah memahami artinya *to understand the meaning*, yang diusahakan adalah *the meaning*-nya, yaitu arti penting suatu agama bagi para pemeluknya atau fungsinya dalam kehidupan masyarakat beragama yang bersangkutan.

Adapun yang berkaitan dengan objek forma ilmu ini adalah cara penghampiran objek material. Tentu saja, hal ini berhubungan dengan metode dan pendekatan yang digunakan dalam mempelajari agama. Dengan melihat objek materi dan forma ilmu perbandingan agama, su-

¹⁴ Romdhon, *Metodologi Ilmu Perbandingan Agama*, Yogyakarta, 1996, hlm. 1-6.

dah tentu bahwa yang menjadi wilayah kajian ilmu perbandingan agama sangat luas, yaitu meliputi seluruh aspek agama dan keanekaragamannya serta seperangkat teori keilmuan tertentu yang dapat menghampirinya. Karena begitu luasnya, objek kajian ilmu ini harus terus-menerus mengamati dan memahami perkembangan dan dinamika agama.

Dalam studi IPA, pendekatan berkaitan dengan keahlian atau disiplin ilmu, sedangkan metode bergantung pada keahlian. Dalam suatu kajian, bisa menggabungkan dua pendekatan menjadi sebuah metode. Misalnya, metode historis-fenomenologis dan antropologis-sosiologis.

Dengan demikian, studi agama adalah suatu kajian sistematis dan metodologis terhadap agama-agama yang ada sebagai kajian yang terbuka dan netral, studi agama mengkaji baik dari segi asal usul keberadaannya sebagai suatu sistem keyakinan dan kepercayaan dalam konteks hubungan antar agama. Perkembangan dalam bidang studi agama sekitar antara tahun 1859 hingga tahun 1869 yang ditandai dengan terbitnya buku Darwin "the origin of species". Setelah tahun 1869 muncul istilah "Perbandingan Agama" (comparative religion), sebagai padanan kata bagi istilah "Studi Agama" (the science of religion). Akan tetapi sebagai sebuah disiplin ilmu, studi agama mulai mendapat perhatian yang luas dan sungguh-sungguh dirintis sejak tahun 60-an dan 70-an, sebagai suatu disiplin keilmuan setahap demi setahap memperkuat dan memperluas statusnya sebagai "pengetahuan ilmiah" atau "ilmu" sejak awal mula kemunculannya, Obyek kajian ilmu agama adalah semua agama, baik agama-agama masa lalu, maupun agama-agama masa sekarang, akan tetapi untuk keberlangsungan sebuah ilmu Studi agama memerlukan juga beberapa metodologi untuk memahami sebuah agama. Oleh karena

itu dalam tulisan ini akan menguraikan beberapa metodologi studi agama-agama: Metode; Teologi, Historis,

D. IPA di Indonesia

Sejalan dengan keinginan untuk melakukan perubahan nama jurusan “Perbandingan Agama” menjadi Jurusan “Studi Agama-Agama”, sebagaimana telah diulas sebelumnya, tentu tidak berarti semua fakultas Ushuluddin (baik UIN maupun IAIN di Indonesia) yang menyelenggarakan jurusan perbandingan agama menyepakati perubahan ini. Pertimbangan peminat, lingkungan social cultural dan kehidupan beragama bisa berbeda. Oleh karena itu, setidaknya, upaya sosialisasi dan publikasi berkaitan dengan studi agama-agama harus lebih giat dilakukan, baik di lingkungan siswa maupun umat Islam pada umumnya.

Perubahan paradig/motto Kemenag RI “ikhlas beramal” menjadi “membangun kerukunan beragama” merupakan peluang dan kesempatan yang dapat dilakukan oleh para penggiat studi agama-agama untuk lebih aktif melakukan sosialisasi dan publikasi. Kegiatan yang memungkinkan dan mendesak untuk dilakukan dengan melibatkan elemen-elemen yang ada di masyarakat dalam bentuk kerjasama, yaitu fak. Ushuluddin dengan Pemda, MUI, dan Kemenag (Kanwil dan Kemenag Kab/Kota) adalah menyelenggarakan “Pelatihan Tenaga Kerukunan Beragama bagi umat Islam”, baik dari kalangan mahasiswa/pelajar, guru, ustadz, penyuluh tenaga teknis keagamaan, dan ormas-ormas yang ada. Sumber materi Ilmu Perbandingan agama, tafsir dan hadis kerukunan, geografi dan demografi keagamaan, dan regulasi yang menjadi kebijakan pemerintah, mendasari kegiatan ini

Sosok Mukti Ali tidak bisa dilepaskan dari perkembangan IPA di Indonesia. Sejak Mukti Ali menduduki jabatan Menteri Agama (1971-

1978), maka upaya memodernisasi IAIN sebagai lembaga akademis dilakukan secara sistematis. Disiplin ilmu baru diperkenalkan, misalnya Perbandingan Agama (diperkenalkan pada tahun 1960 dan pada tahun 1971 menjadi salah satu kajian utama Post Graduate Program). Modernisasi tersebut hingga kini menimbulkan dampak yang signifikan terhadap wacana pluralisme. Pemikiran Mukti Ali tentang pluralisme terutama terinspirasi oleh gurunya di Universitas McGill, Wilfred Cantwell Smith. Pengaruh Smith yang besar dalam dirinya adalah sikap toleransi yang besar terhadap agama lain. Hal ini pula yang menggerakkan Mukti Ali untuk memasukkan mata kuliah Perbandingan Agama di IAIN Jakarta dan Yogyakarta. Kedua IAIN tersebut dijadikan semacam pilot project bagi IAIN yang lain.

Smith menaruh perhatian yang besar terhadap wacana pluralisme agama kendati tidak secara eksplisit dinyatakan dalam buku-buku karyanya; namun substansi pemikirannya mengarah kepada pluralisme. Smith mengajak perlunya melepaskan terminologi “agama” sebagai kata benda –bukan sebagai kata sifat– secara sepenuhnya, bukan selamanya. Karakter pemikiran Smith dalam bidang teologi dan study of religion secara umum adalah kepiawaiannya dalam melontarkan gagasan-gagasan yang “inovatif” dan provokatif, baik dalam hal metodologi maupun teori, dan mengemasnya dengan cara yang menarik dan menggelitik pula. Maka, jadilah sosok serta pemikiran Smith ini berpengaruh besar dalam mengarahkan dan mewarnai kajian-kajian teologi, filsafat agama, dan religionswissenschaft (ilmu perbandingan agama). Pendekatan empiris kemanusiaan yang digunakan Smith untuk mempelajari Islam inilah yang membuat kagum seorang Mukti Ali sehingga pada tahun 1960 dia memasukkan mata kuliah Perbandingan Agama dalam kurikulum IAIN. Atas nama kerukunan umat beragama, Mukti Ali meluncurkan konsepsi pemikiran yang berujung pada agree in disagreement–setuju dalam perbedaan. Gagasan ini menekankan bahwa agama yang dia

peluk, itulah yang paling baik. Walaupun demikian, ia mengakui, di antara agama yang satu dengan agama-agama lainnya selain terdapat perbedaan-perbedaan juga terdapat persamaan-persamaan. Pengakuan seperti ini akan membawa kepada suatu pengertian yang baik yang dapat menimbulkan adanya saling menghargai dan sikap saling menghormati antara kelompok pemeluk agama-agama yang satu dengan yang lain.

Sejalan dengan perkembangan studi agama di Indonesia, Amin Abdullah, dalam buku *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas? Menekankan perlunya dijalin kerjasama yang erat antara pendekatan teologis, antropologis, dan fenomenologis terhadap keberagaman manusia untuk memecahkan problema realitas pluralisme agama yang cukup pelik dalam era globalisasi budaya seperti sekarang. Tampaknya, pendekatan teologis penting dilibatkan dalam studi IPA, dengan tetap memelihara tujuan dipelajarinya IPA untuk memunculkan kesadaran dalam beragama, keterbukaan, toleran, dan kritis terhadap fenomena kehidupan beragama.*

Masih banyak para ahli dan lembaga yang mengikuti dan terjun langsung dalam kegiatan studi agama-agama di Indonesia yang tidak dapat disebutkan dalam tulisan ini. Semuanya menaruh harapan besar, bahwa melalui studi agama-agama kehidupan beragama di Indonesia akan semakin baik selaras dengan pesan semua agama adalah untuk kebaikan dan keharmonisan umat manusia.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Jurusan Studi Agama-Agama (SAA)¹⁵

1. Asal-Usul dan Nama Jurusan

Program studi ilmu perbandingan agama adalah suatu disiplin ilmu yang dijadikan nama jurusan di IAIN/UIN di bawah Fakultas Ushuluddin, merupakan salah satu jurusan yang terbilang tua. Jurusan Perbandingan Agama berdiri bersamaan dengan diresmikannya Fakultas Ushuluddin dan Syari'ah di Bandung serta Fakultas Tarbiyah di IAIN Sunan Gunung Djati di Bandung pada tanggal 5 april 1968 engan keputusan menteri agama nomor: 57 tahun 1968.

Melihat urgensinya agama dengan berbagai variabel yang menyertainya diperlukan kajian secara khusus untuk memahami peran-peran agama bagi masyarakat serta bangsa secara keseluruhan. Secara ideal, untuk memahami dan menjelaskan relasi antar unsur tersebut ditas, diperlukan pengetahuan ilmiah, yang mempunyai tingkat ketepatan dan kecermatan yang tinggi, dan dilakukan oleh berbagai tenaga ahli di bidangnya masing-masing. Dengan cara demikian, dapat diketahui anatomi dan dinamika kehidupan beragama, yang menjadi modal utama dalam memahami dan menyelesaikan masalah keagamaan dalam suatu kehidupan, baik dalam satuan kecil, maupun dalam satuan besar. Oleh karena itu, program studi Perbandingan Agama merupakan salah satu wahana untuk memahami dan menjelaskan kehidupan beragama itu secara akademis.

¹⁵ Sumber : Pedoman Akademik dan Visi Misi Jurusan SAA Fakultas Ushuluddin tahun 2017

2. Visi dan Misi

Sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi UIN Bandung, maka Visi dan Misi Prodi SAA mengikuti dan sejalan dengan visi dan misi fakultas serta universitas.

a. Visi, Misi dan Tujuan UIN Sunan Gunung Djati Bandung

- 1) Visi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, yaitu Menjadikan UIN sebagai perguruan tinggi yang unggul dan kompetitif yang mampu mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum berdasarkan paradigma wahyu memandu ilmu.
- 2) Misi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, yaitu Untuk menyiapkan generasi ulul albab yang mampu: (a) memadukan dzikir dan fikir, (b) Memiliki kecerdasan spiritual, emosional, dan intelektual, serta (c) menemukan, mengembangkan, menerapkan ilmu, teknologi, sosial, budaya, dan seni.

Adapun tujuan UIN Sunan Gunung Djati Bandung adalah :

- 1) Menyiapkan peserta didik yang memiliki karakteristik keteguhan iman, kemuliaaan akhlak, keluasan ilmu, dan keunggulan amal;
- 2) Mengembangkan penelitian, baik ilmu agama maupun umum; dan
- 3) Menyebarluaskan ilmu agama dan umum yang digunakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ushuluddin UIN Bandung

- 1) Visi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung “Menjadi pusat studi dan informasi

keushuluddinan yang unggul, kompetitif dan layak bersaing

- 2) "Misi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung (a) Menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang ilmu-ilmu keislaman yang berorientasi pada penguasaan dan pengembangan wawasan bidang ilmu-ilmu pokok agama dengan kekhususan aqidah dan filsafat, tafsir dan hadits, perbandingan agama, dan tasawuf psikoterapi untuk merespon berbagai perubahan sosial keagamaan di masyarakat. (b) Menyelenggarakan penelitian di bidang ilmu-ilmu keislaman yang berorientasi pada penguasaan dan pengembangan wawasan bidang ilmu-ilmu pokok agama dengan kekhususan aqidah dan filsafat, tafsir dan hadits, perbandingan agama, dan tasawuf psikoterapi untuk merespon berbagai perubahan sosial keagamaan di masyarakat. (c) Merumuskan pemikiran-pemikiran Islam baru yang memiliki tingkat relevansi dengan perubahan dan perkembangan sosial keagamaan di era modern.
- 3) Tujuan Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung :
 - a) Melaksanakan pendidikan, pengajaran, pengembangan ilmu dan nilai Islami, serta memadukan ilmu keislaman dan umum.
 - b) Memelihara tradisi keilmuan Islam dan dinamika pembaharuannya yang menghasilkan ilmu keislaman yang kontekstual dan aktual.
 - c) Melakukan penafsiran kritis terhadap pemikiran klasik, diimbangi interpretasi baru, sehingga

melahirkan pemikiran Islam kontekstual sesuai tuntutan zaman.

- d) Mencetak mahasiswa berakhlak mulia, rasional, analitis, dan berorientasi pada pemecahan masalah umat.

c. Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi Studi Agama-Agama

- 1) Visi Program Studi Perbandingan Agama/Studi Agama-Agama adalah “Unggul dan Terkemuka dalam Studi Agama-Agama pada Tahun 2018”
- 2) Misi Jurusan/Program Studi Perbandingan Agama/Studi Agama-Agama (a) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berorientasi kepada pengkajian, penguasaan, dan pengembangan dalam bidang ilmu perbandingan agama untuk menghasilkan sarjana yang religious, cakap dalam pengkajian agama-agama dan peka terhadap persoalan-persoalan sosial keagamaan. (b) Menyelenggarakan penelitian serta menerapkan dalam rangka mengatasi dan menyelesaikan problematika masyarakat beragama dan persoalan kemanusiaan dalam kerangka studi agama-agama. (c) Membangun kepercayaan bagi terciptanya kerjasama dengan berbagai pihak yang saling memberi manfaat untuk mewujudkan jaringan kerja di tingkat lokal, nasional dan internasional. (d) Memberdayakan masyarakat untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama melalui pelatihan, bimbingan, konsultasi, penyuluhan, dan pendampingan/advokasi. (e)

Membangun sikap toleran terhadap perbedaan jalan (cara) yang ditempuh manusia dalam beragama.

3) Tujuan Program Studi Perbandingan Agama/Studi Agama-Agama :

Mencetak sarjana yang professional dalam ilmu perbandingan agama yang berparadigma Islam dan semangat keIndonesiaan.

- a) Menyiapkan lulusan yang mampu memberikan kontribusi positif bagi peningkatan wawasan dan pemahaman keagamaan di masyarakat.
- b) Merumuskan konsep-konsep baru dalam bidang ilmu perbandingan agama untuk mendukung penyelesaian problematika masyarakat sesuai tuntutan dan perubahan zaman.
- c) Menyiapkan lulusan yang bersikap terbuka dan toleran dalam menghadapi pluralitas agama dan mampu membina kerukunan antar umat beragama.
- d) Menyiapkan lulusan yang mampu mengelola lembaga-lembaga keagamaan dan mampu memberikan pelayanan dalam bidang keagamaan, sosial, budaya, dan lain-lain.

B. Pengembangan Kurikulum Berbasis KKNI

1. Dasar Pengembangan

- a. Undang-undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- d. Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2006 Sistem Pelatihan Kerja Nasional.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010.
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- g. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
- h. Peratauran Menpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsipnal Dosen dan Angka Kreditnya.
- i. Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- j. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pembidangan Ilmu dan Gelar Kesarjanaan.
- k. Keputusan Mendiknas No 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
- l. Keputusan Mendiknas nomor 045/U/2002 tentang kurikulum inti pendidikan tinggi.

- m. Keputusan Menteri Agama Nomor 353/2004 tentang Pedoman Pengembangan Kurikulum PTAI.
- n. Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Pendidikan Islam Tentang Petunjuk Teknis Pengembangan kurikulum Berbasis Kompetensi Dengan Merujuk Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Tentang Kurikulum UIN SGD Bandung Tahun 2012
- o. Keputusan Rektor UIN SGD Bandung Nomor Un.05/1.1/PP.00.9/143/2012

2. Tujuan Pengembangan Kurikulum

Maksud dan tujuan pengembangan kurikulum untuk meningkatkan kualitas lulusan agar dapat merespon kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Pengembangan kurikulum tersebut dimaksudkan untuk menyusun model kurikulum berdasar standar nasional yang dapat dijadikan acuan untuk mengimplementasikan kurikulum di lapangan. Selain itu pengembangan kurikulum dimaksudkan untuk melihat relevansi mata kuliah beserta pelaksanaannya (SAP dan Silabi) terkait dengan perkembangan dan penyesuaian dengan kebutuhan dunia kerja, dan pemutakhiran mata kuliah disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi lulusan untuk memasuki dunia kerja.

3. Struktur Kurikulum

a. Profil Lulusan

Profil Utama Lulusan Program Studi PA/SAA adalah: Lulusan Program Studi Perbandingan Agama/ Studi Agama-Agama adalah sebagai Analis Agama dan Kehidupan Umat Beragama yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas

serta mampu mendialogkan Islam dengan agama-agama lain, dan mendialogkan agama dengan perkembangan global dalam kehidupan umat beragama yang multi agama berdasarkan etika keilmuan dan keahlian.

b. Pofil Tambahan Lulusan

Profil Tambahan Lulusan: Penyuluh Agama pada Kementrian Agama RI di tingkat Kabupaten/Kota, Peneliti dan Penulis, Penggiat Organisasi Masyarakat, Penggiat FKUB (Provinsi, kabupaten/kota), Mediator Konflik, entrepreneur.

c. Deskripsi Kualifikasi Level 6 Prodi SAA

Sesuai dengan ideologi Negara dan budaya bangsa Indonesia, maka implementasi sistem pendidikan nasional dan sistem pelatihan kerja yang dilakukan di Indonesia pada setiap level kualifikasi pada KKNI mencakup proses yang membangun karakter dan kepribadian manusia Indonesia, secara umum memiliki kualifikasi sebagai berikut:

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- 3) Berperan sebagai warganegara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- 4) Mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain;

- 6) Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

Secara khusus, Deskripsi kualifikasi level 6 jenjang sarjana (S1) pada Prodi SAA dapat dirinci sesuai paragraph generic level 6 berikut ini :

Paragraf pertama : *Mampu memanfaatkan Ipteks dalam bidang keahliannya dan mampu beradaptasi dalam situasi yang dihadapi dalam penyelesaian masalah.* Kualifikasi ini dideskripsikan sebagai berikut :

- 1) Mampu memanfaatkan teori-teori ilmu perbandingan agama, sosiologi agama, antropologi agama, psikologi agama, dan metodologi penelitian agama.
- 2) Menguasai bahan kajian Ilmu Perbandingan Agama, Sosiologi Agama, Antropologi Agama, Psikologi Agama, dan Metodologi Penelitian Agama untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat dan dalam kehidupan profesi sebagai Ilmuwan di bidang Perbandingan Agama.
- 3) Mampu menunjukkan perilaku Islami dalam kehidupan bermasyarakat, mengelola lembaga agama, dan dalam kehidupan di dunia kerja.
- 4) Memiliki kemampuan berfikir fleksible dalam menghadapi perubahan IPTEK.

Paragraf kedua : *Menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoretis bagian bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian secara prosedural.*

Kualifikasi ini dideskripsikan sebagai berikut :

- 1) Menguasai dasar-dasar Studi Islam untuk pengembangan studi agama-agama.

- 2) Mampu menganalisis masalah-masalah sosial keagamaan menggunakan pendekatan multi atau inter-disipliner (sosiologis, antropologis, filosofis, psikologis, fenomenologis, teologis, dll).
- 3) Menguasai teori-teori menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga keagamaan untuk pengembangan studi agama-agama.
- 4) Menguasai prinsip-prinsip negosiasi, mediasi, arbitrase, dan konsiliasi untuk penyelesaian konflik sosial keagamaan.
- 5) Menguasai teori dan metode pengembangan masyarakat (*community development*) berbasis kerukunan antar umat beragama.
- 6) Menjunjung tinggi kode etik keilmuan dalam pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Paragraf ketiga : *Mampu mengambil keputusan strategis berdasarkan analisis informasi dan data dan memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi.*

Kualifikasi ini dideskripsikan sebagai berikut :

- 1) Mampu bersikap obyektif dalam menghadapi problem sosial-keagamaan.
- 2) Memiliki kemampuan kepemimpinan dan manajerial dalam masyarakat yang majemuk secara keagamaan.
- 3) Mampu merumuskan prinsip-prinsip negosiasi, mediasi, arbitrase, dan konsiliasi dalam penyelesaian konflik sosial keagamaan.
- 4) Mampu berkomunikasi lintas agama dan budaya.
- 5) Mampu mempromosikan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat yang majemuk.

Paragraf keempat : *Bertanggungjawab atas pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggungjawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.*

Kualifikasi ini dideskripsikan sebagai berikut :

- 1) Mampu menghasilkan penelitian-penelitian sosial keagamaan secara obyektif.
- 2) Memiliki sikap toleran dalam pengembangan masyarakat keagamaan yang majemuk.
- 3) Mampu mempraktikkan kode etik ilmiah dalam penelitian dan publikasi masalah-masalah sosial keagamaan.
- 4) Mampu merumuskan desain penyelesaian konflik sosial keagamaan secara obyektif, faktual dan bertanggung jawab

4. Capaian Pembelajaran Program Studi SAA

Capaian Pembelajaran prodi SAA pada bidang Sikap dan Tata Nilai secara umum adalah :

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religious.
- b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
- c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.
- d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada bangsa dan Negara.
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.
- f. Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

- g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- h. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.
- i. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
- j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan.
- k. Menjunjung tinggi nilai-nilai etika akademik, yang meliputi kejujuran dan kebebasan akademik dan otonomi akademik.
- l. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap nilai-nilai akademik yang diembannya.

Capaian Pembelajaran prodi SAA pada bidang Sikap dan Tata Nilai secara khusus adalah :

- a. Menjunjung tinggi nilai-nilai ke-Indonesiaan dan kemasyarakatan, meliputi, penghargaan terhadap keanekaragaman, nasionalisme dan tanggungjawab bernegara, dan berbangsa, berdasarkan Pancasila;
- b. Menjunjung tinggi nilai-nilai etika akademik, yang meliputi kejujuran dan kebebasan akademik dan otonomi akademik;
- c. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap nilai-nilai akademik yang diembannya sebagai ilmuwan di bidang Perbandingan Agama.

Lulusan program sarjana PA/SAA wajib memiliki pengetahuan umum sebagai berikut :

- a. Memiliki pengetahuan tentang filsafat pancasila, kewarganegaraan, dan wawasan kebangsaan (nasionalisme) dan globalisasi;
- b. Memiliki pengetahuan terkait dengan cara mengemukakan gagasan ilmiah secara lisan dan tertulis

dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja (dunia non akademik);

- c. Memiliki pengetahuan terkait dengan pengembangan kemampuan berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Arab dan Inggris dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja (dunia non akademik);
- d. Memiliki pengetahuan terkait dengan pengembangan kemampuan berfikir kritis, logis, kreatif, inovatif dan sistematis serta memiliki keingintahuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok dalam komunitas akademik dan non akademik;
- e. Memiliki pengetahuan dasar-dasar keislaman sebagai agama rahmatan lil 'alamin
- f. Memiliki kemampuan penguasaan pengetahuan terkait dengan integrasi keilmuan dan keislaman sebagai paradigma keilmuan;
- g. Mampu mengidentifikasi ragam upaya wirausaha yang bercirikan inovasi dan kemandirian yang berlandaskan etika Islam, keilmuan, profesional, lokal, nasional dan global.

Sedangkan, Lulusan program sarjana PA/SAA wajib memiliki pengetahuan khusus sebagai berikut:

- a. Memiliki pengetahuan komprehensif dalam bidang Tauhid, Akhlak-Tasawwuf, Tafsir, dan Hadis.
- b. Memiliki penguasaan Ilmu Studi Agama-agama secara luas dan mendalam berkaitan dengan konsep, filosofi,

metode disiplin keilmuan (*body of knowledge*) Studi Agama-agama.

- c. Memiliki pengetahuan komprehensif tentang aneka pendekatan dan metodologi dalam studi agama-agama.
- d. Memiliki pengetahuan komprehensif mengenai Tafsir Tematik/*nushus quraniyah* tentang agama-agama.
- e. Memiliki pengetahuan komprehensif mengenai Hadis tentang agama-agama.
- f. Memiliki pengetahuan komprehensif tentang Agama Kristen, Katholik, Hindusime, Buddhisme, Kong Hu Chu, Studi Agama Lokal, serta Gerakan Keagamaan Baru.
- g. Memiliki kemampuan akademik dalam Psikologi Agama, Sosiologi Agama, Filsafat Agama, Antropologi Agama, Fenomenologi Agama dan Teologi.

5. Capaian Pembelajaran Bidang Keterampilan

Lulusan Program Sarjana PA/SAA wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:

- a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam kontek pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.
- b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur
- c. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan

etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni

- d. Terampil Menyusun deskripsi saintifik, hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi
- e. Mampu mengambil keputusan secara tepat, dalam konteks penjelasan masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data
- f. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega dan sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya
- g. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok melakukan supervise dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya
- h. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggungjawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri
- i. Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan keilmuan dan kemampuan kerja;
- j. Mampu berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Arab dan Inggris dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja (dunia non akademik);
- k. Mampu membaca al-Qur'an berdasarkan ilmu qira'at dan ilmu tajwid secara baik dan benar
- l. Mampu menghafal al-Qur'an juz 30 (*Juz Amma*).
- m. Mampu melaksanakan ibadah praktis dan bacaan do'anya dengan baik dan benar.

Sedangkan, Lulusan program sarjana Pendidikan PA/SAA wajib memiliki keterampilan khusus sebagai berikut :

- a. Terampil menghasilkan produk pemikiran keislaman yang toleran dan moderat dalam masyarakat multi agama.
- b. Terampil melakukan mediasi dan resolusi konflik terkait dengan konflik sosial keagamaan dalam masyarakat multi agama.
- c. Terampil menjalin kerjasama antar lembaga keagamaan dan umat beragama.
- d. Terampil menghasilkan penelitian keagamaan yang bersifat inter-religious.
- e. Terampil mempromosikan agama sebagai kekuatan positif dalam rangka tercapainya peradaban yang damai dan berkemajuan.

6. Pemetaan dan Penetapan Bahan Kajian

Pemetaan dan Penetapan bahan kajian prodi SAA dapat di lihat pada bagan di bawah ini :

NO	PROFIL UTAMA LULUSAN	CAPAIAN PEMBELAJARAN	BAHAN KAJIAN/ PROGRAM	MATA KULIAH/ KEGIATAN	BOBOT SKS
	Lulusan Program Studi Perbandingan Agama/ Studi Agama-Agama adalah sebagai Analis Agama dan Kehidupan Umat Beragama yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas serta mampu mendialogkan Islam dengan agama-agama lain, dan mendialogkan agama dengan perkembangan global dalam kehidupan umat beragama yang multi agama berdasarkan etika keilmuan dan keahlian.	1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religious	Iman, Islam, Ihsan	1. Ulum al-Quran 2. Ulum al-Hadis 3. Ilmu Fiqh 4. Ilmu Kalam	2 2 2 2
		1. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika	Nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas	1. Sejarah Peradaban Islam 2. Akhlak Tasawuf	2 2

			berdasarkan agama, moral, dan etika		
		2. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila	Kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	2
		3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada bangsa dan Negara	Nasionalisme dan kebangsaan	Pendidikan Kewarganegaraan	2
		4. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan	Keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan	1. Sosiologi 2. Antropologi 3. Psikologi	2 2 2

		kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain	kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain		
		5. Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan	Kepekaan sosial dan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan	1. Sosiologi Agama 2. Antropologi Agama 3. Psikologi Agama	2 2 2
		6. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara	1. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2. Studi Budaya Lokal	2 2
		7. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik	Nilai, norma, dan etika akademik	1. Sosiologi 2. Akhlak Tasawwuf 3. Filsafat Ilmu	2 2 2
		8. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri	sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang	Akhlak Tasawwuf	2

			keahliannya secara mandiri		
		9. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan	semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan	1. Manajemen Lembaga Keagamaan 2. Kewirausahaan	2 2
		10. Menjunjung tinggi nilai-nilai etika akademik, yang meliputi kejujuran dan kebebasan akademik dan otonomi akademik;	nilai-nilai etika akademik, yang meliputi kejujuran dan kebebasan akademik dan otonomi akademik	Akhlak Tasawwuf	2
		11. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap nilai-nilai akademik yang diembannya	Tanggung jawab terhadap nilai-nilai akademik	1. Akhlak Tasawuf 2. Psikologi	2 2

		12. Menjunjung tinggi nilai-nilai keIslaman yang mencakup ketakwaan terhadap Allah SWT, penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, internalisasi nilai dan norma;	nilai-nilai keIslaman yang mencakup ketakwaan terhadap Allah SWT, penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, internalisasi nilai dan norma	1. MSI 2. Ulum al-Quran 3. Ulum al-Hadis 4. Ilmu Fikih 5. Ilmu Kalam 6. Sejarah Peradaban Islam 7. Akhlak Tasawwuf 8. Tafsir 9. Hadis	2 2 2 2 2 2 2 2 2
		13. Menjunjung tinggi nilai-nilai ke-Indonesiaan dan kemasyarakatan, meliputi, penghargaan terhadap keanekaragaman, nasionalisme dan tanggungjawab bernegara, dan	nilai-nilai ke-Indonesiaan dan kemasyarakatan, meliputi, penghargaan terhadap keanekaragaman, nasionalisme dan tanggungjawab bernegara, dan	1. Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan 2. Pendidikan Kerukunan Umat Beragam 3. Agama dan Resolusi Konflik	2 2 2

		berbangsa, berdasarkan Pancasila;	berbangsa, berdasarkan Pancasila		
		14. Menjunjung tinggi nilai-nilai etika akademik, yang meliputi kejujuran dan kebebasan akademik dan otonomi akademik;	nilai-nilai etika akademik, yang meliputi kejujuran dan kebebasan akademik dan otonomi akademik		
		15. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap nilai-nilai akademik yang diembannya sebagai ilmuwan di bidang Perbandingan Agama	nilai-nilai akademik sebagai analis agama dan kehidupan umat beragama pada lembaga-lembaga formal dan nonformal	1. Ilmu Perbandingan Agama 2. Hubungan Antar Agama 3. Manajemen Lembaga Agama 4. Agama dan resolusi konflik	2 2 2 2

7. Kurikulum dan Distribusi Mata Kuliah

a. Mata Kuliah Umum (MKU)

No	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1.	NAS 00001	Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)	2
2.	NAS 00002	Bahasa Indonesia	2
3.	NAS 00003A-B	Bahasa Inggris 1 dan 2	4
4.	PTI 00001 A-B	Bahasa Arab 1 dan 2	4
5.	PTI 00002	Ilmu Tauhid	2
6.	PTI 00003	Sejarah Peradaban Islam	2
7.	PTI 00004	Ilmu Tasawuf	2
8.	PTI 00005	Ulumul Qur`an	2
9.	PTI 00006	Ulumul Hadits	2
10.	PTI 00008	Ilmu Fiqih	2
		JUMLAH	24

b. Mata Kuliah Utama (MKUT)

No	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1.	USH 00001	Metodologi Studi Islam (MSI)	2
2.	USH 00036	Tafsir	2
3.	USH 00035	Hadits	2
4.	USH 00002	Sosiologi	2
5.	USH 00003	Antropologi	2
6.	USH 00004	Psikologi	2
7.	USH 00005	Filsafat Agama	2
8.	USH 00006	Filsafat Islam	2
9.	USH 00008	Filsafat Umum	2
10.	USH 00009	Logika	2

11	USH 00010	Ilmu Kalam	2
12	USH 00011	Filsafat Ilmu	2
13	USH 00012	Metodologi Penelitian	2
14	USH 00031	IAD	2
15	USH 00013	Teknik Penulisan Skripsi	2
16	PTI 00007	KKM	2
17	USH 00023	Sejarah Agama-Agama	2
18	USH 00014	Aliran Modern dalam Islam	2
		JUMLAH	36

c. Mata Kuliah Keahlian(MKK PS)

No	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1	SAA 00001	Studi Masyarakat lokal 1 & 2	4
2	USH 00015	Ilmu Perbandingan Agama 1 & 2	4
3	USH 00016	Sosiologi Agama 1 & 2	4
4	USH 00017	Antropologi Agama 1 & 2	4
5	USH 00018	Psikologi Agama 1 & 2	4
6	SAA 00003	Studi Agama Lokal 1 & 2	4
7	SAA 00004	Agama Yahudi	2
8	SAA 00005	Agama Kristen	3
9	SAA 00006	Agama Hindu	3
10	SAA 00007	Agama Budha	3
11	SAA 00008	Agama Khonghuchu	2
12	SAA 00009	Fenomenologi Agama	2
13	SAA 00010	Orientalisme/Oksidentalisme	2
14	SAA 00011	Metodologi Penelitian Agama	2
15	SAA 00012	Hubungan Antar Agama	2
16	USH 00022	Agama dan Resolusi Konflik	2

17	SAA 00013	Manajemen Lembaga Keagamaan	2
18	SAA 00014	Perkembangan Teologi Kristen Moderen	2
19	SAA 00015	Gerakan Keagamaan Baru	2
20	SAA 00016	Kapita Selekta Studi Agama-agama	2
21	SAA 00017	Pendidikan Kerukunan Umat Beragama	2
22	SAA 00018	Demografi	2
23	USH 00039	PPM	2
24	USH 00037	Komprehensif	2
25	USH 00038	Munaqasyah	4
26	USH 00039	Praktek Ibadah	0
27	USH 00040	Praktek Tilawah	0
28	USH 00041	Praktek Bahasa	0
		JUMLAH	67

d. Mata Kuliah Keahlian Tambahan (MKKT 1)

No	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1	USH 01020	Retorika	2
2	USH 01021	Kewirausahaan	2
3	USH 01022	Jurnalistik	2
4	SAA 01001	Agama dan Radikalisasi	2
5	SAA 01002	Agama dan Gender	2
6	SAA 01003	Agama dan Pariwisata	2
7	SAA 01004	Desain Pembelajaran	2
8	SAA 01005	Agama dan globalisasi	2
9	SAA 01006	Agama dan ekonomi	2

10	SAA 01006	Komunikasi lintas Agama dan Lintas budaya	2
11	SAA 01007	Praktek <i>Living Values Education (LVE) for Peace and Tolerance</i>	0
12	USH	Penyuluhan Anti Narkoba	0
		JUMLAH	20

C. Rekapitulasi Beban Studi dalam SKS

Jumlah SKS PS (minimum untuk kelulusan) : **147** SKS yang tersusun sebagai berikut

NO	Jenis Mata Kuliah	SKS	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mata Kuliah Umum (MKU)	24	
2	Mata Kuliah Utama (MKUT)	36	
3	Mata Kuliah Keahlian (MKK PS)	67	
4	Mata Kuliah Kewenangan Tambahan (MKKT 1)	20	
	Jumlah	147	

Distribusi Mata Kuliah

Semester I

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	NAS 00001	PPKn	2
2	USH 00031	IAD	2
3	PTI 00005	Ulumul Qur`an	2

4	NAS 00002	Bahasa Indonesia	2
5	PTI 00001 A	Bahasa Arab I	2
6	NAS 00003 A	Bahasa Inggris I	2
7	USH 00002	Sosiologi	2
8	USH 00004	Psikologi	2
9	USH 00003	Antropologi	2
10	PTI 00006	Ulumul Hadits	2
	Jumlah		20

Semester II

NO	KODE	Nama Mata Kuliah	SKS
1	USH 00010	Ilmu Kalam	2
2	PTI 00001 B	Bahasa Arab II	2
3	NAS 00003B	Bahasa Inggris II	2
4	PTI 00003	Sejarah Peradaban Islam	2
5	PTI 00002	Ilmu Tauhid	2
6	USH 00001	MSI	2
7	USH 00008	Filsafat Umum	2
8	PTI 00004	Ilmu Tasawuf	2
9	USH 00009	Logika	2
10	PTI 00008	Ilmu Fiqih	2
11	USH 00039	Praktek Ibadah	0
		JUMLAH	20

Semester III

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	USH 00006	Filsafat Islam	2
2	USH 01022	Jurnalistik	2
3	USH 00016-A	Sosiologi Agama I	2
4	USH 00017-A	Antropologi Agama I	2

5	USH 00018-A	Psikologi Agama I	2
6	USH 00014	Almodis	2
7	USH 00036	Tafsir	2
8	USH 00035	Hadits	2
9	USH 00011	Filsafat ilmu	2
10	SAA 01003	Agama & Pariwisata	2
11	USH 00040	Praktek Tilawah	0
	JUMLAH		20

Semester IV

NO	KODE	NAMA MATA KULIAH	SKS
1	USH 00005	Filsafat Agama	2
2	USH 00012	Metode Penelitian	2
3	USH 01020	Retorika	2
4	USH 00023	Sejarah Agama-Agama	2
5	SAA 00001-A	Studi Agama Lokal I	2
6	USH 00016- B	Sosiologi Agama II	2
7	SAA 00018	Demografi	2
8	USH 00017-B	Antropologi Agama II	2
9	USH 00018-B	Psikologi Agama II	2
10	SAA 00002 A	Ilmu Perbandingan Agama 1	2
11	USH 00041	Praktek Bahasa	0
		JUMLAH	20

Semester V

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	SAA 00004	Agama Yahudi	2
2	SAA 00005	Agama Kristen	3
3	SAA 00006	Agama Hindu	3

4	SAA 01001	Agama dan Radikalisasi	2
5	SAA 00002 -B	Ilmu Perbandingan Agama II	2
6	SAA 00001-A	Studi Masyarakat lokal I	2
7	USH 00039	PPM	2
8	USH 01021	Kewirausahaan	2
9	SAA 00009	Fenomenologi agama	2
10	SAA 02001-B	Studi Agama Lokal 2	2
		JUMLAH	23

Semester VI

NO	KODE	NAMA MATA KULIAH	SKS
1	SAA 00007	Agama Budha	3
2	SAA 00008	Agama Kho-hu-cu	2
3	SAA 00014	Perkem Teologi Kristen Moderen	2
4	USH 00022	Agama dan Resolusi Konflik	2
5	SAA 02001-B	Studi Masyarakat lokal 2	2
6	SAA 00012	Hubungan Antar Agama	2
7	SAA 00011	Metode Penelitian Agama	2
8	SAA 00013	Manajemen Lembaga Keagamaan	2
9	SAA 00010	Orientalisme/Oksidentalisme	2
10	SAA 00015	Gerakan keagamaan baru	2
11	SAA 01007	Praktek <i>Living Values Education (LVE) for Peace and Tolerance</i>	0
		JUMLAH	21

Semester VII

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	USH 00013	Teknik Penulisan Skripsi	2
2	SAA 00016	Kapita Selekta Studi Agama	2
3	SAA 00017	Pendidikan Kerukunan Beragama	2
4	SAA 01004	Desain Pembelajaran	2
5	SAA 020003	Komunikasi lintas agama dan budaya	2
6	SAA 01005	Agama dan Globalisasi	2
7	SAA 01006	Agama dan Ekonomi	2
8	SAA 01002	Agama dan Gender	2
9	USH 00042	Penyuluhan Anti Narkoba	0
	JUMLAH		16

Semester VIII

NO	KODE	NAMA MATA KULIAH	SKS
1	USH 00037	Komprehensif	2
2	USH 00038	Munafasyah	4
3	USH 00040	KKM	2
	JUMLAH		8

D. Program Pengembangan

1. Pendekatan dan Metode Pembelajaran

Sistem pembelajaran PA/SAA dibangun berdasarkan perencanaan yang relevan dengan tujuan, ranah belajar dan

hierarkinya. Pendekatan dan metode Pembelajaran dilaksanakan menggunakan berbagai strategi dan teknik yang menantang, mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis bereksplorasi, berkreasi dan bereksperimen dengan memanfaatkan aneka sumber. Setiap perkuliahan mengedepankan pendekatan participatory dan Andragogi. Pendekatan dan Metode Pembelajaran Tematik terpadu dalam kajian ilmu manajemen, *scientific learning, interactive learning, active learning, participatory learning, cooperative learning, inquiry, discovery, contextual learning, problem solving*. Adapun strategi pembelajaran antara lain; *brainstorming, chalk talk, poster comment/poster session, jigsaw, active debate, information search, homeproject, resitas*. Proses pembelajaran di atas didukung oleh media pembelajaran berbasis informasi, teknologi, dan komunikasi. Dosen menyusun Instrumen dan perangkat perkuliahan : mempersiapkan Silabus, SAP, Kontrak Perkuliahan dan bahan ajar di awal perkuliahan, Dosen menerapkan metode pembelajaran konstruktivisme, penggunaan media pembelajaran yang bervariasi, menjadikan mahasiswa lebih proaktif dan tidak pasif, menjadikan mahasiswa mempunyai tantangan untuk mengembangkan potensi kemampuannya, menjadikan mahasiswa lebih efisien dalam belajar, memberikan kemudahan mahasiswa untuk mendapatkan materi perkuliahan, memberikan wawasan global kepada mahasiswa atas setiap informasi, dosen mampu menggunakan evaluasi pembelajaran yang lebih tepat dalam menilai kompetensi lulusan. memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika.

Program dan kegiatan akademik dan non-akademik (di dalam maupun di luar kelas) untuk menciptakan suasana

akademik (seminar, simposium, lokakarya, bedah buku, penelitian bersama, pengenalan kehidupan kampus, dll.). Interaksi akademik antara dosen-mahasiswa, antar mahasiswa, serta antar dosen. Pengembangan perilaku kecendekiawanan. Mendorong dan memberi bimbingan mahasiswa dalam penulisan karya ilmiah dan program kreativitas mahasiswa. mendukung terselenggaranya suasana akademik yang kondusif bagi dosen maupun mahasiswa dalam melakukan proses kegiatan proses belajar/mengajar serta untuk mengadakan kegiatan-kegiatan ilmiah secara akademik. menciptakan interaksi mahasiswa dan dosen dalam usaha mempermudah proses belajar mengajar.

Dalam melaksanakan pengabdian masyarakat melakukan koordinasi yang bersifat vertikal maupun horizontal dengan lembaga intern Fakultas dalam hal ini pihak Bidang Akademik, maupun lembaga ekstern Fakultas Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM).

Program dan kegiatan di dalam dan di luar proses pembelajaran, yang dilaksanakan baik di dalam maupun di luar kelas, untuk menciptakan suasana akademik yang kondusif (misalnya seminar, simposium, lokakarya, bedah buku, penelitian bersama, pengenalan kehidupan kampus, dan temu dosen-mahasiswa-alumni).

Program dan Kegiatan di dalam proses pembelajaran. Dalam rangka menciptakan suasana akademik yang kondusif, Prodi PA/SAA Fakultas Ushuluddin menyelenggarakan beberapa program dan kegiatan yang dilakukan di dalam proses pembelajaran, meliputi:

- a. Program peningkatan kompetensi keagamaan, dilaksanakan melalui praktikum ibadah dan praktikum

qiraat yang dilaksanakan pada tahun pertama perkuliahan;

- b. Program peningkatan kompetensi IT, dilaksanakan melalui praktikum komputer yang dilaksanakan pada tahun kedua perkuliahan;
- c. Program peningkatan kompetensi keilmuan, dilaksanakan melalui praktikum mata kuliah inti pada tahun ketiga, ujian komprehensif setelah menyelesaikan seluruh mata kuliah, dan ujian munaqasyah setelah dinyatakan lulus semua mata kuliah dan lulus ujian komprehensif;
- d. Program peningkatan kompetensi kebahasaan, dilaksanakan melalui pelatihan TOEFL (*Test of English as Foreign Language*) dan pelatihan TOAFL (*Test of Arabic as Foreign Language*) pada tahun ketiga perkuliahan.
- e. Praktek Propepsi Mahasiswa (*Field Work Practice*) disiapkan untuk mahasiswa dengan bimbingan para dosen terkait didalam perkuliahan dengan terlebih dahulu diberikan fasilitas-fasilitas praktikum maupun penyediaan kemitraan praktikum.
- f. Penelitian Bersama Mahasiswa (*Joint Research*) yang bersifat inten civitas akademik, misalnya dari pemerintah maupun instansi-instansi lainnya. Senantiasa jika dianggap mampu dapat diikuti sertakan mahasiswa dengan arahan dari dosen untuk berperan aktif didalamnya.

Program dan Kegiatan di luar proses pembelajaran. Selain menyelenggarakan beberapa program dan kegiatan yang dilakukan di dalam proses pembelajaran seperti disebut di atas, masih dalam rangka menciptakan suasana akademik yang kondusif, Program Studi Perbandingan Agama Fakultas

Ushuluddin menyelenggarakan beberapa program dan kegiatan yang dilakukan di luar proses pembelajaran, meliputi:

- a. Program peningkatan kompetensi keilmuan, dilaksanakan secara tentatif melalui seminar, studium general, simposium, bedah buku, studi banding, dan penelitian;
- b. Program Peningkatan Kompetensi Profesi dilaksanakan melalui kegiatan Magang I, II, III
- c. Program peningkatan kompetensi sosial, dilaksanakan secara insidental melalui pertemuan alumni dan dosen.

2. Penilaian Pembelajaran

Setiap mata kuliah yang diajarkan senantiasa dilakukan penilaian oleh dosen yang mengajar mata kuliah tersebut. Penilaian dilakukan pada saat Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS). Masing-masing ujian tersebut dijadwalkan oleh Jurusan mengacu kepada kelender akademik dan diumumkan kepada mahasiswa sehingga mahasiswa dapat mempersiapkan dan merencanakan jadwalnya sendiri. Selesai ujian berlangsung oleh dosen dilakukan pembahasan soal-soal yang diujikan tersebut sehingga mahasiswa dapat mengetahui kesalahan serta jawaban yang benarnya. Mekanisme Penilaian perkuliahan menggunakan acuan sebagai berikut :

- a. Tugas Mandiri : Kehadiran, penugasan, dan antusias dalam mengikuti perkuliahan
- b. Tugas Terstruktur : Tugas pada setiap pertemuan/perkuliahan
- c. Ujian Tengah Semester: Test Tertulis

- d. Ujian Akhir Semester : Ujian Akhir Semester
 Pola penilaian meliputi:
- a. Penilaian produk: test, book report, dan makalah
 - b. Penilaian proses: non test, performance assesment pada pengalaman belajar/Portofolio, Jurnal, *Learning Log*, *Self Assesment*, *Peer Assesment*.

Sumber belajar dalam perkuliahan meliputi : buku paket, jurnal, artikel, website, Blog, e-journal. Sedangkan Indeks Prestasi mahasiswa (IP) mahasiswa yang dicapai juga menentukan jumlah SKS yang bisa diambil pada semester berikutnya. Kartu Hasil Studi (KHS) dibagikan kepada mahasiswa setiap semester.

NILAI ANGKA	NILAI HURUF	NILAI BOBOT	KETERANGAN
80 - 100	A	4.00	Sangat baik
70 - 79	B	3.00	Baik
60 - 69	C	2.00	Cukup
50 - 59	D	1.00	Tidak lulus
49 >	E	0.00	Tidak lulus

3. Dosen Tetap

a. Daftar dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang PS:

No.	Nama Dosen Tetap	NIDN**	Tgl. Lahir	Jabatan Akademik ***	Gelar Akademik	Pendidikan S1, S2, S3 dan Asal Universitas*	Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Prof.Dr.H.Dadang Kahmad,M.Si	2005105201	Garut, 05-10-1952	Guru Besar	Doktor	S1 IAIN SGD Bandung S2 Unpad S3Sosiologi Unpad Bandung	Sosiologi Agama

2	Prof. Dr. Abdul Rozak, M.Ag	2011065201	Brebes, 11-06-1952	Guru Besar	Doktor	S1 IAIN Syahida S2 IAIN Syahida S3Pemikiran Islam IAIN Jakarta	SPPI
3	Dr. Adeng Muchtar Ghozali, M.Ag	2007025901	Tasikmalaya, 07-02-1959	Lektor Kepala	Doktor	S1 IAIN SGD Bandung S2 IAIN SGD Bandung S3UIN SGD Bandung	Perbandingan Agama
4	Dr. H. Dody S. Truna, MA	2025056101	Bandung, 05-05-1961	Lektor Kepala	Doktor	S1 IAIN SGD Bandung S2 Kanada S3UIN SGD Bandung	Sosiologi Agama

5	Dr. Abdul Syukur, MA	2008066301	Majalengka, 08-06-1963	Lektor Kepala	Doktor	S1 IAIN Sgd Bandung S2 London S3 UI Depok	Buddhisme
6	Dra. Erni Isnaeniah, M.Si	2026066601	Cirebon, 26-06-1966	Lektor Kepala	Magister	S1 IAIN Sgd Bandung S2 Unpad Bandung	Sosiologi
7	Drs. Tatang Zakaria, M.Ag	2009094901	Bandung, 04-04-1957	Lektor Kepala	Magister	S1 IAIN SGDBDG S2 UIN SGD Bandung	Aliran Kebatinan
8	Drs. Asep Saeful Mimbar, M.Ag	2012056601	Bongas, 06-10-1966	Lektor Kepala	Magister	S1 IAIN SGD Bandung S2 Pemikiran Islam IAIN Bandung	Almodis

9	Dr. M. Yusuf Wibisono, M.Ag	2028086801	Malang, 22-08-1968	Lektor Kepala	Magister	S1 IAIN SGD Bandung S 2 IAIN SGDBandung S3 UIN SGD Bandung	Sosiologi Agama
10	Dr. Rifqi Rosyad, MA	2016106601	Bandung, 16-10-1966	Lektor Kepala	Magister	S1 IAIN SGD Bandung S 2Canbera Australia	Psikologi Agama
11	Dra.Hj. Yeni Huriani,M.Hum	2012016301	Majalengka, 12-01-1963	Lektor Kepala	Magister	S1 IAIN Sgd Bandung S 2 UI Depok	Orientalisme
12	Drs. Casram, M.Ag	2013076701	Indramayu, 13-07-1967	Lektor Kepala	Magister	S1 IAIN SGD Bandung S 2IAIN SGD Bandung	Fenomenologi Agama

13	Ahmad Soheh Mukarom, M.Ag	2016066201	Bandung, 16-06-1962	Lektor	Magister	S1 IAIN SGD Bandung S 2 UIN Bandung	Fenomenologi Agama
14	Gustiana Isya Marjani, Ph.D	2031087101	Bandung, 31-08-1971	Lektor	Doktor	S1 IAIN SGD Bandung S2 Jerman S3 Jerman	Perbandingan Agama
16	Dr. Deni Miharja, M.Ag	2025087701	Ciamis, 25-08-1977	Lektor	Magister	S1 IAIN SGD Bandung S 2 IAIN SGD Bandung S3 UIN SGD Bandung	Studi Masyarakat Lokal
17	Husnul Qodim, MA	2024027701	Jember, 24-02-1977	Lektor	Magister	S1 IAIN Suka Yogya S 2 UGM	Antropologi Agama

18	R. Roro Sri Rejeki Waluyajati, M.A	2019067901	Bandung, 19-06-1979	Asisten Ahli	Magister	S1 IAIN SGD Bandung S 2 UGM	Sosiologi Agama
19	Ilim Abdul Halim, MA	-	Bandung, 23-07-1970	Asisten Ahli	Magister	S1 IAIN SGD Bandung S 2 UGM	Metode Penelitian Agama

b. Data dosen tetap yang bidang keahliannya di luar bidang PS:

No.	Nama Dosen Tetap	NIDN**	Tgl. Lahir	Jabatan Akademik* **	Gelar Akademik	Pendidikan S1, S2, S3 dan Asal Universitas*	Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Dr. H. Undang Ahmad Kamaludin, M.Ag	202706550 1	Garut, 27-06-1955	Lektor Kepala	Doktor	S1 IAIN SGD Bandung S2 IAIN SGD Bandung S 3UIN SGD Bandung	Pengantar Ilmu Tafsir

2	Drs. Rd. Datoek A. Pachoer, M.M.Pd	200604520 1	Garut, 06-04-1952	Lektor Kepala	Magiste r	S1 IAIN SGD Bandung S 2 Pendidikan UNINUS Bandung	SPI
3	Drs. Tamami, M.Ag	201205660 1	Bogor, 12-05-1966	Lektor Kepala	Magiste r	S1 IAIN SGD Bandung S2Pemikiran Islam UIN Jakarta	Ilmu Tasawuf
4	Dr.H. Wawan Hernawan, M.Ag	200311700 1	Sumedang, 03-09-1974	Lektor Kepala	Magiste r	S1 IAIN Sgd Bandung S2 IAIN Padang	SPI

Tabel di atas menunjukkan hal-hal berikut. :

- a. Bahwa Jur/PS PA memiliki 22 dosen tetap. Dengan perincian 18 yang bidang keahliannya sesuai dengan PS dan 4 dosen yang bidang keahliannya tidak sesuai. Dari data tersebut 2

orang guru besar; 9 orang Doktor; dan 7 orang yang sedang menempuh S3. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 80 % dosen tetap PS yang bidang keahliannya sesuai dengan PS, serta semuanya berpendidikan minimal S2. Selanjutnya diharapkan bahwa pada tahun 2018 Jur/PS PA telah mempunyai sekitar 16 orang Doktor.

- b. Dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS berjumlah 15 orang (60%). Adapun Dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional berjumlah 22 orang (100%).

Rasio mahasiswa terhadap dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang PS adalah 22 : 148 (1:7 orang)

Adapun usaha yang telah dilakukan Program Studi dalam Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Tenaga Kependidikan

No.	Jenis Tenaga Kependidikan	Jenis kegiatan
(1)	(2)	(3)
1	Pustakawan	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan pelatihan mengenai manajemen pengelolaan perpustakaan yang profesional • Memberikan pelatihan cara penggunaan perpustakaan online • Pelatihan pengembangan jejaring perpustakaan
2	Laboran	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan penggunaan piranti Audio Visual • Pelatihan penggunaan piranti Laboratorium Bahasa • Pelatihan penggunaan <i>software</i> bahasa
3	Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Pengelolaan Website Fakultas Ushuluddin • Pelatihan pengelolaan Sistem Informasi Akademik (SIMAK) • Pelatihan Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED) • Pelatihan Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT)

Data prasarana yang lainnya, diantaranya; kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studio, ruang perpustakaan, kebun percobaan, dsb. kecuali ruang dosen yang dipergunakan PS dalam proses belajar mengajar dengan tabel sebagai berikut:

4. Sistem Penjaminan Mutu Akademik

Sistem penjaminan mutu meliputi kebijakan mutu, perangkat penjaminan mutu (organisasi, pernyataan mutu, kerangka mutu, standar mutu), pelaksanaan penjaminan mutu, serta monitoring dan evaluasi.

a. Kebijakan Mutu

UIN SGD Bandung berkomitmen memberikan pelayanan yang berfokus pada *stakeholders* melalui peningkatan mutu penyelenggaraan layanan (akademik dan kemahasiswaan) dengan mengacu pada tri dharma perguruan tinggi secara berkelanjutan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing tinggi dan *berahlakul karimah*.

b. Lembaga Penjaminan Mutu

Struktur Organisasi Penjaminan Mutu pada tingkat institusi di UIN SGD Bandung di bawah Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) yang bertanggungjawab langsung kepada Rektor, sedangkan pada tingkat Fakultas terdapat komite penjaminan mutu dan Jurusan/prodi terdapat gugus penjaminan mutu yang bertanggungjawab langsung kepada Dekan/Direktur Pascasarjana/Ketua Lembaga dan pada tingkat Jurusan/Prodi terdapat Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Jurusan/Prodi di bawah koordinasi Ketua Jurusan. Hirarki hubungan LPM, KPM dan GPM secara organisasi bersifat koordinatif dengan instruksional di bawah naungan LPM.

c. Dokumen Mutu

Dokumen mutu disusun dan dikendalikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), sehingga semua unit dari mulai tingkat institusi hingga ke tingkat yang paling bawah yaitu Jurusan/Prodi

dalam melaksanakan kegiatan akademik menggunakan standar dokumen yang sama. Semua dokumen disusun secara demokratis dan terukur, karena dalam perumusannya melibatkan semua perwakilan institusi hingga ke jurusan/prodi, sehingga dokumen sudah mengakomodir seluruh kebutuhan masing-masing unit sivitas akademik. Dokumen mutu disusun mengacu kepada visi dan misi UIN SGD Bandung serta kebutuhan *stakeholders* (BAN-PT, Standar ISO), mulai dokumen kebijakan mutu, sasaran dan rencana mutu, standar mutu, kerangka mutu, prosedur mutu, formulir mutu dan instruksi kerja.

d. Implementasi penjaminan mutu perguruan tinggi.

Pelaksanaan penjaminan mutu di UIN SGD Bandung dalam kerangka sistem penjaminan mutu perguruan tinggi yang berbasis pada sistem manajemen mutu internal dan kebijakan mutu Kementerian Agama RI (Diktis) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (Dikti). Mekanisme kerja penjaminan mutu diatur dalam proses bisnis yang terintegrasi mulai dari bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat serta kemahasiswaan.

Secara internal mekanisme kerja penjaminan mutu mulai dari institusi sampai dengan jurusan/prodi dalam kerangka sistem penjaminan mutu internal, dimana dalam pelaksanaannya semua unit harus memenuhi persyaratan sistem manajemen mutu yang ditandai dengan keberadaan dokumen kebijakan mutu, standar mutu, sasaran dan rencana mutu, manual mutu, prosedur mutu, formulir mutu dan instruksi kerja. Adapun untuk kerangka sistem penjaminan mutu eksternal, UIN SGD Bandung melaksanakan penjaminan mutu berdasarkan standar akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) baik pada tingkat Institusi maupun Jurusan/Prodi. Disamping itu dalam rangka

memastikan penjaminan mutu berjalan sesuai dengan visi dan misi UIN SGD Bandung, maka dalam siklus penjaminan mutu menggunakan acuan *Plan DO Check Action* (PDCA), siklus ini menjamin bahwa target kinerja mutu yang telah ditetapkan secara benar dan konsisten dilaksanakan oleh semua unit, dan dalam rangka semangat perbaikan berkelanjutan, maka dilaksanakan monitoring dan Audit Mutu Akademik Internal (AMAI).

Monitoring dilaksanakan secara berkelanjutan pada awal, pertengahan semester, dan akhir semester, sedangkan AMAI bidang akademik dilaksanakan satu kali di pertengahan tahun akademik. Adapun langkah terakhir dalam rangka perbaikan hasil AMAI, maka secara rutin UIN SGD Bandung melaksanakan rapat evaluasi manajemen untuk mengoptimalkan hasil AMAI dan merencanakan perbaikan berkelanjutan untuk tahun akademik selanjutnya mulai dari pimpinan tingkat Institusi sampai dengan pimpinan jurusan/prodi.

Pada saat awal implementasi penjaminan mutu terdapat banyak kendala yang dihadapi, antara lain: (a) komitmen pimpinan pada mutu yang masih rendah khususnya pimpinan ditingkat Unit, (b) kesadaran akan mutu yang belum ada, (c) sistem akademik yang antar unit (Fakultas/Jurusan/Prodi) mempunyai standar dan mekanisme kerja yang berbeda, (d) belum mempunyai dokumen mutu yang lengkap. Cara yang dilakukan UIN SGD Bandung, yaitu pada akhir tahun 2013 dibentuk Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai penguatan proses penjaminan mutu internal yang sebelumnya bernama Pusat Penjaminan Mutu (PPM), dengan kelembagaan yang lebih baik diharapkan mampu mengawal pelaksanaan penjaminan mutu di UIN SGD Bandung, Kemudian pada aspek komitmen perlu dikuatkan dengan deklarasi bersama semua pimpinan mulai dari Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Lembaga, Ketua

Bidang, Kepala Pusat, Kepala Biro, sampai dengan Ketua Jurusan/Prodi sebagai bentuk komitmen bersama dalam penjaminan mutu. Pada aspek dokumen mutu, semua dokumen dibuat dan dikendalikan oleh LPM jadi semua unit menerapkan dokumen mutu dengan standar yang sama mulai dari proses penerimaan mahasiswa baru sampai dengan wisuda (alumni) yang pada akhirnya sejak implementasi Sistem Manajemen Mutu, SPMI dilaksanakan melalui siklus penjaminan mutu yang berkelanjutan dengan pola *Plan* (Penetapan Standar Mutu), *Do* (Pelaksanaan Standar Mutu), *Check* (Pengendalian Standar Mutu), dan *Action* (Perbaikan Berkelanjutan).

1) Penetapan Standar Mutu

a) Penetapan Kebijakan Akademik

Sebagai institusi pendidikan tinggi yang berlandaskan nilai-nilai keislaman dan nilai-nilai akademik yang diaplikasikan dalam kegiatan sehari-hari, UIN SGD Bandung memiliki kebijakan akademik yang memuat bidang pendidikan, bidang penelitian dan bidang pengabdian masyarakat. Setiap bidang tersebut mengkaji tentang arah kebijakan, program, sumber daya, evaluasi program, dan kelembagaan terkait.

b) Penetapan Kebijakan Mutu

UIN SGD Bandung memiliki komitmen dalam memberikan pelayanan yang berfokus pada pelanggan melalui peningkatan mutu penyelenggaraan Tri dharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan untuk menghasilkan lulusan yang Unggul dan Kompetitif.

c) Penetapan Kerangka Mutu

Penetapan mutu merupakan bagian dari Sistem Manajemen Mutu yang berfungsi sebagai kerangka dasar dan acuan dalam penyusunan dan penerapan Sistem Pengendalian Mutu. Selain itu, Penetapan kerangka mutu juga berfungsi sebagai pedoman bagi

UIN SGD Bandung dalam menerapkan Sistem Manajemen Mutu. Terkait dengan pihak-pihak luar UIN SGD Bandung, kerangka mutu akan memberikan acuan dalam berinteraksi dengan *stakeholders* dalam melihat dan menilai kebijakan, komitmen serta sistem pengelolaan universitas yang diterapkan oleh UIN SGD Bandung.

d) Penetapan Prosedur Mutu

Prosedur Mutu (PM) atau *Standard Operating Procedures* disusun sebagai panduan dalam melaksanakan standar dan sasaran mutu. Beberapa Prosedur Mutu telah disusun Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) yang telah disusun sebagai berikut:

- a) Prosedur Mutu LPM
- b) Prosedur Mutu Akademik
- c) Prosedur Mutu Sarana Prasarana
- d) Prosedur Mutu Kepegawaian
- e) Prosedur Mutu Penelitian
- f) Prosedur Mutu Pengabdian pada Masyarakat
- g) Prosedur Mutu Perpustakaan
- h) Prosedur Mutu Laboratorium
- i) Prosedur Mutu Perencanaan

2) Pelaksanaan Standar Mutu

Pelaksanaan Penjaminan mutu internal di tingkat universitas, fakultas, jurusan/prodi dan unit-unit pelaksana lainnya dilakukan untuk menjamin: (1) Kepatuhan terhadap kebijakan mutu akademik, standar, dan sasaran mutu; (2) Kepastian bahwa lulusan memiliki kompetensi sesuai dengan yang ditetapkan disetiap jurusan/progam studi; (3) Kepastian bahwa setiap mahasiswa memiliki pengalaman belajar sesuai dengan spesifikasi jurusan/prodi; (4) Relevansi progam

pendidikan dan penelitian dengan tuntutan masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

3) **Penjaminan Mutu Internal**

Penjaminan Mutu Internal merupakan bagian dari tanggung jawab pimpinan universitas, pimpinan fakultas, pimpinan jurusan/bagian, pengelola jurusan/prodi serta dosen. Sistem penjaminan mutu di UIN SGD Bandung dirancang dan dilaksanakan untuk dapat menjamin mutu gelar akademik yang diberikan. Hal ini berarti bahwa sistem penjaminan mutu harus dapat menjamin bahwa lulusan akan memiliki kompetensi yang ditetapkan dalam spesifikasi jurusan/prodi.

5. **Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kurikulum**

a. **Monitoring dan Evaluasi Internal (Monevin)**

- 1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara kontinyu oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) tingkat universitas, komite penjaminan mutu pada tingkat fakultas dan gugus penjaminan mutu Jurusan/Prodi.
- 2) Ruang lingkup monitoring dan evaluasi terdiri monitoring dan evaluasi pelaksanaan prosedur mutu, pelaksanaan perkuliahan, pelaksanaan UTS/UAS, bimbingan Akademik, bimbingan skripsi, seminar, ujian komprehensif, sidang munaqosah (akhir), dan pelaksanaan wisuda.

b. **Audit Mutu Akademik Internal**

- 1) AMAI dilaksanakan secara berkala meliputi : Audit Kinerja Akademik dan Audit Kinerja Unit.
- 2) Audit Kinerja Akademik meliputi Audit jati diri visi misi Dosen dalam Pembelajaran, kurikulum, mahasiswa, penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat..
- 3) Audit Kinerja Unit meliputi Audit kinerja sasaran mutu layanan unit pelaksana akademik unit pendukung.

c. Audit Kinerja Akademik

- 1) Audit Kinerja dosen dalam pembelajaran: audit ini dilaksanakan setiap semester berdasar penilaian persepsional mahasiswa terhadap kinerja dosen melalui kuesioner yang dibagikan (sifat wajib).
- 2) Audit Kinerja sasaran mutu akademik dan pengukuran kepuasan mahasiswa dilaksanakan setahun sekali pada akhir semester genap (bulan November).
- 3) Audit Kinerja Unit dilaksanakan dalam rangka mengukur dan mengaudit ketercapaian sasaran mutu layanan masing-masing unit pelaksana akademik (Bagian akademik Fakultas dan Jurusan/Prodi) dan sasaran mutu layanan unit pendukung (bagian perlengkapan, bagian kepegawaain). Audit kinerja unit dilaksanakan setahun sekali diakhir tahun (november).

E. Pengembangan Mata Kuliah IPA Berbasis KKNi

Berdasarkan struktur KKNi dan Visi Misi yang diformulasikan oleh Jurusan Studi Agama-Agama (SAA) Fakultas Uhluddin UIN Bandung, setidaknya yang menjadi orientasi SAA adalah menyiapkan para lulusannya menjadi :

1. Calon akademisi di bidang studi agama;
2. Penggiat kerukunan hidup antar dan internal umat beragama; dan
3. Peneliti fenomena dan dinamika hidup beragama.

Dalam konteks itulah, mata kuliah Ilmu Perbandingan Agama (IPA) diorientasikan pada tiga hal di atas, melalui reformulasi materi dan metode ajar dalam proses pendidikan yang sedang berjalan. Menjadi akademisi, penggiat kerukunan, dan peneliti

fenomena kehidupan beragama merupakan karakteristik dasar yang melekat dalam ilmu perbandingan agama.

Ilmu perbandingan agama dibangun melalui tiga pendekatan dalam studi agama, yaitu:

1. Pendekatan filsafat : menguraikan tentang pemikiran dan kajian para filosof Yunani dan Rumawi klasik tentang 'kepercayaan' (agama) masyarakat Yunani dan Rumawi Kuno.
2. Pendekatan Teologis-Normatif : menguraikan tentang pemikiran para Penstudi Barat (Kristen) dan Timur pada Zaman Pertengahan.
3. Pendekatan Ilmiah : menguraikan tentang masa-masa awal studi agama menggunakan "scientific method".

Pendekatan ketiga (*scientific method*) menjadi salah satu ciri yang membedakan dengan disiplin filsafat dan teologi dalam menstudi agama. Namun, dalam kajiannya tidak berarti mengabaikan disiplin filsafat dan teologi. Penggunaan pendekatan "ilmiah" dalam menstudi agama didasakan atas upaya untuk merelevansikan doktrin-doktrin agama dengan perkembangan zaman, setidaknya memiliki tiga alasan, yaitu :

1. Kemajuan pesat ilmu pengetahuan, teknologi, dan pemikiran-pemikiran ilmiah mempengaruhi dinamika kehidupan beragama sehingga minat intelektual untuk mengkaji agama secara lebih mendalam menjadi sangat tinggi;
2. Kecenderungan untuk merekonstruksi agama dalam upaya mengembangkan pada semua urusan dunia; dan
3. Pengaruh-pengaruh sosial, politik, dan peristiwa-peristiwa internasional yang mempengaruhi agama-agama.

Dengan begitu, ilmu perbandingan agama akan terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan dinamika kehidupan

beragama. Sehingga dapat diperoleh manfaat dalam mempelajari ilmu perbandingan agama, yaitu :

1. dapat membawa kita memahami agama secara kritis, tidak *taklid* dan menerima begitu saja suatu ajaran atau doktrin.
2. dapat mengungkap suatu fenomena tentang keanekaragaman tafsir agama, konteks nilai yang diperjuangkan dan sejenisnya.
3. memahami kecenderungan perilaku umat dalam menafsirkan dan mempraktekkan (ajaran) keagamaan.
4. semakin banyak kajian-kajian akademis atas fenomena keagamaan dan disertai pula dengan publikasi yang meluas di tengah masyarakat maka akan mampu pula **mencerdaskan cara_beragama** masyarakat.

Di Indonesia, upaya di atas telah dirintis oleh A. Mukti Ali. Ilmu Perbandingan Agama, sebagai terjemahan dari *Comparative Study of Religion*, mulai diperkenalkan oleh Mukti Ali sekitar tahun 1960, terinspirasi oleh W.C. Smith untuk membuka kursus-kursus atau lembaga pendidikan yang mengajarkan “cara bertoleransi”. Maka pada tahun 1971 menjadi mata kuliah di IAIN Yogya dan Jakarta. Pada periode tahun 1971-1978, bersamaan dengan diangkatnya Mukti Ali menjadi Menteri Agama, semakin memperkokoh eksistensi IPA sebagai disiplin akademik untuk membangun kerukunan hidup antar umat beragama. Semakin menguatnya wacana dan faham fundamentalism, liberalism, dan pluralism di Indonesia, memberi tantangan tersendiri bagi para penstudi agama (IPA) dalam memberikan solusi akademik dan saran bagi para pemegang kebijakan dalam memelihara kerukunan beragama di Indonesia.

Pemerintah memiliki otoritas sekaligus tanggung jawab dalam mengembangkan pendidikan secara nasional. Salah satu unsur penting dalam proses pendidikan adalah ketersediaannya kurikulum. Tentu, fungsi kurikulum bukan hanya sekedar sekumpulan mata pelajaran yang disusun oleh pemerintah untuk diterapkan di sekolah-sekolah, baik mulai jenjang sekolah tingkat dasar, menengah, sampai perguruan tinggi. Jauh lebih penting dari itu bahwa kurikulum yang baik adalah yang memberi keleluasaan bagi penyelenggara pendidikan untuk menyusun, memodifikasi, dan mensinerjikan dengan dinamika perkembangan dan tuntutan lingkungan masyarakatnya. Dalam konteks ini, sekolah termasuk didalamnya perguruan tinggi memiliki wewenang penuh dalam mengimplementasikan kurikulum dalam proses belajar mengajar.

Sejak diberlakukan kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) melalui Perpres No.8 Tahun 2012 dan Permendiknas No.49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka setiap perguruan tinggi melakukan penyesuaian dalam pengembangan kurikulumnya. Setiap program studi pada masing-masing perguruan tinggi dituntut untuk melakukan perubahan orientasi dan kompetensi setiap mata kuliahnya. Namun demikian, salah satu unsur terpenting dalam penerapan Kurikulum Berbasis KKNI ini adalah kesiapan para dosen dalam menterjemahkannya dalam bentuk materi ajar (silabus) dan strategi yang diterapkan di dalam kelas. Pengembangan kurikulum dari kurikulum sebelumnya kemudian menggunakan basis KKNI, bukanlah perkara mudah. Ia bukan

hanya menyusun program mata kuliah, tetapi juga bahan ajar, respon manajemen PT, SDM (dosen), dan fasilitas lainnya sebagai pendukung terlaksananya kurikulum itu. Tentu, jangan sampai terulang pada kasus Kurtilas, yg diberlakukan secara sepihak (dari pemerintah), tanpa mengkaji beberapa aspek dan kesiapan sekolah. Dalam kurtilas lebih menitikberatkan pada praktek lapangan bukan hafalan, dan moral. Perubahan atau pun pengembangan kurikulum bias berhasil harus ditunjang pula oleh kesiapan guru, fasilitas sekolah, dan bahan ajar.

Sekarang, KKNI telah diluncurkan beberapa tahun kebelakang, permendiknas 49 yg merespon KKNI, muncul 2 tahun berikutnya. Berapa banyak PT (sivitas akedmika PT) memahami tentang KKNI, jangankan subtansi, singkatan KKNI sendiri banyak yang tidak tahu. Apalagi KKNI yang saya fahami a) penjenjangan kualifikasi kompetensi lulusan dengan struktur pekerjaan di berbagai sector. Tentu, tidak lagi hafalan tetapi praktek. Dalam kaitan dengan praktek-praktek mahasiswa yang selama ini dilakukan, tentu menuntut pula perubahan orientasi dan proses pembelajaran. Saya ga tahu kl di PTAIN lain ada praktek ibadah dan tilawah. Di bandung diterapkan dua praktek ini, tetapi justru tdk msk sks, sementara yg kompre (stgh jam selesai) memiliki bobot sks. Praktek ibadah diganti dg praktek penelitian standar, menengah sampe praktek lapangan pd smester 5 atau 6. KKN seharusnya ditangani lgs o;eh fak/prodi. Dg pertimbangan Tri darma yg mrpkn satu kesatuan dalm pencapaian pembelajaran, mk mengharuskan semua praktek dan KKN dikelola langsung oleh fak/jurusan; b) perwujudan mutu dan jati diri bangsa Ind terkait dg system pendidikan dan kualifikasi pekerjaan yg dimiliki Ind> tentu berkaitan dg kondisi real ideology yg dianut dan kondisi real masyarakat Indy g multi;c) penguasaan pengetahuan dan kemampuan manajerial; c) jenjang

kualifikasi adalah tingkat capaian pembelajaran yg tlh disepakati secara nasional. KKNI terdiri dari 9 jenjang kualifikasi, dan S1 msk pd jenjang 6 (teknisi/analisis).

Coba kita lihat kualifikasi level 6 : mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan iptek pd bidangnya dlm penyelesaian masalah dan memiliki kemampuan beradaptasi thd situasi yg dihadapi; menguasai konsep teoritis bidangnya, dan mampu memformulasikan penyelesaian masalah procedural; mampu mengambil keputusan yg tepat berdasarkan analisis informasi dan data, serta mampu member solusi. Level 6 diarahkan memiliki kemampuan penguasaan teori dan pemecahan masalah disertai solusi>tri dharma.

Bagi saya, tdk terburu-buru dulu menyusun kurikulum basis KKNI, jika pihak PT sendiri belm merumuskan arah baru/orientasi PT setelah KKNI> visi misi, tujuan, termasuk pencapaian belajar yg akan mnjd sasaran pembelajaran, lbh spesifik lg, untuk jurusan pea yg akan mengganti nomenklaturnya mnjdi SAA. Nomenklatur dlm suatu prodi bkn hanya mengganti nama, tetapi juga paradigm keilmuan dan pencapaian pembelajaran yang akan diperolehnya. Sayangnya, tingkat UIN, dan prodi2 blm prnah melakukan ini, kecuali hanya untuk memanfaatkan dana saja tanpa follow up.

Pencapaian belajar berdasarkan KKNI perlu dirumuskan terlebih dahulu, bagaimana dg Jakarta atau yogyakarta sendiri? Jika KKNI berorientasi pd pengetahuan, keterampilan, moral, dan in dg tuntutan masyarakat, maka Pea merumuskan dulu kualifikasi lulusan sebagai bagian dari pencapaian belajar. Misalnya, alumni pea dididik untuk 1) peneliti social keagamaan, yg hasilnya dapat dijadikan bahan atau kontribusi pd kebijakan makro maupun mikro pemerintahan maupun masyarakat; 2) penggiat kerukunan (melihat kenyataan bangsa Indonesia yang plural) dan atau

cendekiawan muslim yg berwawasan social kemasyarakatan, dll. Jika ini telah dirumuskan, maka baru dirumuskan penjabarannya pada kurikulum. Mungkin mata kuliah bisa tetap, tetapi, bahan ajar/silabi/sap berubah sesuai tingkat pengetahuan mahs per semester.

Sebagai peneliti sekaligus tenaga pengajar pada jurusan SAA, pernah menyampaikan tentang pengalaman melakukan orientasi penyajian mata kuliah, bahan ajar, dan metodologi mengajar pada kegiatan belajar mengajar. Pola resume, pembuatan paper, makalah, sampai kemampuan untuk membuat proposal penelitian, adalah langkah standar pencapaian pembelajaran/kelulusan mahasiswa selama maks 10 semester. Pembinaan/pelatihan dosen setiap semester dilakukan, senioritas dan junioritas dlm kepangkatan akademik perlu diperhatikan. Tidak untuk mengabaikan intelektualitas doctor muda yg mengajar baru 2 sampai 5 tahun, tentu dari sisi pengalaman akan jauh lebih menguasai yang bukan doctor. Mengajar itu butuh seni, metodologi, dan kedalaman wawasan karena sering komunikasi dengan mahasiswa, dan semuanya secara praktis diperoleh melalui pengalaman.

Untuk itu, perlu ada perubahan pola pikir dan pola belajar mengajar, baik bagi tenaga pengajar maupun peserta didik. Sharing pengetahuan, bersipat mandiri, terstruktur, dan praktek lebih diutamakan. Kurikulum fleksibel; otonomi PT, tetapi tetap mengacu pada SNPT (standar nasional pendidikan tinggi); dan pengawasan yang terletak pada penjaminan mutu internal perguruan tinggi. Maka, tugas prodi perlu memiliki pengawasan internal ini supaya tidak ewuh pakewuh dengan jabatan structural sebagai pengelola prodi.

Dalam konteks KKNI, mata kuliah ilmu perbandingan agama harus menyesuaikan dengan struktur isi dan orientasi KKNI, terutama pada Pasal 29 yang menyebutkan bahwa :

1. Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor.
2. Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.
3. Penetapan kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
4. Munculnya KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia-5Bab 11 Pasal))>Perpres 8 Thn 2012, menjadi acuan dalam proses pendidikan dan dunia kerja. Misalnya, dalam capaian pembelajaran, pengalaman kerja yang kesemuanya menentukan sertifikasi kompetensi kerja.
5. Dalam hubungannya dengan dunia pendidikan, KKNI (Bab I pasal 5) memiliki 9 jenjang kualifikasi : penyetaraan pencapaian pembelajaran 1-3>Lulusan SD, Menengah, dan Diploma 1 dg kualifikasi Operator; 4-6>Lulusan Diploma 2,3, dan 4/S1 dg kualifikasi Teknisi/Analisis; dan 7-9 Lulusan S2-S3 dg kualifikasi jabatan ahli. >>Menjadi inspirasi bahkan merubah visi dan, program, dan arah pencapaian PT, yang berdampak pula pada review kurikulum.
6. Karena seriusnya pencapaian pembelajaran dengan kualifikasi pekerjaan di masyarakat, maka, dlm Bab I pasal 4 ayat 1 dan 2 KKNI, capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan kerja dinyatakan dalam bentuk

sertifikat. Sertifikat itu berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.

Dalam Bab III pasal 9, ketentuan lebih lanjut tentang penerapan KKNI, dilakukan oleh menteri yang membidangi pendidikan dan tenaga kerja. >Maka lahir Permendiknas 49 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Setelah sepintas membaca Permendiknas, seharusnya penyelenggara pendidikan tinggi harus merespon dan menindaklanjuti. Sebab ada hal-hal mendasar yang berkaitan dengan proses pendidikan. Maka perlu mengambil beberapa poin penting :

1. Standar nasional pendidikan > criteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi, penelitian dan pengabdian.
2. Standar nasional tentang pendidikan, penelitian dan pengabdian merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari tri darma (psal 2). Artinya, semakin mempertegas tugas lembaga, dan dosen serta tenaga kependidikan.

Studi Agama-agama (SAA), istilah yang cukup populer akhir-akhir ini, setidaknya di lingkungan sivitas akademika UIN Bandung sejak Program Pascasarjana membuka Program Studi Religious Studies (RS). Sebenarnya, 13 tahun yang lalu di Fakultas Ushuluddin, SAA pernah diusulkan ke pihak Kementerian Agama untuk menjadi nama Jurusan Perbandingan Agama (PA). Hal ini dilakukan seiring dengan semakin merosotnya minat calon mahasiswa untuk masuk Jurusan PA. Karena pihak Kementerian Agama menolaknya, pada saat bersamaan kami (termasuk Pak Cik Hasan Bisri), membentuk Jurusan Antropologi dan Sosiologi Agama (ASA) untuk lebih memperkuat basis keilmuan Fakultas Ushuluddin, sekaligus menarik minat mahasiswa. Baik

antropologi maupun sosiologi, merupakan dua disiplin ilmu yang harus dikuasai dalam studi agama-agama.

Namun, saya tidak tahu persis apakah RS yang dimaksud oleh Program Pascasarjana adalah RS dalam konteks SAA yang selama ini dipelajari di Fakultas Ushuluddin sebagai Ilmu Perbandingan Agama atau SAA dalam perspektif lebih luas sebagaimana lazimnya sebutan *Islamic Studies*? Ketika saya ditugasi menjadi asisten Prof. Asep S. Muhtadi (Program S3/RS) dan Prof. Dadang Kahmad (Program S2), Program Studi RS tidak sepenuhnya menggambarkan Prodi PA. Untuk alasan inilah saya menambahkan “perspektif Ilmu Perbandingan Agama” dari tema asal yang diberikan pengelola Majelis Diskusi Malem Reboan. Sebagian besar isi tulisan dalam makalah ini diambil dari dua buku saya berjudul *Ilmu Perbandingan Agama* (untuk memperkenalkan metode dan pendekatan dalam studi agama), dan *Ilmu Studi Agama* (untuk memperkenalkan sekaligus mensosialisasikan nama Ilmu Perbandingan Agama sebagai Ilmu Studi Agama). Kedua buku tersebut diterbitkan oleh Pustaka Setia, Bandung, pada tahun 2005 dan 2006.

Teologi, Science of Religion, dan Studi Agama Dalam bahasa Inggris tiga disiplin di atas disebut dengan *Theology*, *Science of Religion* dan *Religious Studies*. Teologi telah lama menjadi kosakata yang cukup mapan dalam bahasa Indonesia, sedangkan “Studi Agama” mulai dipakai secara luas sebagai terjemahan dari istilah *Religious Studies*. Setidaknya sampai saat ini, kita masih sulit mencari terjemahan yang tepat untuk istilah *science of religion*.

Secara literal prasa tersebut dapat diterjemahkan dengan istilah Ilmu Agama. Tapi ilmu agama didalam bahasa Indonesia telah dipakai atau cenderung dipakai sebagai terjemahan yang maknanya dekat dengan ahli teologi. Oleh karenanya dalam tulisan ini *Science of Religion* sengaja tidak diterjemahkan. Istilah *Religious Studies* dan Studi Agama sama-sama

dipakai secara tukar-menukar untuk pengertian yang sama. Studi Agama yang dimaksud dalam tulisan ini adalah Religious Studies sebagai sebuah disiplin. Pada tingkat ini ada tumpang tindih, kadangkala sulit dibedakan, antara istilah Religious Studies dan Study of Religion.

Disiplin ilmu yang memberikan perhatian lebih pada aspek agama tersebut kemudian dibangun dengan label Religionswissenschaft (Smith 2000,73-74). Religionswissenschaft ini pada gilirannya menjadi disiplin ilmu yang kemudian secara luas dalam bahasa Inggris disebut sebagai Science of Religion. Sampai di sini Science of Religion berada dalam posisi yang berbeda secara diametral dengan teologi. Penyederhanaan yang mungkin dapat dikemukakan adalah bahwa di tengah-tengah atau di antara Science of Religion dan Theology terdapat Religious Studies. Awalnya, Religious Studies lahir dari rahim teologi, melalui disiplin Ilmu Perbandingan Agama (Comparative Religions).

Ada empat karakter “studi agama ilmiah” yang dibangun oleh Ninian Smart (2000, 148-149) yang menurut hemat penulis dapat dipinjam untuk mendeskripsikan karakter Religious Studies.

Pertama, dalam Religious Studies agama bersipat aspektual atau menjadi aspek studi. Dengan bahasa lain, objek materi dari Studi Agama adalah agama. tidak berarti Studi Agama kehilangan objek studinya. Bagi Smith, “tidak ada” agama di luar konstruksi akademis di kalangan para sarjana, sebuah paradigma baru yang mengkritik para sarjana lain, terutama dari kalangan Science of Religion yang menempatkan agama dalam kategori esensial atau sui generis

Dalam Studi Agama, sikap atau reaksi religius seseorang atau kelompok sosial yang diangkat sebagai objek studi setara sebagaimana juga dalam disiplin ilmu lain. Misalnya ilmu ekonomi yang menjadikan perilaku ekonomi manusia menjadi objek studi ekonomi. Sampai di sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa objek material studi agama adalah aspek agama dari diri manusia atau masyarakat.

Sebagaimana juga objek material ilmu politik adalah aspek politik dan objek material dari ilmu ekonomi adalah aspek ekonomi dari diri manusia atau masyarakat.

Kedua, poin pertama di atas bisa menjebak, sekali lagi apabila agama dipahami dalam kategori yang sui generis (esensialis). Oleh karena itu penting ditegaskan lagi dalam poin kedua ini, yaitu definisi agama yang menjadi objek studi Religious Studies adalah tanpa batas yang tegas.

Ketiga, adalah polimetodis (beragam pendekatan). Artinya, berbagai metode atau pendekatan dari disiplin lain dapat dikerahkan dalam studi agama. Dalam Studi Agama kita dapat menggunakan metode atau pendekatan dari disiplin lain seperti sejarah, sosiologi, etnografi, fenomenologi, dan lain-lain.

Keempat, adalah pluralistic. Karena ada banyak agama atau tradisi keagamaan maka studi agama tidak pernah menaruh perhatian sepenuhnya pada satu agama atau tradisi keagamaan tertentu yang immune dari agama atau tradisi keagamaan lain. Sarjana studi agama selalu memiliki ketertarikan langsung pada kajian komparatif antar agama/tradisi, maupun tidak langsung dengan mengaitkan kajiannya mengenai suatu agama atau tradisi agama dengan konteks keragaman di sekelilingnya.

Konsep religious studies di atas penting untuk menjadi pertimbangan arah pengembangan religious studies di Indonesia. Praktik dari engagement disiplin ilmu seperti itu sebenarnya sama sekali bukan hal asing bagi para sarjana di Indonesia.

Dalam mengembangkan Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia, posisi Mukti Ali. Sepanjang karir akademiknya, Mukti Ali mengembangkan engagement ilmu perbandingan agama dalam dua bidang: dialog dan kerukunan. Saya sengaja membedakan dua istilah tersebut untuk memberikan tekanan yang berbeda. Dialog beradadalam arena sosial-keagamaan dan kerukunan dalam arena politik. Mukti Ali mengartikan dialog tidak dalam pengertian cara atau metode yang dilakukan oleh dua (atau lebih) pihak

dalam mengkomunikasikan perbedaan sebagaimana belakangan banyak dipahami orang. Pengertian ini dapat terjebak pada penekanan pertemuan dan selebrasi. Ali (1988, 8) merunut konsep dialog lebih ke “dialogos” (“dialeghē”) yang berarti “sedang berbicara, sedang berdiskusi, sedang beralasan mengenai seluruh aspek persoalan, karenanya saling mengoreksi dan bergerak bersama-sama dalam menyelesaikan masalah baru”. Di sini Ali ingin meletakkan masalah sebagai dasar titik berangkat dialog (problem based dialogue). Lebih lanjut Ali menyatakan kata yang sepadan untuk dialog adalah ‘concourse’ yang berarti “berlari bersama, bergerak bersama, bergerak maju bersama, bukan hanya berbicara satu dengan yang lain”. Sampai di sini karakter ilmu perbandingan agama yang dikembangkan Mukti Ali sedari awal memiliki peran engagement yang kuat. Dalam aspek politik-keagamaan, Mukti Ali menawarkan konsep “kerukunan agama” yang perannya sangat sentral dalam Ilmu Perbandingan Agama. Meskipun konsep ini cukup berhasil membantu dalam menyelesaikan persoalan relasi Islam dan Negara, maupun antar beberapa kelompok agama-agama besar di Indonesia, namun bias paradigma Islam dan agama-agama besar dunia sangat menonjol. Sehingga kerukunan agama yang dimaksudkan selalu dalam bingkai menguntungkan agama-agama besar dunia di Indonesia dan meminggirkan agama-agama lokal. Keterlibatan Mukti Ali dalam eksperimen politik “kerukunan agama” pada satu sisi mendapat kritik dari B.J. Boland seperti disebut di atas. Namun apresiasi muncul dari sarjana lain seperti Herman Beck (2002) yang menulis tentang “A Pillar of Social Harmony: The Study of Comparative Religion in Contemporary Indonesia”. Model engagement dari paradigma dan gagasan Ilmu Perbandingan Agama yang dikembangkan oleh Mukti Ali dapat dikritik, namun apa yang penulis ingin tekankan di sini adalah lebih pada karakternya yang tidak bebas nilai atau “netral”. Pada sisi ini penulis sangat mengapresiasi posisi Mukti Ali. Munculnya disiplin religious studies lebih dari satu

dekade belakangan ini di Indonesia juga tidak dapat dilepaskan dari karakter engagement yang kuat. Namun karakter dari Ilmu Perbandingan Agama ala Mukti Ali menempatkan keberpihakan pada suatu agama tertentu. Sementara seharusnya keberpihakannya beyond agama atau cara berpikir dari rumpun agama tertentu (seperti rumpun agama Abrahamik). Untuk menghindari keterjebakan istilah, tulisan ini lebih memilih menggunakan istilah terlibat (engagement) daripada berpihak.

F. Formulasi Materi Ajar IPA

Dinamika kepegangan agama selalu beriringan dengan kondisi social kultural masyarakat. Kurikulum, sebagai salah satu bagian dari inti penting proses pendidikan, menuntut materi dan metode ajar untuk menyesuaikan diri dengan dinamika hidup beragama dimana proses pendidikan itu berlangsung.

Penyajian mata kuliah Pendidikan Kerukunan Beragama bagi para mahasiswa di lingkungan jurusan SAA memiliki tujuan umum dan khusus. Tujuan pembelajaran umum, yaitu :

1. Memberikan pengetahuan dan wawasan kepada para mahasiswa, bahwa setiap agama, khususnya Islam, memiliki dasar-dasar teologis tentang keharusan hidup rukun dan damai diantara para pemeluk agama dan faham keagamaan yang berbeda;
2. Memberikan pengetahuan dan wawasan kepada para mahasiswa tentang bagaimana etika dan norma dalam pergaulan hidup antar umat beragama dan faham keagamaan yang berbeda; dan
3. Memberikan pengetahuan dan wawasan tentang kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan pemikiran-pemikiran ilmiah dapat mempengaruhi dinamika kehidupan beragama.

Adapun tujuan pembelajaran khusus diantaranya :

1. Dapat memunculkan kesadaran beragama melalui pemahaman dan pengamalan agamanya, sehingga berdampak terhadap pergaulan hidup antar umat beragama dan faham keagamaan yang berbeda;
2. Dapat membawa pemahaman agama secara kritis, tidak taklid dan menerima begitu saja suatu ajaran atau doktrin.
3. Dapat mengungkap suatu fenomena tentang keanekaragaman tafsir agama, konteks nilai yang diperjuangkan dan sejenisnya;
4. Dapat memahami kecenderungan perilaku umat dalam menafsirkan dan mempraktekkan (ajaran) keagamaan;
5. Dapat memunculkan kesadaran intelektual, bahwa semakin banyak kajian-kajian akademis atas fenomena keagamaan dan disertai pula dengan publikasi yang meluas di tengah masyarakat maka akan mampu pula mencerdaskan cara beragama masyarakat.

1. Dasar Filosofis dan Standar Kompetensi

Standar kompetensi berkaitan dengan indikator keberhasilan. Oleh karena itu, setelah mempelajari materi pokok tentang materi IPA, mahasiswa dapat menjelaskan tentang materi pokok IPA. Beberapa pokok pikiran, masalah, dan solusi berkaitan dengan realitas kehidupan beragama di Indonesia dalam hubungannya dengan proses pendidikan Islam di Indonesia, serta atas dasar analisis materi ajar IPA memberi ruang untuk memasukkan gagasan berupa betapa pentingnya para mahasiswa lebih mengetahui, memahami, dan menyadari adanya doktrin Islam untuk hidup rukun, saling menghormati, menghargai, dan kesiapan menerima perbedaan dalam pergaulan hidup sesama manusia beragama. Memberikan pengetahuan dan membiasakan

hidup rukun ini, baik berbeda pemahaman di lingkungan internal maupun perbedaan keyakinan secara eksternal, bahkan mesti dilakukan melalui proses pendidikan sejak dini. Muhammad Maftuh Basyuni, mantan Menag RI menekankan pentingnya pendidikan agama pada usia dini sehingga akan melahirkan kerukunan antara umat beragama yang kuat. Ia menyatakan, bahwa "saya tidak yakin, jika seseorang memperoleh pemahaman agama dengan benar akan melahirkan fanatisme".¹⁶ Karena pentingnya pendidikan kerukunan ini, maka diperlukan rumusan tentang penambahan jam pelajaran agama dengan menitikberatkan silabus bermaterikan penunjang kesadaran beragama di tengah kemajemukan. Oleh karena itu, kerukunan hidup umat beragama perlu dimantapkan melalui lembaga pendidikan mulai tingkat SD hingga SLTA, karena merupakan sarana utama dalam memberikan pemahaman tentang keberagamaan sejak dini pada siswa.

Setidaknya, ada tiga sasaran prioritas dalam pemantapan kerukunan beragama di lembaga pendidikan, yakni dosen, mahasiswa dan kurikulum pendidikan. Ketiga sasaran ini merupakan keterpanduan yang masing-masing memiliki sinergi dalam menata dan menumbuhkan kerukunan hidup beragama.

Salah satu focus kajian IPA dalam konteks KKNi adalah kerukunan umat beragama, yang diharapkan dari proses pendidikan ini memperoleh 3 hal, yaitu : (1) kesadaran dalam beragama yang dapat membentuk sikap dan perilaku hidup rukun dan damai; (2) mengarahkan untuk bersifat inklusif, artinya adanya suatu kemajemukan (pluralitas) dalam kehidupan beragama di Indonesia; dan (3) pemantapan kerukunan beragama dipandang perlu melalui eksistensi kurikulum yang berbasis

¹⁶ Disampaikan dalam sambutan dihadapan jajaran Kanwil Depag Propinsi Kepri di Tanjungpinang, padahari Rabu tanggal (3/6)

kompetensi dalam rangka menunjang aspek moralitas dan akhlak serta menambah wawasan siswa dalam kehidupan beragama.

Mengembangkan mata kuliah IPA berwawasan kerukunan hidup umat beragama menunjukkan bahwa pendidikan agama Islam senantiasa beradaptasi dengan lingkungan masyarakat dan berorientasi ke depan. Karena memang praktek pendidikan harus sesuai dengan perkembangan masyarakat, teori-teori pendidikan harus bersumber dari suatu pandangan hidup masyarakat yang bersangkutan. Sebagai sebuah proses, maka pendidikan merupakan upaya sadar untuk mengembangkan pada diri seseorang tiga aspek dalam kehidupannya, yakni pandangan hidup, sikap hidup dan keterampilan hidup. Upaya untuk mengembangkan ketiga aspek tersebut bisa dilaksanakan di sekolah/kampus, luar sekolah/kampus dan keluarga

Pemahaman yang baik dan benar terhadap agama, nilai-nilai yang dianutnya, cara hidup beragama, sikap terhadap agama lain, dan memperkenalkan persamaan nilai-nilai dalam setiap agama menjadi sangat penting dalam rangka membina dan menghidupi kerukunan hidup umat beragama. Memperkenalkan agama dan nilai-nilai agama kepada anak tentu membutuhkan cara tersendiri sesuai dengan usia mereka. Dengan demikian, betapa pentingnya pendidikan agama Islam berwawasan kerukunan hidup umat beragama, jika dilihat setidaknya melalui tiga alasan yaitu : (1) bahwa Islam mengajarkan menghormati dan mengakui keberadaan orang lain; (2) konsep persaudaraan Islam tidak hanya terbatas pada satu sekte atau golongan saja; dan (3) dalam pandangan Islam bahwa nilai tertinggi seorang hamba adalah terletak pada integralitas taqwa dan kedekatannya dengan Tuhan. Sejalan dengan kondisi di atas, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bahwa “gangguan keamanan yang disebabkan oleh terorisme, konflik horizontal, dan gerakan

radikalisasi bermotifkan agama telah menjadi ancaman serius. Untuk itu, masyarakat diajak bertanggung jawab untuk menyelamatkan karakter bangsa terutama generasi muda".¹⁷ Oleh karena itu, Menteri Pendidikan Nasional, Muhammad Nuh, berencana meninjau ulang kurikulum pendidikan dan pengajaran terutama mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN), Bahasa Indonesia, Sejarah, dan Agama. Beberapa mata pelajaran ini untuk memperkuat keempat pilar bangsa, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sejalan dengan kenyataan di atas, maka diperlukan peran mata kuliah Ilmu Perbandingan Agama di kampus-kampus dalam upaya merespon perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat yang multikultural dan multi agama. Agar berhasil, diperlukan substansi materi ajar IPA yang terpadu, yaitu keterpaduan tujuan, keterpaduan materi, keterpaduan proses. Keterpaduan tujuan berarti pencapaian tujuan pendidikan merupakan tanggung jawab semua pemangku kepentingan (stakeholders) pendidikan, yaitu pemerintah, kepala sekolah dan kampus, guru/dosen, orang tua mahasiswa, dan masyarakat. Sedangkan keterpaduan materi ialah keterpaduan isi kurikulum yang digunakan atau materi pelajaran. Semua materi pelajaran yang dipelajari mahasiswa hendaknya saling memiliki keterkaitan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya. Keterpaduan tersebut diarahkan selaras dengan tujuan pendidikan, keimanan dan ketakwaan, manusia toleran, terbuka dan saling menghargai.

¹⁷ Pikiran Rakyat

2. Kurikulum

Kurikulum merupakan salah satu faktor dalam proses pendidikan yang berperan seperti perangkat lunak dari proses tersebut. Kurikulum mempunyai peranan sentral karena menjadi arah atau titik pusat dari proses pendidikan. Kurikulum ini harus dilaksanakan berdasarkan konsep pengembangan ilmu pengetahuan, pengalaman, ketrampilan, sikap, dan nilai moral tauhid sehingga visi dan misi kurikulum yang dikembangkan dapat membentuk pribadi muslim yang kuat dalam posisi temporal dan spiritualnya.¹⁸

Kurikulum diterjemahkan menjadi program pembelajaran suatu mata pelajaran, langkah yang harus dilakukan adalah : pertama, memilih materi ajar yang paling relevan. Hal ini berkaitan dengan tujuan kurikulum, yaitu rumusan tentang kemampuan, pengetahuan, dan sikap yang dikuasai melalui proses mempelajari suatu mata pelajaran. Tahap kedua, memilih pokok-pokok bahasan yang paling relevan untuk dijadikan obyek belajar bagi tercapainya tujuan kurikulum.[9] Berkaitan dengan ini, maka ada tiga jenis relevansi, yaitu relevansi epistemologi, relevansi psikologis, dan relevansi sosial dan moral.

Relevansi epistemologi berkaitan dengan kesesuaian suatu proses pembelajaran yang memungkinkan berkembangnya kemampuan melakukan penelitian atau kajian, menguasai cara untuk mengetahui. Sedangkan relevansi psikologis terkait dengan kesesuaian suatu proses pembelajaran yang memungkinkan berkembangnya kemampuan memecahkan masalah. Sementara relevansi sosial dan moral terkait dengan proses dan suasana pembelajaran yang dapat mengembangkan dan menanamkan sikap dan nilai yang sesuai dengan harapan masyarakat. Oleh

¹⁸ Mukhtar, Desain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, CV. Misaka Gazila, Jakarta, 2003, cet. II, hlm.30.

karena itu, kurikulum IPA harus diorientasikan pada : (1) pelestarian nilai; (2) mahasiswa; (3) masa depan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (4) tuntutan sosial; (5) tenaga kerja; dan (6) berorientasi pada penciptaan lapangan kerja.¹⁹ Dalam hubungannya dengan orientasi dan materi ajar IPA, maka pendekatan yang dilakukan adalah : (1) pengalaman; (2) pembiasaan; (3) emosional; (4) rasional; (5) fungsional; (6) keteladanan; dan (7) terpadu.[12] Dengan demikian, penyajian materi IPA memiliki kompetensi untuk menjadi bagian tak terpisahkan (integrated) dari materi kerukunan hidup umat beragama.

Dalam konteks pembelajaran, beberapa prinsip di bawah ini dapat dijadikan panduan dalam proses belajar mengajar mata kuliah IPA, yaitu :

- a. Dalam proses mengajar dan belajar para mahasiswa didorong untuk memahami arti pelajaran yang mereka pelajari.
- b. Memunculkan kreativitas para mahasiswa untuk menjadikan nilai-nilai atau ide yang mereka pelajari menjadi milik mereka sendiri dan harus mengerti penerapannya dalam situasi kehidupan nyata pada saat yang sama.
- c. Memotivasi minat belajar para mahasiswa dengan cara mengajak para mahasiswa untuk membuat hubungan-hubungan yang mengungkapkan makna.
- d. Dalam proses belajar diupayakan untuk mengembangkan kemampuan akademik para mahasiswa sebagai motivasi untuk bisa menerapkan pemahaman serta kemampuan akademiknya dalam berbagai variasi konteks, baik di dalam maupun luar kelas, dengan cara disimulasikan baik secara sendiri-sendiri maupun berkelompok.
- e. Aktivitas yang diciptakan dalam pengajaran kontekstual

¹⁹ Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, Kalam Mulia, Jakarta, 2006, hal. 166-168

memuat strategi untuk membantu mahasiswa memiliki peran dan tanggung jawab, baik sebagai anggota keluarga, warga negara, maupun sebagai mahasiswa.

Proses belajar yang diciptakan seperti di atas secara umum memiliki ciri : (1) berbasis masalah; (2) self-regulated; (3) muncul dalam berbagai variasi konteks yang meliputi masyarakat dan tempat kerja; (4) melibatkan kelompok belajar; dan (5) responsif terhadap perbedaan kebutuhan serta minat mahasiswa.

3. Materi Pokok/Fokus Kajian

Di bawah ini beberapa poin penting yang menjadi focus utama materi ajar IPA :

a. Agama dan Keragaman

Tiga dimensi utama dalam beragama, yaitu doktrin, penyikapan (pemahaman), dan pelaksanaan terhadap doktrin itu. Dari ketiga dimensi ini, maka istilah 'agama' (religion) dan 'keberagamaan' (religiosity) dibedakan, sebagaimana telah diungkapkan dalam latarbelakang masalah sebelumnya. Ruang untuk berbeda keyakinan dan pemahaman berada pada tiga dimensi tadi. Oleh karena itu, berbagai pandangan dan teori dalam mempelajari dan memahami keragaman dalam beragama itu banyak ditemukan.

Setidaknya, ada tiga pendekatan yang sering digunakan, yaitu pendekatan teologis, politis, dan sosial kultural. Untuk pendekatan kedua dan ketiga, biasanya dikelompokkan pada pendekatan teoritis. Pendekatan teologis tiada lain adalah mengkaji hubungan antar agama berdasarkan sudut pandang ajaran agamanya masing-masing. Bagaimana doktrin-doktrin agama "menyikapi" dan "berbicara" tentang agamanya dan agama orang lain. Sedangkan pendekatan teoritis melalui analisis politis dilihat dalam konteks "kerukunan" dengan maksud untuk melihat,

bagaimana masing-masing (penganut) agama memelihara ketertiban, kerukunan dan stabilitas suatu masyarakat yang multi agama. Sedangkan pendekatan kultur atau budaya adalah untuk melihat dan memahami karakteristik suatu masyarakat yang lebih menitikberatkan pada aspek tradisi yang berkembang dan mapan, dimana agama dihormati sebagai sesuatu yang luhur dan sakral yang dimiliki oleh setiap manusia atau masyarakat. Tradisi “rukun”, menjadi simbol dan sekaligus sebagai karakteristik sebuah masyarakat yang telah berjalan sejak lama dan turun temurun. Konsep “kerukunan hidup antarumat beragama”, misalnya, bisa dianalisis melalui pendekatan politis maupun kultural. Konsep itu, lebih menitikberatkan pada muatan politis dan kulturalnya ketimbang teologis, karena agama begitu nyata terlibat dalam dunia manusia yang tidak lepas dari kecenderungan politis dan kulturalnya. [7]

Melalui kajian teologis, kita bisa memahami teks-teks masing-masing agama berkenaan dengan penyikapan agamanya dengan agama orang lain. Oleh karena itu, buku-buku yang di tulis oleh para ulama dan cendekiawan agama berkenaan dengan penyikapan agama masing-masing itu, sangat membantu dalam memahami doktrin-doktrin agama berkenaan dengan hubungan antar agama. Apakah aspek ekonomi, politik, sosial budaya, dan lain sebagainya. Sedangkan, dari pandangan politis, dapat melihat dari ideologi sebuah masyarakat atau negara yang dimilikinya. Ideologi ini sangat mempengaruhi terhadap hubungan masing-masing agama. Pada sebuah negara yang bertipe “demokratis” (umumnya di Barat), misalnya, maka hubungan antar agama akan bersipat demokratis pula, tetapi lebih memiliki kecenderungan bahwa agama itu hanya milik individu dan bersipat internal. Sebaliknya, pada sebuah masyarakat yang tidak atau semi demokratis (umumnya di Timur), cenderung sosok agama bersipat

eksklusif, masing-masing umat beragama ingin menampakkan dan menonjolkan agamanya sebagai satu-satunya sumber semua aspek kehidupan manusia, tetapi sulit diwujudkan dalam praktek-praktek berbangsa dan bernegara, karena berbenturan dengan agama-agama lain dan tradisi atau budaya lainnya yang telah berkembang cukup lama.[8]

Banyak teori yang telah diajukan oleh para agamawan (juga cendekiawan) di Indonesia berkaitan dengan toleransi beragama, tetapi bila disederhanakan meliputi dua hal, yaitu (1) dari sisi 'konsep kerukunan', yakni pemaparan teologis masing-masing doktrin agama; dan (2) pada aspek 'dialog' antar cendekiawan yang diwujudkan dalam bentuk hubungan antar lembaga formal. Tetapi, hubungan antar lembaga formal ini baru bersipat seremonial, belum pada tataran konsepsional. Munculnya "orde reformasi", menampakkan kelemahan pada konsep kerukunan umat beragama yang sudah di buat dan dipublikasikan. Ternyata, konsep itu bisa berjalan lebih bersipat pendekatan "keamanan" dibandingkan "kesadaran". Maka, secara praktis, dialog keagamaan harus berangkat dari kesadaran beragama. Sebab, kesadaran beragama lahir dari pengetahuan dan pengalaman beragama.

Dalam pendekatan teologis, nampaknya tidak bisa dipungkiri dan sudah menjadi pengetahuan umum bahwa setiap agama memiliki kebenaran. Keyakinan tentang yang benar itu didasarkan kepada Tuhan sebagai satu-satunya sumber kebenaran. Dalam tataran sosiologis, klaim kebenaran berubah menjadi simbol agama yang dipahami secara subyektif oleh setiap pemeluk agama. Ia tidak lagi utuh dan absolut.

Pluralitas manusia menyebabkan wajah kebenaran itu tampil beda ketika akan dimaknai dan dibahasakan. Sebab keperbedaan ini tidak dapat dilepaskan begitu saja dari berbagai referensi dan

latar belakang yang diambil peyakin – dari konsepsi ideal turun ke bentuk-bentuk normatif yang bersipat kultural. Dan ini yang biasanya di gugat oleh berbagai gerakan keagamaan (harakah) pada umumnya. Sebab mereka mengklaim telah memahami, memiliki, dan bahkan menjalankan secara murni dan konsekuen nilai-nilai suci itu. Keyakinan ini menjadi legitimasi dari semua perilaku pemaksaan konsep-konsep gerakannya kepada manusia lain yang berbeda keyakinan dan pemahaman dengan mereka. Armahedi Mahzar berpendapat bahwa absolutisme, eksklusivisme, fanatisme, ekstrimisme, dan agresivisme adalah “penyakit” yang biasanya menghinggapi aktifis gerakan keagamaan. Absolutisme adalah kesombongan intelektual; eksklusivisme adalah kesombongan sosial; fanatisme adalah kesombongan emosional; ekstremisme adalah berlebih-lebihan dalam bersikap; dan agresivisme adalah berlebih-lebihan dalam melakukan tindakan fisik. Tiga penyakit pertama adalah wakil resmi kesombongan (‘ujub). Dua penyakit terakhir adalah wakil resmi sipat berlebih-lebihan.[9]

b. Toleransi dan Dialog Keagamaan

Materi ajar ini memfokuskan pada kenyataan teologis, sosiologis dan kultural masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk mengajarkan para mahasiswa tentang cara bersikap dan berinteraksi dengan lingkungan masyarakat yang beragam, baik keragaman keyakinan agama, suku, dan kepercayaan lainnya. Toleransi dan dialog merupakan dua hal penting sebagai bekal pergaulan di lingkungan masyarakat plural.

Dialog berasal dari kata Yunani “dialogos”, artinya “bicara antara dua pihak, atau dwiwicara”. Dialog merupakan percakapan antara dua orang (atau lebih) dalam mana diadakan pertukaran nilai yang dimiliki masing-masing pihak. Dialog dapat juga

diartikan sebagai “pergaulan antara pribadi-pribadi yang saling memberikan diri dan berusaha mengenal pihak lain sebagaimana adanya.” Dari pengertian ini, secara sosiologis maupun psikologis, dialog merupakan kebutuhan hakiki. Manusia membutuhkan dialog, membuka diri kepada orang lain, dengan mendasari pada prinsip-prinsip : (a) keterbukaan terhadap pihak lain; (b) kerelaan berbicara dan memberikan tanggapan kepada pihak lain; dan (c) saling percaya bahwa kedua belah pihak memberikan informasi yang benar dengan caranya sendiri.²⁰

Dalam pengamatan Einar Sitompul, sadar atau tidak, setiap umat beragama hidup dan berkembang dalam isolasi – terpisah dari penganut agama lain baik secara geografi maupun sosial, yakni ketika dua atau lebih umat beragama hidup di tempat yang sama. Sedikit ada kontak yang disengaja dengan penganut lain. Hidup yang terpisah secara geografi dan sosial membuat perasaan superior semakin lama semakin kuat. Sekalipun penganut agama lain diakui ada dan berkembang, namun hampir setiap umat menganggap dirinyalah yang terbaik dan mempunyai ajaran paling benar. Pada saat yang bersamaan, berbicara atau berdialog di dalam hal-hal yang konkrit, umpamanya tentang perdagangan, ekonomi atau politik orang dapat bersikap objektif, lugas dan rasional, tetapi di dalam bidang agama dikhawatirkan emosi yang akan muncul, sehingga bukan saling pengertian yang diperoleh melainkan kebencian.²¹

Dialog selalu bermakna menemukan bahasa yang sama, tapi bahasa sama ini diekspresikan dengan kata-kata yang berbeda. Dialog bisa didefinisikan sebagai pertukaran ide yang diformulasikan dengan cara yang berbeda-beda. Oleh karena itu, setiap usaha mendominasi pihak lain harus dicegah; kebenaran

²⁰ D. Hendropuspito, *Sosiologi Agama*, Kanisius, Yogyakarta, 1983, hal. 172-173

²¹ Einar M. Sitompul, *Gereja Menyikapi Perubahan*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, hal. 3

satu pihak tidak berarti ketidakbenaran di pihak lain. Bahasa bersama lebih dari sekedar kemiripan pembahasan; dia berdasarkan kesadaran akan masalah bersama, kita butuh alat demi mencapai landasan bersama.²² Demikian pula, bahwa dialog antaragama bukan hanya sekedar memberi informasi, mana yang sama dan mana yang berbeda, antara ajaran satu agama dengan lainnya. Juga, dialog antaragama bukan merupakan suatu usaha agar orang yang berbicara menjadi yakin akan kepercayaannya, dan menjadikan orang lain mengubah agamanya kepada agama yang ia peluk. Dialog bukanlah suatu studi akademis terhadap agama, juga bukan merupakan usaha untuk menyatukan semua ajaran agama menjadi satu, atau, dialog antaragama bukan suatu usaha untuk membentuk agama baru yang dapat diterima oleh semua pihak. Bukan pula berdebat adu argumentasi antara pelbagai kelompok pemeluk agama, hingga ada yang menang dan ada yang kalah. Tetapi, dialog antaragama adalah “pertemuan hati dan pikiran antar pemeluk pelbagai agama”. Dialog adalah “komunikasi antara orang-orang yang percaya pada tingkat agama”. Dialog adalah “jalan bersama untuk mencapai kebenaran dan kerjasama dalam proyek-proyek yang menyangkut kepentingan bersama”. Ia merupakan perjumpaan antar pemeluk agama, tanpa merasa rendah dan tanpa merasa tinggi, dan tanpa agenda atau tujuan yang dirahasiakan.²³

Dialog keagamaan muncul, ketika hubungan antar umat beragama mengalami keretakan dan ketegangan. Mungkin saja, ketegangan itu bukan didasarkan atas perbedaan keyakinan, karena, jika dasar teologis dan doktrinal dari agama-agama

²² M.Nasir Tamara (ed), *Agama Dan Dialog Antar Peradaban*, Paramadina, Jakarta, 1996, hal. 170

²³ A. Mukti Ali, “Ilmu Perbandingan Agama, Dialog, Dakwah, Dan Misi”, tulisan yang terdapat dalam Burhanuddin Daya & Herman L. Beck (Redaktur), *Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia dan Belanda*, INIS, Jakarta, 1992, hal. 208

mengajarkan sikap toleransi, saling menghormati dan mencintai, maka penyebab gesekan-gesekan dan keretakan itu bisa saja terjadi sebagai akibat : pertama, sebagai bias dari kepentingan politik, ekonomi, dan kedangkalan beragama manusia; dan kedua, kemungkinan konflik antar umat beragama terjadi karena kurangnya masyarakat dalam memahami ajaran-ajaran dan pesan-pesan moral dari agama membuat masyarakat menyikapi “klaim kebenaran” dalam agama secara berlebihan.

Berdasarkan analisis Hugh Goddard, dapat disimpulkan bahwa akar dan sumber konflik adalah: *pertama*, karena “ketidaktahuan”. Diantara penganut agama, khususnya Kristen-Islam, saling tidak tahu-menahu jauh lebih besar dibandingkan saling pengertian. Saling ketidaktahuan ini, menjadi rintangan ditengah jalan untuk mencapai saling pengertian di antara penganut agama yang berbeda. *Kedua*, ada hubungannya dengan yang pertama, bahwa akibat ketidaktahuan itu, maka hubungan antara umat beragama yang berbeda, khususnya Muslim dengan Kristen, adalah penerapan ‘standar ganda’. Dengan kata lain, kaum Muslim dan Kristen masing-masing menerapkan serangkaian standar atau kriteria untuk keyakinannya sendiri dan serangkaian standar yang sama sekali berbeda untuk kepercayaan orang lain.²⁴

Terjadinya dialog, atau proses dialog ada hubungannya dengan pemahaman agama orang lain yang bukan hanya memahami agama kita sendiri. Oleh karena itu, memahami agama orang lain adalah penting bagi para pelaku dialog, sehingga tidak terjadi salah pengertian dan dialog berjalan secara harmonis, dan saling menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan nilai-nilai universal yang ada pada masing-masing agama. Sebab, kedua nilai itu

²⁴ Hugh Goddard, Menepis Standar Ganda, Membangun Saling Pengertian Muslim-Kristen, Terjema-han Ali Noer Zaman, Qalam, Yogya-karta, 2000, hal. 2-3

merupakan 'esensi kemanusiaan' yang diajarkan semua agama. Untuk memahami agama orang lain itu haruslah pemahaman yang bersipat integral bukan parsial. Oleh karena itu, diperlukan beberapa persyaratan dan kelengkapan, antara lain : kelengkapan yang pertama, sipatnya intelektual. Untuk supaya dapat memahami agama atau fenomena agama secara menyeluruh, informasi yang penuh perlu dimiliki. Salah satu kelengkapan intelektual yang sangat penting adalah mempelajari dan memahami bahasa agama. Kelengkapan kedua, diperlukan kondisi emosional yang cukup. Dalam memahami agama orang lain, harus ada "feeling", perhatian, matexis atau partisipasi. Salah satu cara untuk menimbulkan rasa simpati adalah melalui pengalaman bergaul dengan mereka yang berbeda agama. Dan, kelengkapan ketiga adalah kemauan. Kemauan orang yang ingin mempelajari agama orang lain harus diorientasikan ke arah tujuan yang konstruktif.²⁵

Kriteria atau persyaratan lain dalam proses menuju dialog itu, sebagaimana dikemukakan oleh Husein Shahab, adalah kriteria-kriteria filosofis tanpa terjebak oleh simbolsymbol agama. Bila seorang penganut keyakinan mengukur keyakinan agama lain melalui kacamata sendiri, maka penilaiannya mengandung banyak unsur subjektivisme, dan hal demikian pasti akan menimbulkan kontradiksi. Bila Realitas Tertinggi pada hakekatnya adalah Satu, maka secara otomatis prinsip-prinsip filosofis yang digunakan semua agama adalah satu juga. Inilah yang harus dijadikan kriteria. Yang seharusnya dipertahankan bukan simbol agama, melainkan Kebenaran yang sebenarnya dikejar oleh setiap (penganut) agama. Bila fenomena beragama komunitas manusia seperti ini, maka konflik beragama mustahil ada. Kalaupun terjadi,

²⁵ Mukti Ali, Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia, Mizan, Bandung, Cetakan XI, 1999, hal. 61-63

konflik tidak timbul karena miskonsepsi penganut tentang Kebenaran, melainkan pada faktor-faktor kepentingan eksternal seperti politik dan ekonomi. Kalau seorang pastor duduk dengan seorang ulama, bila keduanya benar-benar memahami prinsip-prinsip universal, maka konflik agama tidak akan ada. Sebab, yang dikejar oleh kedua pihak adalah Kebenaran sejati. Jadi, tidak perlu ada seorang Kristiani berjiwa Muslim atau seorang Muslim berjiwa Kristiani agar tercipta hubungan harmonis antar umat beragama.²⁶

Menurut Ignas Kleden bahwa, dialog antar agama nampaknya hanya bisa dimulai dengan adanya keterbukaan sebuah agama terhadap agama lainnya.²⁷ Keterbukaan ini bisa di lihat dari :

Pertama, segi-segi mana dari suatu agama yang memungkinkannya terbuka terhadap agama yang lain, pada tingkat mana keterbukaan itu dapat ditolerir, dan juga dalam modus yang bagaimana keterbukaan itu dapat dilaksanakan.

Kedua, bagaimana agama menjadi jalan dan sebab seseorang atau sekelompok orang terbuka kepada kelompok orang yang bergama lain. Oleh karena itu, dalam suatu proses dialog, tujuannya tentu saja bukan untuk membuat suatu kesamaan pandangan, apalagi keseragaman, karena ini adalah sesuatu yang absurd dan agak mengkhianati tradisi suatu agama. Yang dicari adalah mendapatkan titik-titik pertemuan yang dimungkinkan secara teologis oleh agama kita sendiri.

Ada beberapa alasan dan tujuan perlu dilakukan dialog antar agama, antara lain ada alasan-alasan sosiologis dan teologis. Alasan-alasan sosiologis antara lain :

²⁶ Dalam mengantarkan buku Andito (ed), Op.Cit, hal. 23

²⁷ Pilihan Artikel Prisma 1975-1984, LP3ES, Jakarta, 1985, hal. 152

- 1) Pluralisme agama di dunia adalah suatu kenyataan yang makin lama makin jelas kelihatan, karena makin mudahnya berkomunikasi.
- 2) Semakin tinggi keinginan untuk mengadakan hubungan dengan lainnya. Isolasionisme selain ditinggalkan, juga tidak mungkin dilakukan. Apalagi aspek kesamaan antar kelompok umat manusia dan agama yang satu dengan yang lain semakin diakui dan dirasakan daripada apa yang memisahkannya.
- 3) Dialog antaragama membantu kepada setiap peserta untuk tumbuh dalam kepercayaannya sendiri, manakala ia berjumpa dengan orang yang berlainan agama dan bertukar pikiran tentang berbagai keyakinan dan amalan yang diyakini dan diamalkan oleh masing-masing pemeluk agama.
- 4) Selain nilai positif bagi individu dalam dialog, terdapat pula saling memperkaya antara agama-agama yang dipeluk oleh orang-orang yang mengambil bagian dalam dialog. Misalnya, dalam dialog antaragama, Islam dapat menyumbangkan pada agama lain peningkatan inspirasi dan universalitas.
- 5) Dialog antaragama dapat membantu untuk meningkatkan kerjasama di antara para penduduk suatu negeri, hingga dengan demikian, dalam kondisi saling menghargai, keadilan, perdamaian dan kerjasama yang bersahabat, dapat membangun negeri mereka.²⁸

Adapun alasan-alasan teologis, antara lain :

- 1) Bahwa seluruh umat manusia hanya mempunyai satu asal, yaitu Tuhan, dan diciptakan untuk tujuan akhir yang sama, yaitu Tuhan sendiri. Oleh karena itu, hanya ada satu rencana Tuhan bagi setiap manusia ini, satu asal dan satu tujuan. Perbedaan itu ada, tetapi dibandingkan dengan persamaan-

²⁸ A. Mukti Ali dalam Burhanuddin Daya & Beck (red), Op.Cit, hal. 215-216

persamaan yang begitu banyak dan fundamental, maka perbedaan-perbedaan itu tidak begitu penting.

- 2) Semua umat manusia adalah satu, dan kesatuan inilah yang mendorong manusia untuk meningkatkan perdamaian universal.
- 3) Karena alasan-alasan teologis inilah, maka agama-agama mengambil sikap positif terhadap agama-agama yang bukan agamanya sendiri. Dan hal ini bisa dilakukan dengan dialog dan kerjasama dengan para pengikut agama lain untuk bersamasama mengenal, memelihara, dan meningkatkan perbuatan-perbuatan spiritual dan moral yang terdapat pada orang-orang yang beragama lain, juga nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat dan kebudayaan mereka.
- 4) Dengan demikian, dialog antar agama bukan merupakan tindakan akademis saja, ia bukan merupakan diskusi filosofis dan teologis; ia merupakan perbuatan agama.
- 5) Dialog adalah usaha untuk keselamatan, dan itu adalah bagian dari tujuan total dari agama.²⁹

Tujuan yang ingin dicapai dalam dialog antar agama bukanlah hubungan asimilasi atau hubungan substitusi yang ditimbulkan, melainkan hubungan saling menyuburkan. Tujuan dialog adalah menekankan kesinambungan kedalaman hubungan yang dapat ditemukan di antara agama-agama dan komunitas.

Dengan demikian, untuk mengembangkan suatu dialog antar umat beragama diperlukan suatu model sebagai pedoman. Model apa pun dialog yang dijalankan semua yang terlibat harus berpegang pada prinsip-prinsip yang menyertai pelaksanaan dialog tersebut. Beberapa prinsip itu diantaranya adalah :

²⁹ Ibid, hal. 216-218

- 1) Frank witness; dimana masing-masing tidak menyembunyikan keyakinan, untuk memnghilangkan kecurigaan atau ketakutan yang tidak diungkapkan;
- 2) Mutual Respect; yaitu sikap simpati terhadap kesulitan orang lain dan penghargaan terhadap prestasi orang lain; dan
- 3) Religious Freedom; yaitu hak untuk memeluk agama tanpa paksaan.

c. Toleransi dan Permasalahannya

Dalam pendekatan budaya, sosial dan politik, istilah toleransi merupakan simbol kompromi beberapa kekuatan yang saling tarik-menarik atau saling berkonfrontasi untuk kemudian bahu-membahu membela kepentingan bersama, menjaganya dan memperjuangkannya. Demikianlah yang bisa disimpulkan dari celotehan para tokoh budaya, tokoh sosial politik dan tokoh agama diberbagai negeri, khususnya di Indonesia . Maka toleransi itu adalah kerukunan sesama warga negara dengan saling menenggang berbagai perbedaan yang ada diantara mereka. Sampai batas ini, toleransi masih bisa dibawa kepada pengertian syari'ah islamiyah. Tetapi setelah itu berkembanglah pengertian toleransi bergeser semakin menjauh dari batasan-batasan Islam, sehingga cenderung mengarah kepada sinkretisme agama-agama berpijak dengan prinsip yang berbunyi "semua agama sama baiknya". Prinsip ini menolak kemutlakan doktrin agama yang menyatakan bahwa kebenaran hanya ada didalam Islam. Kalau pun ada perbedaan antara kelompok Islam dengan kelompok non muslim, maka segera dikatakan bahwa perkara agama adalah perkara yang sangat pribadi sehingga dalam rangka kebebasan,

setiap orang merasa berhak berpendapat tentang agama ini, mana yang diyakini sebagai kebenaran.³⁰

Tuntutan terhadap toleransi beragama tidak hanya berasal dari pertimbangan-pertimbangan teologis maupun religius, tetapi juga merupakan tuntutan yang dikedepankan ketika keseluruhan struktur masyarakat berada dalam situasi kritis, kemudian berbagai teori dikembangkan untuk membangun sebuah masyarakat baru, meninggalkan sistem sosial lama yang tradisional agar lebih bebas menciptakan masyarakat baru yang lebih modern. Oleh karena itu, membicarakan toleransi beragama atau toleransi dan kebebasan beragama dengan sendirinya menggiring kita masuk ke dalam wilayah pemikiran konstitusional dan sosial pada permulaan zaman modern.

Penggunaan istilah modern dalam konteks toleransi dan kebebasan beragama, sebagaimana pandangan Schumann di atas, memiliki pengertian tersendiri. Menurutnya, istilah “modern” harus dikaitkan dengan society dan bukan pada lingkup kemajuan ilmu pengetahuan mutakhir. Tetapi yang dibicarakan disini dalam konteks progress, yang berarti kemajuan dan bukan modernitas. Seseorang yang menggunakan teknologi maju tidak selalu berarti menjadi manusia modern. Para diktator yang mempertahankan cara hidup kuno dan tradisional seringkali mempergunakan peralatan-peralatan maju. Namun tidak dengan sendirinya mereka dianggap sebagai manusia modern. Istilah modern mengandung pengertian kepada perubahan sikap mental dan cara berfikir. Modernitas berkaitan dengan kemanusiaan dan bukan teknologi. Oleh karena itu, persoalan toleransi dan kebebasan beragama membawa pada persoalan mendasar tentang kemanusiaan atau

³⁰ Lorens Bagus, Kamus Filsafat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hal. 1111-1112

antropologi. Melalui pertimbangan ini, maka persoalan kebebasan dan toleransi beragama menjadi permasalahan teologis.³¹

Persoalan toleransi beragama supaya tercipta kerukunan harus didekati dari dua aspek, yaitu dari aspek praktis dan teoritis. Secara praktis adalah berkenaan dengan kehidupan nyata, bahwa kehidupan masyarakat adalah majemuk yang didalamnya semua anggotanya diterima meski memiliki agama, kepercayaan, dan afiliasi yang berbeda. Ini adalah awal dari kelahiran konsep kewarganegaraan modern. Sedangkan aspek teoritisnya berkaitan dengan penekanan utama dari gerakan pencerahan yang bertujuan membentuk sebuah masyarakat baru. Hal ini bisa terwujud jika seluruh anggota masyarakat memberikan kontribusi dengan keyakinan dan dedikasi yang tulus.

Sebagai masyarakat yang majemuk termasuk didalamnya masalah keberagaman, sudah seharusnya masyarakat lebih terbuka dan dewasa dalam berfikir, dan semangat lebih toleran dalam hidup bersama. Di sinilah makna sebenarnya dari toleransi beragama, yaitu suasana sejuk, saling memelihara, dan mendukung dalam suasana kemajemukan. Toleransi semakin baik, maka terbangun dialog konstruktif dan berdayaguna yang mampu menumbuhkan sikap dan atmosfir keberagaman yang semakin terbuka, plural, dan inklusif. Pemahaman keagamaan para penganut agama akan semakin kritis dan bertanggung jawab; sebaliknya, pemahaman yang eksklusif, tertutup, dan bahkan sempit, justru menyebabkan saling menjauh antara satu dengan yang lain, bahkan tidak menutup kemungkinan muncul konflik dan menyuburkan sentimen keagamaan. Sangat disayangkan, yang seharusnya agama membawa kedamaian dan kebahagiaan

³¹ Olaf H. Schumann, *Menghadapi Tantangan, Memperjuangkan Kerukunan*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 2006, hal. 42-44

bagi manusia, sering dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan pribadi dan kelompok.

Olaf Schumann menyebutkan adanya lima dimensi toleransi antarumat beragama yang satu sama lainnya saling berkaitan, yaitu :

- 1) Dimensi praktis sosial; keterbukaan untuk menerima secara empatetis keberadaan dan aktifitas umat beragama lain di segala lapangan kehidupan yang diarahkan oleh ajaran-ajaran etis-moral masing-masing agama.
- 2) Dimensi ritual religius; keterbukaan untuk menerima secara empatetis cara-cara dan bentuk-bentuk ekspresi riytual simbolik kehidupan beragama dari umat beragama lain.
- 3) Dimensi doktrinal/ajaran; keterbukaan memahami secara empatetis pernyataan-pernyataan dan klaim-klaim doktrinal/akidah yang dipercaya umat beragama lain, yang bersumber dari kitab suci dan tradisi-tradisi keagamaan masing-masing yang terus mengalami aktualisasi dan perkembangan.
- 4) Dimensi perziarahan kehidupan beriman; keterbukaan untuk mengakui secara timbal balik bahwasetiap umat beragama sedang menempuh ziarah atau perjalanan kehidupan beriman, yang dimulai dari generasi-generasi perdana setiap umat yang bersangkutan dalam sejarah di dalam konteks social masing-masing, dan dilanjutkan secara kreatif dan dinamis oleh setiap umat beragama kontemporer dalam konteks sosial masing-masing.
- 5) Dimensi spiritualitas dan religiositas; setiap pihak dalam relasi antar umat beragama perlu mengalami perjumpaan yang akrab dan intimb dengan Realitas lain yang transenden, Realitas Spiritual, yang menjadi pusat batiniah yang dari dalamnya muncul motivasi untuk hidup dalam kebajikan dan

cinta kepada sesama manusia - motivasi yang membuat toleransi antarumat beragama menjadi suatu tugas panggilan spiritual.³²

Melalui aktualisasi ke dalam dunia sosial-historis, lima dimensi agama di atas menjadi fungsional, yaitu bisa mempengaruhi atau memberi dampak pada masyarakat. Tercipta atau tidaknya toleransi antarumat beragama dapat memberikan dampak tertentu pada masyarakat yang bergantung pada dua faktor, yaitu faktor internal dalam agama itu sendiri, dan faktor eksternal di dalam masyarakat.

Setelah menganalisis dasar-dasar teologis kerukunan beragama dalam perspektif Islam di atas, maka umat Islam berkewajiban, baik secara moral maupun sosial, untuk melakukan tindakan-tindakan toleransi. Oleh karena itu, penanaman nilai-nilai, pembiasaan tindakan-tindakan rukun dan toleran, salah satunya adalah melalui pendidikan formal. Pendidikan adalah alat yang paling tepat untuk menghindari nirtoleransi.³³ Sebab, yang bisa dilakukan oleh pendidikan adalah mengajar orang-orang tentang hak-hak dan kebebasan bersama untuk saling menghormati dan melindungi. Pendidikan untuk kerukunan dan toleransi, agar dipandang sebagai imperatif yang urgen. Untuk itu, diperlukan metode dan materi pembelajaran kerukunan dan toleransi yang sistimatis dan rasional, sehingga nilai-nilai kerukunan dan toleransi antar umat beragama bukan hanya tindakan-tindakan berdasarkan kepentingan “stabilitas keamanan” semata, tetapi jauh dari itu, tindakan kerukunan dan toleransi harus berdasarkan kesadaran dalam beragama. Tuntutan

³² Ibid, hal. 84

³³ UNESCO-APNIEVE, Op.Cit, hal. 156

pengetahuan, kesadaran, dan pembiasaan hidup rukun dan toleran salah satunya dapat dilakukan melalui proses pendidikan. Di samping beberapa problema terjadinya ketidakharmonisan antar umat beragama, faktor lain yang menjadi penyebab sekaligus hambatan terjadinya toleransi adalah dari kalangan internal penganut agama yang berdampak terhadap pergaulan antar umat beragama. Faktor-faktor itu diantaranya :

Pertama, *pemahaman Agama*; Seringkali persoalan keagamaan yang muncul adalah terletak pada problem penafsiran, atau pemahaman, bukan pada benar tidaknya agama dan wahyu Tuhan itu sendiri³⁴. Sehingga, masalah kerukunan keagamaan termasuk didalamnya dialog antar umat beragama harus menjadi wacana sosiologis dengan menempatkan doktrin keagamaan sebagai dasar pengembangan pemuliaan kemanusiaan. Menurut Ninian Smart, bertambahnya pengetahuan atau pemahaman akan berakibat melunakkan permusuhan, dan dalam tahap ini berarti meningkatkan kesepakatan.

Sementara itu, melihat kondisi kehidupan beragama sekarang ini, konflik antar umat beragama, menjadi bagian yang tak terpisahkan dari dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Kejadian tersebut tidak hanya atas dasar perbedaan agama tetapi juga terjadi antara orang atau kelompok-kelompok dengan agama yang sama. Maka, kerukunan yang perlu dibangun bukan hanya kerukunan antar agama, melainkan juga kerukunan antar orang atau kelompok dalam agama yang sama. Oleh karena itu, kiranya konflik berwajah agama perlu dilihat dalam kaitan-kaitan politis, ekonomi, ataupun sosial budayanya. Apabila benar bahwa konflik itu murni konflik agama, maka masalah kerukunan sejati tetap hanya dapat dibangun atas dasar nilai-nilai keadilan, kebebasan,

³⁴ A. Munir Mulhan, salah satu tulisannya: "Humanisme Agama-agama Dalam Al-Qur'an", termuat dalam buku Andito (ed), *Op.Cit*, hal. 58

dan hak asasi manusia, yang menyentuh keluhuran martabat manusia. Makin mendalam rasa keagamaan, makin mendalam pula rasa keadilan dan kemanusiaan. Seandainya tidak demikian, agama tidak mengangkat keluhuruan martabat manusia.

Kedua, klaim kebenaran (truth claim). Setiap agama memiliki kebenaran. Keyakinan tentang yang benar itu didasarkan kepada Tuhan sebagai satu-satunya sumber kebenaran. Dalam tataran sosiologis, klaim kebenaran berubah menjadi simbol agama yang dipahami secara subyektif personal oleh setiap pemeluk agama. Nampaknya, setiap orang memang sulit melepaskan kerangka (*frame*) subyektivitas ketika keyakinan pribadi berhadapan dengan keyakinan lain yang berbeda. Sekalipun alamiah, namun setiap manusia mustahil menempatkan dua hal yang saling berkontradiksi satu sama lain dalam hatinya. Oleh karena itu, setiap penganut agama tidak harus memaksakan inklusivismenya pada orang lain, yang menurut kita eksklusif.

Ketiga, standar ganda (Double Standards). Hugh Godard [11], seorang Kristiani yang ahli teologi Islam di Nottingham University, Inggris, memberikan contoh bahwa “hubungan Kristen dan Islam kemudian berkembang menjadi kesalahpahaman, bahkan menimbulkan suasana saling menjadi ancaman di antara keduanya, adalah suatu kondisi berlakunya “standar ganda” (*double standards*). Orang-orang Kristen maupun Islam selalu menerapkan standar-standar yang berbeda untuk dirinya, sedangkan terhadap agama lain mereka memakai standar lain yang lebih bersipat realistik dan historis. Misalnya, dalam masalah teologi, ada standar yang menimbulkan masalah klaim kebenaran : “agama kita adalah agama yang paling sejati karena berasal dari tuhan, sedangkan agama lain hanyalah konstruksi manusia. Agama lain mungkin juga berasal dari Tuhan tapi telah dirusak, dipalsukan oleh manusia”. Dalam sejarah, standar ganda ini

biasanya dipakai untuk menghakimi agama lain dalam derajat keabsahan teologis di bawah agamanya.³⁵ Lewat standar ganda inilah, kita menyaksikan munculnya prasangka-prasangka teologis yang selanjutnya memperkeruh suasana hubungan antar umat beragama.

Dalam hubungannya dengan itu, Arthur J. D'Adamo, seorang ilmuwan sekuler (ahli Matematika abad 20 ini), menyatakan bahwa "berbagai kompleksitas hubungan antar umat beragama ini, dengan berbagai standar ganda, sering dianggap sebagai tanda ketidakkritisan cara berfikir agama, atau dalam istilahnya disebut sebagai "religion's way of knowing". Oleh karena itu, "cara mengetahui agama" ini dianggap sebagai akar konflik-konflik teologis, yang menurutnya berawal dari sebuah standar tentang agamanya sendiri - bahwa kitab sucinya itu yang merupakan sumber kebenaran - yang sepenuhnya diyakini. Sehingga, standar-standar : (1) bersipat konsisten dan berisi kebenaran-kebenaran, tanpa kesalahan sama sekali; (2) bersipat lengkap dan final - dan karenanya memang tidak diperlukan kebenaran dari agama lain; (3) meyakini kebenaran agamanya sendiri dianggap sebagai satu-satunya jalan keselamatan, pencerahan ataupun pembebasan; dan (4) meyakini bahwa seluruh kebenaran itu diyakini orisinal berasal dari Tuhan, tanpa konstruksi manusia. Keempat standar itu semuanya diterapkan kepada agamanya sendiri sebagai "standar ideal". Sebaliknya, standar lain yang sepenuhnya terbalik, lebih realistis dan historis, diterapkan kepada agama lain. Sebagai konsekuensinya, melalui religion's way of knowing ini, jadilah agama kita sebagai "agama yang paling sempurna di dunia ini".³⁶

³⁵ Dikutip Oleh Budhy Munawar Rahman, *Islam Pluralis, Wacana Kesetaraan Kaum Beriman*, Paramadina, Jakarta, 2001, hal.34

³⁶ Ibid

Menurut Nurcholish Madjid, bahwa untuk menghindarkan diri dari penilaian standar ganda dalam melihat agama lain, yaitu dengan cara kita membaca agama kita dengan sisi-sisi ideal dan membandingkan agama lain dengan sisi-sisi real. [13] Pada dasarnya setiap agama memiliki sisi-sisi ideal secara filosofis dan teologis, dan inilah yang sangat dibanggakan oleh penganut suatu agama jika mereka mulai mencari dasar rasional atas keimanan mereka. Namun demikian, setiap agama pun memiliki sisi real, yaitu suatu agama menyejarah dengan keagungannya atau kesalahankesalahan sejarah yang bias dinilai dari sudut pandangan sekarang sebagai memalukan. Oleh karena itu, suatu dialog selalu mengandalkan kerendahan hati untuk membandingkan konsep-konsep ideal lain agama lain yang hendak dibandingkan, dan realitas suatu agama – baik yang agung maupun yang memalukan – dengan realitas agama lain yang agung dan memalukan itu. Berdasarkan perkembangan kehidupan beragama dewasa ini, maka yang perlu dikembangkan adalah suatu teologi dan dialog inklusif sebagai salah satu cara untuk menumbuhkan sikap-sikap pluralistis di antara agama. Tanpa sikap inklusivitas tidak mungkin berkembang sikap-sikap pluralis. Salah satu sikap pluralistis adalah bersedianya berdialog, dan sebagai tujuan dari dialog antar agama adalah, salah satunya, “kesalingpahaman”. Misinya adalah mengkomunikasikan pandangan masing-masing dalam rangka menjembatani ketidaktahuan dan kesalah-pahaman antara satu dan lain agama. Membiarkan setiap penganut agama mengungkapkan pandangan teologis mereka dengan ekspresi bahasa mereka sendiri.³⁷

Keempat, membesar-besarkan perbedaan. Tantangan agama-agama dewasa ini, adalah menjadi problema atau hambatan bagi suasana dan perkembangan dialog dan kerukunan antar umat beragama.

³⁷ Ibid, hal.xx

Dalam melihat dan memahami perkembangan kehidupan agama dan keberagaman sekarang, pada umumnya cenderung melihat perbedaannya ketimbang persamaannya. Namun demikian, kecenderungan melihat perbedaan itu pun tidak perlu disalahkan karena setiap orang beriman senantiasa ingin mencari, menggenggam dan membela kebenaran yang diyakininya berdasarkan pengetahuan dan tra-disi yang dimilikinya. Sikap demikian sangat terpuji selama tidak menimbulkan situasi sosial yang destruktif. Secara empiris adalah suatu kemustahilan jika kita mengidealisasikan munculnya kebenaran tunggal yang tampil dengan format dan bungkus tunggal, lalu ditangkap oleh manusia dengan pemahaman serta keyakinan yang seragam dan tunggal pula. Oleh karena itu, tantangan yang selalu dihadapi antara lain adalah bagaimana merumuskan langkah konstruktif yang bersipat operasional untuk mendamaikan berbagai agama yang cenderung mendatangkan pertikaian antar manusia dengan mengatas namakan kebenaran Tuhan.

Usaha itu tidak hanya diarahkan pada hubungan antar pemeluk agama secara eksternal, melainkan terlebih dahulu diarahkan pada hubungan intra umat beragama. Seseorang akan sulit bersikap toleran terhadap agama lain jika terhadap sesama pemeluk agama yang sama saja sulit untuk menghargai perbedaan paham yang muncul. Pada sisi lain, seringkali kita jumpai pula, konflik antara pemeluk agama semakin tidak jelas manakala kepentingan agama sudah berbaur dengan kepentingan etnis, politis dan ekonomis. Lihat, misalnya dalam beberapa kasus, seperti di Maluku, Sampit, dan peristiwa-peristiwa “yang berbau” konflik agama lainnya.

Beberapa konflik dan kerusakan sebagaimana sering terjadi di tanah air telah menjadi problema kebangsaan yang tak pernah surut dalam sejarah bangunan Indonesia, dan sekaligus tak pernah

berakhir di ujung penyelesaian. Untuk itu, perlu diapresiasi masalah-masalah kebangsaan ini dengan melihat beberapa hal di bawah ini :

- 1) Masalah integrasi; keragaman masyarakat Indonesia yang bisa memicu konflik, tak hanya terbatas pada perbedaan suku dan budaya, tetapi juga perbedaan agama. Untuk itu, diperlukan kesadaran komunitas bagi setiap elemen dan identitas manusia Indonesia untuk bersatu;
- 2) Masalah legitimasi politik kekuasaan. Sejak orde lama sampai sekarang, masalah legitimasi sering diasosiasikan sebagai legitimasi dari atas (Tuhan). Sekalipun melalui kesepakatan DPR/rakyat, tetapi sering dipandang sebagai “restu atas”, atau takdir Tuhan. Implikasinya, legitimasi yang dinikmati oleh pemegang kekuasaan tidak dapat digugat bahkan diperlakukan sebagai subversif. Tidak heran, di masyarakat terjadi polarisasi antara in group (minna) dan out group (minhum);
- 3) Masalah identitas. Krisis yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia adalah krisis spiritaul, iman dan cinta. Krisis ini terjadi karena masyarakat Indonesia sudah terkooptasi oleh kehidupan modern - meminjam istilah filsafat perennial - “hidup di pinggir lingkaran eksistensi”-nya.³⁸

4. Pandangan Para Ahli Non-Penstudi Agama-Agama Tentang IPA (Narsum Goup Discussion)

Di bawah ini dikemukakan beberapa pandangan akademisi lintas disiplin ilmu tentang ilmu perbandingan agama yang

³⁸ [17]Ahmad Barizi, “Membangun Kesadaran dan Kearifan Universal”, dalam Harmoni, Jurnal Multikultural & Multireligius, Vol. III, Nomor 9, Januari-Maret 2004, Puslitbang Kehidupan Beragama, Badan Litbang & Diklat Keagamaan Depag RI, hal. 58-60

berfokus pada religious studies yang dikembangkan oleh peneliti/pengampu mata kuliah ilmu perbandingan :

a. Dilema Ilmu di Ruang Administratif (Asep S. Muhtadi, guru besar ilmu komunikasi UIN Bandung)

Penamaan suatu ilmu ataupun lembaga yang mengkaji ilmu itu (semacam program studi) hampir selalu dipengaruhi oleh dimensi praktis, yakni kebutuhan akan landasan ilmiah atas sesuatu isu atau fenomena yang berkembang dalam kehidupan manusia. Nama-nama atau istilah-istilah yang kemudian digunakannya dirumuskan berdasarkan fakta-fakta kajian dan juga kebutuhan.

Paparan Dr. Adeng Muchtar Ghazali, sejauh yang saya pahami, dengan tegas dan cerdas menunjukkan problem penamaan dimaksud. Ia mengklarifikasi secara argumentatif silang pemikiran di seputar nama *Religious Studies* (Studi Agama-agama) dan *Comparative Study of Religions* (Studi Perbandingan Agama). Jika ditelaah, kedua istilah itu muncul dan digunakan karena ada latar belakang kebutuhan, baik dari para pendiri ilmu ataupun para penstudi agama-agama dari generasi saat ini.

Selain aspek kebutuhan, penamaan itu juga dipengaruhi oleh “kharisma” ilmu-ilmu pendukungnya yang telah lebih dulu mapan. Sosiologi dan antropologi, misalnya, memang banyak digunakan sebagai ilmu bantu yang cukup kuat dalam mempelajari agama-agama, khususnya fenomena empirik keberagamaan. Implikasinya, pendekatan dan metodologi yang lazim digunakan kedua ilmu itu, juga digunakan dalam mempelajari agama-agama. Pada titik ini mudah dipahami kalau kemudian lahir satu lembaga kajian (program studi) Antropologi-Sosiologi Agama (ASA) di Fakultas Ushuluddin.

Kembali pada persoalan silang pemikiran tentang istilah Ilmu Perbandingan Agama (IPA) dan *Religious Studies* (RS) yang digunakan oleh salah satu program studi S2 pada Program Pascasarjana UIN Bandung. Sekali lagi, tulisan Dr. Adeng Muchtar telah memberikan klarifikasi secara objektif dan seimbang. Penggunaan perspektif IPA yang digunakan dalam tulisannya sesungguhnya lebih dimaksudkan untuk meminjam metodologi yang telah tersedia untuk memenuhi kebutuhan RS. Lalu jika kedua istilah itu digunakan, baik dipilih salah satunya ataupun digunakan kedua-duanya menjadi program studi masing-masing, apakah kedua istilah itu dipandang memiliki landasan akademik yang memadai?

Saya akan melihatnya dari sudut pandang (dimungkinkan) terjadinya pergeseran-pergeseran fokus kajian yang kemudian berefek pada penamaan suatu program studi. Sebut saja kajian Orientalisme untuk memberikan contoh sederhana. Dalam sejarahnya, kajian orientalisme dikembangkan terutama untuk memenuhi kebutuhan kolonialisme. Muncullah para orientalis yang berorientasi pada tindakan kolonialisme. Tapi, belakangan para orientalis itu tidak lagi mau disebut sebagai orientalis. Mereka lebih nyaman dipanggil para islamolog. Pasalnya, telah terjadi pergeseran orientasi studi dari kepentingan kolonialisme (orientalisme) menjadi kepentingan akademik (islamolog).

Sekarang mari kita lihat dua istilah IPA dan RS. Kalau menelaah penjelasan Dr. Adeng Muchtar, saya menangkap adanya pergeseran orientasi dalam mempelajari agama-agama khususnya di Indonesia. Pada zaman Prof. Mukti Ali, studi perbandingan agama dibutuhkan untuk kepentingan menciptakan suasana kerukunan antar umat beragama yang saat itu tengah terancam konflik. Sekarang, kebutuhan itu tidak

terlalu nampak seiring semakin menurunnya konflik atas nama agama. Wajar kalau program studi IPA pada Fakultas Ushuluddin semakin berkurang peminatnya.

Jadi, jika kebutuhan mempelajari agama-agama itu tetap ada padahal tujuan memberikan kontribusi dalam penyelesaian konflik semakin menurun, maka ia akan semakin fokus pada orientasi murni mempelajari agama-agama (RS) sebagai gejala yang tetap dan bahkan semakin menarik. Fenomena keberagaman dalam kaitannya dengan variabel lain, seperti sosial, politik, dan ekonomi, kemudian menjadi fokus yang dikajinya. Karena itu, variabel-variabel inilah yang kemudian menjadi wilayah penelitiannya. Sedangkan pendekatannya dimungkinkan masih menggunakan pendekatan lama ketika masih bernama IPA, yaitu sosiologi ataupun antropologi.

Lalu apa kaitannya nama sesuatu ilmu dengan nama sesuatu program kajian? Seperti halnya nama mata kuliah, nama program studi tidak selalu identik dengan nama suatu ilmu. Suatu program studi dapat dinamai sesuai kebutuhannya. Di IPB, misalnya, ada program studi Komunikasi Pembangunan. Nama ini digunakan sesuai dengan kebutuhannya, bagaimana mengembangkan pembangunan pertanian di perdesaan melalui pendekatan komunikasi. Sedangkan ilmu utamanya adalah Ilmu Komunikasi.

Karena itu, RS seperti yang dikembangkan di UIN ini adalah sebuah program studi yang memokuskan kajiannya pada agama-agama dan fenomena keberagamaannya dengan menggunakan pendekatan interdisiplin sesuai kecenderungan para pengkajinya. Kecendrungan itulah yang disebut Dr. Adeng sebagai objek forma dalam mengkaji agama-agama.

b. Agama dan Kerukunan (Nurrohman Syarif)

Bangsa Indonesia yang kemerdekaannya diperoleh antara lain berkat rahmat Allah yang mahakuasa yang dilanjutkan dengan penetapan Pancasila sebagai ideologi Negara, telah menjadikan Negara ini tidak mungkin bersikap “netral” terhadap agama. Di samping adanya kementerian agama, pendidikan agama di negara ini sudah menjadi kewajiban bagi semua jenjang pendidikan mulai dari SD sampai perguruan tinggi, terutama sejak adanya Ketetapan MPRS Nomor 27/1966.

Kalau pada masa perjuangan, agama menjadi spirit yang terus menggelorakan semangat kemerdekaan, maka pada masa kemerdekaan, agama diharapkan akan terus memberikan spiritnya untuk membangun bangsa, menjaga keharmonisan di antara pemeluknya dan menjadi perekat bagi persatuan dan kesatuan bangsa ini. Akan tetapi, setelah hampir 57 tahun agama menjadi mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah, gejala intoleransi beragama yang mengarah kepada fanatisme dan radikalisme masih terus muncul di bumi pertiwi ini.

Intoleran dalam beragama ini seperti fenomena gunung es, yang tampak hanya permukaannya saja yakni pada saat telah terjadi korban, seperti perusakan gereja, penolakan terhadap lurah yang agamanya beda dengan rakyatnya, pengahncuran masjid, penutupan tempat-tempat ibadah dan lain-lain. Sikap intoleran yang disertai dengan fanatisme keagamaan tampak, tak hanya di masyarakat secara luas tapi juga di lingkungan sekolah atau bahkan di lingkungan para guru agama itu sendiri.

Dalam situasi seperti ini gagasan saudara Adeng M. Ghazali, untuk mengkonstruksi studi agama-agama terutama melalui perspektif ilmu perbandingan agama patut dihargai. Melalui tulisannya, Adeng M. Ghazali, sebenarnya sedang melanjutkan gagasan Mukti Ali dan gagasan almarhum Harsa Bachtiar yang intinya ingin mendorong perguruan tinggi mengkaji agama secara ilmiah, tidak hanya diajarkan secara doktriner. Dengan mengkaji agama secara saintifik maka seseorang lebih mudah menerima perbedaan atau *agree in disagree*. Bila kesadaran ini telah dimiliki oleh umat beragama maka umat beragama tidak akan mudah diprovokasi oleh elemen-elemen yang mau memanfaatkan agama untuk kepentingan politiknya atau diadu domba untuk memperebutkan “sorga” sehingga konflik bernuansa agama bisa dihindari. Inilah, menurut saya, makna penting hadirnya studi agama-agama.

c. Seputar Penelitian Agama dan Perubahan Sosial (Cik Hasan Bisri, dosen ilmu hukum fakultas syariah UIN Bandung)

Abdul Mukti Ali adalah sosok yang melekat dengan perbandingan agama dan penelitian agama di Indonesia. Dia merupakan salah seorang tokoh terpenting dalam jajaran perguruan tinggi agama Islam (PTAI) di Indonesia. Dikenal sebagai ilmuwan yang mumpuni dan pernah memimpin Kementerian Agama. Gagasannya tentang kerukunan hidup umat beragama dan pengembangan wacana metodologi penelitian agama tersebar dalam berbagai sumber informasi.

Salah seorang Murid Mukti Ali di UIN Bandung ialah Ahmad Farichin Chumaedy. Sedangkan salah satu

murid Ahmad Farichin adalah Adeng Muchtar Ghazali, dosen senior pada Program Studi Perbandingan Agama, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Jadi Adeng Muchtar merupakan “cucu intelektual” dari A. Mukti Ali. Oleh karena itu, Adeng Muchtar sangat mengenal pemikiran dan sepak terjang “kakek”-nya, A. Mukti Ali.

Apa yang saya kemukakan dalam dua alinea di atas merupakan tali penghubung antara makalah Adeng Muchtar tentang “Konstruksi Studi Agama-agama” dengan makalah yang saya susun tentang “Seputar Penelitian Agama dan Perubahan Sosial”. Apa yang saya susun merupakan pendamping atas makalah Adeng Muchtar, meskipun di sana sini terdapat nuansa. Tak selalu mendampingi. Apalagi saling dukung mendukung. Tulisan Adeng Muchtar merupakan bahan rujukan bagi mahasiswa yang sedang berkenalan dengan ilmu (berbagai) agama. Sedangkan tulisan saya merupakan tawaran bagi para peneliti, dosen atau mahasiswa, untuk memilih topik penelitian sesuai dengan bidang keahlian yang tercakup dalam ilmu agama (Islam). Memang ada titik temu di antara kedua tulisan tersebut.

5. Wacana Penelitian Agama

Ketika A. Mukti Ali menjabat Menteri Agama RI dalam Kabinet Pembangunan I (1971-1973) dan Kabinet Pembangunan II (1973-1978),³⁹ marak pembicaraan tentang peranan agama dalam

³⁹ Biografi A. Mukti Ali, sebagai menteri agama kesepuluh, dapat dilihat dalam tulisan Ali Munhanif, “Prof. Dr. A. Mukti Ali: Modernisasi Politik-Keagamaan Orde Baru”, dalam kumpulan biografi menteri-menteri agama sejak M. Rasjidi sampai Tarmizi

pembangunan nasional. Agama dipandang sebagai motivator, dinamisator, dan katalisator pembangunan. Berbagai pandangan Mukti Ali, berupa makalah dan pidato resmi, tersusun dalam penerbitan serial, yang diberi judul *Agama dan Pembangunan di Indonesia* (sembilan jilid). Pembicaraan tentang hal itu, berkembang pada tingkat yang lebih terbatas, pada tingkat regional dan lokal. Semangat untuk membicarakan hubungan antara agama dengan pembangunan digelar dalam berbagai kegiatan: diskusi, seminar, dan penelitian, termasuk dalam lingkungan kampus PTAI. Tema “agama dan pembangunan”, merupakan pencerminan misi menteri agama dalam Kabinet Pembangunan. Sementara itu, pembangunan nasional diprioritaskan pada bidang ekonomi, yang “dikawal” oleh stabilitas politik dan keamanan.

Salah satu upaya untuk memahami dan menjelaskan hubungan antara agama dengan masyarakat, khususnya pembangunan, Mukti Ali (1980: 18-27) melontarkan gagasan untuk merumuskan metodologi penelitian agama secara khusus. Gagasan itu diwujudkan, di antaranya berupa pembentukan Badan Penelitian dan Pengembangan Agama (Balitbang Agama) dalam jajaran Kementerian Agama pada tahun 1975; pembentukan dan penyelenggaraan Program Latihan Penelitian Agama (PLPA) bagi para dosen IAIN; serta menjalin kerja sama penelitian dengan beberapa perguruan tinggi dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Di samping itu, Mukti Ali terlibat dalam pengembangan ilmu-ilmu sosial, antara lain menjadi salah seorang pengurus Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial (YIIS) di bawah pimpinan Selo Soemardjan, dan menjadi pengurus Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial (HIPIS). Berkenaan dengan harapan dan pengalamannya itu, ketika melantik Kepala Balitbang

Taher. Buku ini disunting oleh Azyumardi Azra dan Saiful Umam, dengan kata pengantar oleh Taufik Abdullah.

Agama (1975), sebagaimana dikutip oleh Muljanto Sumardi, Mukti Ali, menyatakan: “..... Kalau keadaan ilmu-ilmu sosial selain ekonomi di Indonesia sangat lemah, maka sebenarnya ilmu-ilmu agama di Indonesia adalah lebih lemah lagi”.⁴⁰ Cara yang paling efektif untuk meningkatkan ilmu agama di Indonesia, menurut Mukti Ali, adalah dengan meningkatkan penelitian agama.

Apa yang dikemukakan oleh Mukti Ali, di antaranya merupakan suatu gambaran tentang polarisasi antara ilmu-ilmu sosial (selain ilmu ekonomi) di satu pihak, dan ilmu ekonomi di pihak lain. Ilmu ekonomi berada di depan sedangkan ilmu-ilmu sosial (lainnya) di belakang. Kritik terhadap ilmu-ilmu sosial -- karena hanya mampu mendeskripsikan dan menjelaskan sasaran kajiannya-- terutama dari kalangan pakar ekonomi, muncul melalui berbagai saluran: pers dan forum seminar. Dalam seminar yang diselenggarakan oleh HIPIS pada tahun 1979 (Universitas Brawijaya, Malang) dan 1984 (Universitas Sriwijaya, Palembang), kritik itu masih mengemuka. Sementara itu, ilmu ekonomi telah memiliki kemampuan untuk ditransformasikan dalam pembangunan nasional, sebagaimana dirumuskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), yang menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi. Berkenaan dengan hal itu, muncul berbagai kajian tentang ekonomi pembangunan, yang juga dikenal sebagai ekonomi politik.⁴¹ Namun demikian, ilmu ekonomi

⁴⁰ Pernyataan Mukti Ali, menurut Muljanto Sumardi (1992: 1), dirujuk dari pendapat Selo Soemardjan (10 Juni 1975), yang menyatakan, “..... Keadaan ilmu-ilmu sosial selain ilmu ekonomi di Indonesia dewasa ini sangat lemah” Berkenaan dengan hal itu, Selo Soemardjan (1984: 11) menyatakan bahwa sejak tahun 1967 *cultural focus* di Indonesia diarahkan pada bidang ekonomi. Sementara itu, *cultural focus* di Eropa pada abad 15 dan 16 adalah bidang agama; dan di Indonesia pada masa pemerintahan Soekarno, adalah bidang politik.

⁴¹ Salah satu kajian tentang “Perubahan Sosial dan Pembangunan di Inonesia”, berdasarkan teori-teori pembangunan, dapat dilihat dalam Suwarsono dan Alvin Y. So (1991).

mengalami ketidakberdayaan ketika terjadi krisis ekonomi yang berkepanjangan, yang menyebabkan kejatuhan Soeharto dari puncak kekuasaan pada pertengahan tahun 1998.

Gagasan dan usaha Mukti Ali, telah menghasilkan berbagai produk penelitian yang dijadikan bahan perumusan kebijakan menteri, tradisi penelitian di kalangan dosen IAIN makin berkembang, dan produk penelitian hasil kerja sama dengan perguruan tinggi dipublikasikan. Berbagai produk kajian dan penelitian itu, disebarluaskan dalam bentuk buku dan jurnal. Di antara produk yang disebarluaskan, berkenaan dengan agama dan pembangunan, berupa buku: *Agama dan Perubahan Sosial* (Taufik Abdullah, editor) dan *Kajian Agama dan Masyarakat* (Sudjangi, 1992, editor). Dalam buku pertama, ditampilkan hasil penelitian yang menggambarkan Islam di Aceh (oleh dua orang ahli IAI dari IAIN Banda Aceh, Ismuha dan Baihaqi A.K) dan Sulawesi Selatan (oleh dua orang antropolog dari Universitas Hasanuddin Makassar, Mattulada dan Abu Hamid). Kontribusi Mukti Ali tercermin dalam kata pengantar yang ditulis oleh Taufik Abdullah. Sementara itu, dalam buku kedua ditampilkan berbagai tulisan para ahli Ilmu Agama Islam (IAI) dan ilmu-ilmu sosial tentang agama sebagai realitas kehidupan, yang dijadikan sasaran pengkajian dan penelitian.⁴² Buku itu disusun berkenaan dengan peringatan hari jadi kelimabelas tahun Balitbang Agama, yang berpangkal dari apa yang digagas dan diwujudkan oleh Mukti Ali.

Dalam kajian itu dikemukakan tiga perspektif: modernisasi, dependensi, dan sistem dunia.

⁴² Di antara para pakar yang ditampilkan pandangannya, hampir seluruhnya ahli ilmu-ilmu sosial di luar ilmu ekonomi. Sementara itu, tulisan Emil Salim (profesor ekonomi) lebih mencerminkan pandangan Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup (KLH) ketimbang pandangan seorang pakar ekonomi.

Dalam buku itu Mukti Ali menulis tentang “Islam, Religion and Science”.⁴³

Tentu saja pembicaraan tentang agama dan pembangunan sangat mengasyikkan, karena dalam perkembangan sejarah umat manusia, agama memiliki signifikansi terhadap perkembangan masyarakat, terutama perdagangan. Pandangan Weber tentang etika Protestan dan semangat kapitalisme, menjadi komoditas dalam seminar dan diskusi, dan menjadi wacana yang dipandang layak untuk diterbitkan (Lihat: Taufik Abdullah, 1983). Ia dijadikan rujukan untuk menjelaskan hubungan antara agama dengan perkembangan ekonomi, terutama dari sudut pandang antropologis dan sosiologis. Demikian pula, hasil penelitian McClelland (1961) tentang *need for achievement* yang menjadi virus mental bagi kewirausahaan (*entrepreneurship*), menjadi bahan kajian; bahkan yang bersangkutan sempat memberikan penjelasan di beberapa perguruan tinggi Indonesia pada awal tahun 1970-an. Oleh karena itu, muncul gagasan etos kerja dan etika bisnis. Demikian pula hubungan antara agama dengan berbagai bidang kehidupan lainnya menjadi wacana di kalangan intelektual Indonesia (Lihat: Sudjangi, 1992).

Namun demikian, penelitian tentang hubungan antara agama dengan pertumbuhan atau perkembangan ekonomi --yang menjadi prioritas dalam pembangunan nasional-- berkenaan dengan gagasan itu, masih sangat langka, baik yang berskala

⁴³ Gagasan Mukti Ali tentang penelitian agama mendorong kemunculan pembahasan dan penulisan metodologi penelitian agama, sebagaimana terlihat dalam Muljanto Sumardi (1980), Taufik Abdullah dan M. Rusli Karim (1991), Mastuhu dan Deden Ridwan (1998), dan M. Atho Mudzhar (1998). Namun demikian, gagasan Mukti Ali itu tidak terlepas dari kritik dan kekurangan. Jalaluddin Rakhmat (1991: 92), misalnya, menyatakan bahwa pertanyaan Mukti Ali tentang metode penelitian agama secara khusus, dipandang tidak relevan. Demikian pula, pandangan Mukti Ali tentang “Metodologi Ilmu Agama” (1991: 41-57) masih berputar di sekitar wacana metodologi penelitian yang sangat abstrak, tanpa jalan keluar menjadi formula metode penelitian agama yang dapat dioperasionalkan.

mikro maupun makro. Berkenaan dengan hal itu, ketika terjadi krisis ekonomi melanda masyarakat bangsa Indonesia gejala kehidupan ini sulit untuk dijelaskan, apalagi untuk diatasi, yang didasarkan kepada hasil penelitian yang pernah dilakukan. Sementara itu, dalam gejala kehidupan umat beragama, khususnya Muslim, muncul berbagai upaya untuk menerapkan ajaran Islam tentang ekonomi (atau dikenal sebagai ekonomi Islam) dalam dunia bisnis dan perbankan. Gejala yang demikian merupakan suatu respons terhadap *cultural focus* di berbagai negara di dunia. Hal itu merupakan lahan baru bagi penelitian agama, khususnya mengenai hubungan antara ajaran Islam dengan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, yang dapat dilakukan melalui penelitian monodisipliner atau interdisipliner dan multidisipliner, yang menjadi sumber inspirasi kemunculan gagasan “peranan agama dalam pembangunan”.⁴⁴

6. Agama dan Perubahan Sosial

Ketika sepasang anak manusia melakukan perkawinan, pada diri mereka terjadi peralihan status, yaitu dari bujangan dan gadis menjadi beristeri dan bersuami. Secara demografis peralihan ini

⁴⁴ Beberapa disertasi tentang hubungan Islam dengan ekonomi, perbankan, dan politik di beberapa negara Islam ditulis oleh: Muhammad Anwar (1985), *A Macroeconomic Model for Interest-Free Economies: An Integrative Study of Western and Islamic Economic Systems* (University of New Hampshire, USA); Mehrdad Valibeigi (1991), *Islamization of The Economy: The Post-Revolutionary Iranian Experience* (The American University, USA); Elias Kazarian (1991), *Finance and Economic Development: Islamic Banking in Egypt* (Lunds Universitet, Sweden); Osman Babikir Ahmed (1990), *The Contribution of Islamic Banking to Economic Development: The Case of the Sudan* (University of Durham, United Kingdom); Rachid Ali Mohamad (1990), *The Role of Islamic Banks in Economic and Social Development with Particular Reference to the Sudanese Experience* (Council for National Academic Awards, United Kingdom); Abdul-Rahim Abdul-Hamid al-Saati (1987), *The Islamic Reform to the Saudi Arabian Financial System* (University of Colorado, USA); dan Ramlan Surbakti (1991), *Interrelationship between Religious and Political Power under New Order* (Northern Illinois University, USA).

bermakna perubahan status marital, dari status tidak kawin menjadi status kawin. Status yang baru itu menjadi titik tolak untuk memperoleh status lainnya, di antaranya sebagai menantu dari mertua, sebagai kakak ipar dari adik ipar, dan seterusnya. Semua status itu bersifat statis. Namun, pada masing-masing status itu menuntut aspek dinamis, yakni “peranan yang seharusnya” dilakukan, yakni hak dan kewajiban suami isteri, hak dan kewajiban sebagai menantu, sebagai ipar, dan seterusnya. Ketika hak dan kewajiban itu ditunaikan dalam kehidupan keluarga (orientasi dan prokreasi), yakni dalam wujud interaksi, maka terjadi “peranan yang dilaksanakan” oleh masing-masing pihak. Oleh karena itu, keluarga disebut sebagai satuan sosial terkecil, yang di dalamnya, antara lain, terjadi interaksi antar anggota keluarga.

Ketika dari interaksi suami isteri itu membuahkan kelahiran anak, maka terjadi tiga perubahan sekaligus. Pertama, perubahan status masing-masing suami dan isteri dan kedua suami isteri. Suami tetap menjadi suami dari isterinya, kemudian menjadi bapak dari anaknya; dan bersama isterinya menjadi orang tua dari anaknya. Sedangkan isteri tetap menjadi isteri dari suaminya, kemudian menjadi ibu dari anaknya; dan bersama suaminya menjadi orang tua dari anaknya. Penambahan jumlah status itu berakibat terhadap unsur keluarga lainnya. Mertua menjadi kakek dan nenek dari cucunya, dan adik ipar menjadi paman dari keponakannya. Kedua, terjadi perubahan jaringan hubungan keluarga yang lebih luas dan lebih rumit, baik dalam keluarga orientasi masing-masing suami isteri maupun dalam keluarga prokreasi mereka. Dalam jaringan itu, terdapat alokasi otoritas dan alokasi protokoler dalam urusan keluarga dan publik, serta pola hubungan sosial yang menyertainya, yang merujuk kepada nilai dan norma sosial dalam satuan sistem sosial atau lingkaran

kebudayaan. Ketiga, terjadi perubahan jumlah manusia, baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam lingkungan masyarakat, bahkan bagi penghuni muka bumi (dunia, dalam arti ruang dan waktu). Penambahan jumlah manusia itu, memiliki makna antropologis, sosiologis, dan demografis. Kelahiran dilengkapi dengan ritus keagamaan, antara lain akikah (Islam) dan pembaptisan (Kristen). Kelahiran juga berarti penambahan hak dan kewajiban dalam keluarga. Di samping itu, kelahiran (fertilitas) berarti penambahan jumlah penduduk dalam suatu kawasan. Ketika jumlah manusia dihitung secara mutlak, maka dikenal sebagai pertambahan penduduk. Ketika pertambahan penduduk itu dihitung secara relatif, maka dikenal sebagai pertumbuhan penduduk. Kini, pertumbuhan dan pertumbuhan penduduk itu menjadi salah satu masalah kehidupan manusia di muka bumi yang dipelajari secara khusus, yakni studi kependudukan, dengan mengerahkan berbagai disiplin ilmu (alamiah, sosial, dan humaniora).

Apa yang dikemukakan di atas, merupakan hal yang biasa dialami oleh semua manusia secara universal, di mana pun dan kapan pun, selama kehidupan umat manusia berlangsung. Hal itu dapat dipandang sebagai cikal bakal pengkajian perubahan sosial. Atas perihal tersebut, muncul satu pertanyaan: apa hubungan antara pertumbuhan penduduk dengan agama? Manakala agama dipandang sebagai seperangkat nilai dan norma kehidupan manusia yang bersumber dari keyakinan, maka hubungan antara keduanya sangat erat. Keabsahan perkawinan, khususnya di Indonesia, didasarkan kepada hukum agama yang dipeluk oleh warga negara. Hak dan kewajiban suami isteri dan hak antara orang tua dan anak didasarkan kepada hukum agama yang telah memperoleh legalisasi produk kekuasaan negara. Demikian pula, proses peralihan (inisiasi) yang menjadi peristiwa terpenting

dalam kehidupan manusia, yaitu kelahiran, perkawinan, dan kematian memperoleh transendensi agama yang dipeluk oleh anggota keluarga.

Boleh jadi jumlah anak yang diinginkan oleh orang tua didasarkan kepada nilai-nilai dan norma sosial yang dianut oleh mereka. Berkenaan dengan hal itu, dalam pengkajian kependudukan, terutama keluarga berencana, agama yang dipeluk oleh satuan masyarakat dipandang berpengaruh terhadap fertilitas,⁴⁵ meskipun melalui beberapa variabel antara, yakni faktor hubungan kelamin, faktor kehamilan, dan faktor kelahiran dengan selamat.⁴⁶ Berkenaan dengan fertilitas ini, terutama penggunaan alat kontrasepsi, khususnya *intra uterine devices* (IUD), dalam pelaksanaan program keluarga berencana di Indonesia, telah dikeluarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang penggunaan alat tersebut, sebagai pembatalan terhadap fatwa 11 orang ulama yang dikeluarkan sebelumnya (Lihat: Muhammad Atho Mudzhar, 1993: 127).

Menurut hasil penelitian M. Atho Mudzhar (1993: 126), pokok-pokok isi fatwa MUI tentang keluarga berencana adalah sebagai berikut ini. Pertama, Islam membenarkan pelaksanaan keluarga

⁴⁵ Krich Suebsonthi (1980), *The Influences of Buddhism and Islam on Family Planning in Thailand: Communication Implication*, menyimpulkan bahwa agama di kalangan orang Thai Muslim dan Thai Buddhist berpengaruh terhadap pola komunikasi, struktur sosial, dan adopsi keluarga berencana pada kedua komunitas tersebut (Lihat: dalam Cik Hasan Bisri, 2000: 221-222).

⁴⁶ Analisis variabel antara dirumuskan oleh Davis dan Blake, 1956, "The Social Structure of Fertility: An Analytical Framework", dalam *Economic Development and Cultural Change* (Lihat: Singarimbun, 1978: 1-47). Model analitis ini, kemudian dikembangkan dalam pengkajian kependudukan, di antaranya oleh Fawcett (1984). Kerangka ini juga digunakan dalam *Serpong Project* (kerja sama Universitas Indonesia dengan Leiden University) pada tahun 1972-1975, yang dikombinasikan dengan teori difusi inovasi (Rogers dan Shoemaker). Salah satu aspek yang dijadikan fokus penelitian adalah saluran kepemimpinan agama dalam proses inovasi keluarga berencana (Lihat: Zuidberg, 1978). Di samping itu, kerangka ini digunakan oleh Biro Pusat Statistik (1980) dalam menganalisis pola umur perkawinan di Indonesia.

berencana yang ditujukan demi kesehatan ibu dan anak, dan demi kepentingan pendidikan anak. Pelaksanaannya harus dilakukan atas dasar sukarela, dan menggunakan alat kontrasepsi yang tidak dilarang oleh Islam. Kedua, pengguguran kandungan dalam bentuk apa pun dan pada tingkat kehamilan kapan pun diharamkan oleh Islam karena perbuatan itu tergolong pembunuhan. Ini termasuk pengaturan waktu haid dengan menggunakan pil. Pengecualian hanya diberikan apabila pengguguran dilakukan demi menolong jiwa si ibu. Ketiga, vasektomi dan tubektomi dilarang dalam Islam, kecuali dalam keadaan darurat, seperti untuk mencegah menjalarnya penyakit menular atau untuk menolong jiwa orang yang hendak menjalani vasektomi atau tubektomi. Keempat, penggunaan IUD dalam keluarga berencana dibenarkan, asalkan pemasangannya dilakukan oleh dokter wanita atau, dalam keadaan tertentu, oleh dokter lelaki dengan dihadiri oleh kaum wanita lain atau si suami pasien.

Uraian ringkas di atas menunjukkan tentang suatu hubungan timbalbalik antara agama dengan pertumbuhan penduduk, sebagai salah satu dimensi perubahan sosial. Hubungan itu, secara umum, mencakup tiga unsur, yakni unsur norma sosial yang bersumber dari ajaran agama yang dijadikan dasar keabsahan perkawinan dan norma interaksi suami isteri; unsur perilaku manusia, yakni interaksi suami isteri dan antar ulama dalam proses perumusan fatwa MUI; dan unsur biologis, yakni proses reproduksi yang berawal dari hubungan kelamin suami isteri. Unsur norma sosial secara umum berpengaruh terhadap unsur perilaku manusia dan unsur biologis secara khusus. Unsur perilaku manusia secara umum berpengaruh terhadap unsur norma sosial dan unsur biologis secara khusus. Demikian pula, unsur biologis

secara umum berpengaruh terhadap unsur norma sosial dan unsur perilaku manusia secara khusus.

Ketiga unsur tersebut dapat diartikan lebih luas, terutama ketika dihubungkan dengan konsep lain. Unsur norma sosial dapat diartikan sebagai kebudayaan; unsur perilaku sosial dapat diartikan sebagai pola-pola interaksi sosial, yang kemudian menjadi struktur sosial; dan unsur biologis dapat diartikan sebagai lingkungan alam fisik. McIver dan Page (1957: 508-635), misalnya, menyatakan bahwa perubahan sosial terjadi karena faktor-faktor: biologis, teknologis, dan kebudayaan (Cf. Selo Soemardjan, 1981: 304). Sementara itu, Remmling (1976: 266-271) menyatakan bahwa faktor-faktor perubahan sosial meliputi: lingkungan alam fisik, lingkungan kebudayaan, kepribadian, kependudukan, teknologi, kekuasaan, ekonomi, berbagai ideologi, serta orang-orang besar. Apa yang dikemukakan Remmling itu, dapat dikelompokkan sebagai berikut: (1) faktor kebudayaan (lingkungan kebudayaan dan ideologi); (2) faktor pola interaksi (kepribadian, orang besar, dan kekuasaan); (3) faktor alam fisik (lingkungan alam fisik dan kependudukan).

Sementara itu, faktor ekonomi merupakan relasi antara pola interaksi dengan alam fisik berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan terhadap benda; dan faktor teknologi merupakan relasi antara unsur kebudayaan (penerapan ilmu) dengan unsur pola interaksi dan unsur alam fisik, berkenaan dengan kemudahan pemenuhan kebutuhan hidup. Selanjutnya, Remmling membagi teori perubahan sosial menjadi dua pilahan. Pertama, teori-teori umum, yaitu: *degenerative theories*, *theories of progress*, dan *modern philosophies of history*. Kedua, teori-teori khusus: *monocausal determinisms*, *multiple factor theories*, dan *modern trend analysis*. Sementara itu, konsep perubahan sosial dapat diartikan lebih sempit terutama ketika akan dilakukan penelitian. Perubahan sosial dapat dide-

finisikan secara spesifik, dengan menggunakan tolok ukur tertentu (Lihat: McIver and Page, 1957: 523). Ia dapat berarti kemajuan, kemunduran, pertumbuhan, perkembangan, modernisasi, reformasi, revolusi, evolusi, transformasi, adaptasi, modifikasi, dan sebagainya. Kemajuan atau kemunduran, merupakan perubahan sosial (terutama kultural) yang didasarkan kepada tolok ukur nilai tertentu. Ada unsur penilaian terhadap perubahan sosial, baik pada periode tertentu maupun secara kumulatif. Oleh karena itu, untuk melakukan penilaian dibutuhkan kriteria dan indikator tertentu.

Pertumbuhan adalah suatu perubahan sosial (terutama struktural) dengan menggunakan pengukuran kuantitatif, yang biasanya digunakan untuk mengukur perubahan di bidang ekonomi dan kependudukan. Oleh karena itu, dalam penelitian ekonomi dan kependudukan digunakan model matematik dan model statistik. Perubahan itu berhubungan dengan variabel lain, baik hubungan searah maupun sebagai suatu matarantai perubahan. Laporan penelitian Meadows dkk. (1980), *The Limits to Growth*, tentang matarantai pertumbuhan "sistem dunia" dengan menggunakan model matematik. Laporan yang diterbitkan pada tahun 1972, mengundang perhatian dan reaksi dari berbagai pakar, karena simpulannya yang mengejutkan. Salah satu simpulannya ialah: "Bila arah pertumbuhan penduduk, industrialisasi, pencemaran, produksi pangan, dan penggunaan sumberdaya alam berjalan tanpa perubahan, maka batas-batas pertumbuhan di planet bumi ini akan terjadi dalam waktu 100 tahun yang akan datang. Kemungkinan besar, akibatnya ialah menurunnya penduduk dan kemampuan industri dengan mendadak dan tidak terkendali".⁴⁷ Hoselitz (1960)

⁴⁷ Laporan penelitian Meadows dkk., lebih ditekankan pada unsur lingkungan alam fisik yang dilengkapi oleh unsur pola interaksi sosial. Sementara itu, unsur kebudayaan tidak

menghubungkan aspek-aspek sosiologis dengan pertumbuhan ekonomi, terutama sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua di negara-negara maju maupun di negara-negara yang sedang berkembang. Sementara itu, Hagen (1963) menghubungkan afiliasi agama dan pola pengasuhan anak dengan pertumbuhan ekonomi di beberapa negara: Inggris, Jepang, Kolumbia, dan Indonesia. Khusus tentang Indonesia, merujuk kepada hasil penelitian Geertz (1977), yakni di kalangan pedagang santri Muslim di Mojokuto, dan aristokrat Hindu di Tabanan.

Perkembangan adalah suatu perubahan sosial (struktural dan kultural), yang dinyatakan secara kualitatif. Dalam bidang ekonomi dikenal pula konsep perkembangan sebagaimana digunakan oleh Widjaya (1982), Pudjiwati Sajogyo (1983), Boserup (1984), Suwarsono dan Alvin Y. So (1991). Boserup (1984) mendiskusikan tentang peranan wanita dalam perkembangan ekonomi di 42 negara, yang dibagi menjadi empat kawasan: Afrika di Selatan Gurun Sahara, Daerah Pengaruh Arab, Asia Selatan dan Tenggara, dan Amerika Latin. Meskipun dalam penelitian itu tidak secara khusus dihubungkan dengan afiliasi agama, namun dalam beberapa hal keempat “pola pekerjaan” itu berhubungan dengan agama yang dipeluk oleh masyarakat dalam kawasan masing-masing, terutama agama Islam dan agama Hindu.

Pembangunan adalah suatu perubahan sosial (struktural dan kultural), yang disengaja dan dirancang. Pembangunan nasional yang dititikberatkan pada bidang ekonomi, dirancang dan diorganisasikan secara nasional dengan motor penggerak Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan badan serupa pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Ketika terjadi pengalihan

dijadikan salah satu unsur matarantai perubahan dalam sistem dunia. Oleh karena itu, muncul berbagai kritik dari berbagai pakar. Namun demikian, Meadows dkk., mengakui bahwa model yang digunakan mengandung kelemahan, tetapi diperlukan.

sebagian besar wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, berkenaan dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka corak pembangunan akan mengalami variasi meskipun masih dalam satu sistem. Sementara itu, pembangunan di bidang agama masih tetap menjadi wewenang pemerintah pusat. Di samping itu, ada pula pembangunan yang dirancang dan diorganisasikan oleh masyarakat, yang dapat disebut sebagai “pembangunan jalur bawah”. Prioritas pembangunan pada jalur ini, dalam berbagai hal dititikberatkan pada bidang agama dan kesejahteraan sosial (Lihat: Tim LPSP-IPB, 1973; Tjondronegoro, 1984; dan Cik Hasan Bisri, 1988).

Modernisasi adalah suatu perubahan sosial (terutama kultural) dengan menggunakan jasa teknologi, baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Menurut Schoorl (1982), aspek yang paling spektakuler dalam modernisasi masyarakat ialah teknik produksi dari cara-cara tradisional ke cara-cara modern, yang tertampung dalam pengertian revolusi industri. Oleh karena itu, modernisasi mencakup berbagai bidang kehidupan masyarakat. Pada dasarnya pembangunan (ekonomi) di Indonesia menggunakan konsep ini, yakni perubahan berencana dari masyarakat agraris menuju masyarakat industri. Namun penataan fondasi ekonomi “jalur bawah” kurang diperhatikan, disertai berbagai kebocoran (korupsi) di kalangan pengelola dan pelaku pembangunan yang sentralistik, sehingga mengalami krisis ekonomi. Modernisasi tentang berbagai bidang kehidupan di Amerika Serikat, didiskusikan dalam Myron Weiner (1966). Sementara itu, Boulding (1969: 150-167), menjelaskan tentang hubungan antara masyarakat dengan teknologi: “teknologi merupakan produk masyarakat dan masyarakat merupakan produk teknologi”. Sedangkan Makoto Aso dan Ikuo Amano (1972), menggambarkan tentang modernisasi sistem pendidikan di

Jepang yang diawali sejak tahun 1872. Apa yang digambarkan oleh kedua pakar itu ialah perkembangan sistem pendidikan di Jepang selama 100 tahun (1872-1971) yang disertai data kuantitatif.

Pembaruan (*reformation*), adalah suatu perubahan sosial (dari struktural ke arah kultural) yang didasarkan kepada acuan nilai fundamental yang telah disepakati. Gagasan reformasi yang disponsori oleh mahasiswa, pada dasarnya merupakan suatu kehendak untuk melakukan perubahan kultural, yakni masyarakat demokratis yang terbebas dari praktik nepotisme, kolusi, dan korupsi. Namun demikian, reformasi itu dilakukan melalui suprastruktur politik yang memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan struktural. Perubahan suprastruktur dan infrastruktur politik, misalnya, telah dilakukan secara radikal, termasuk empat kali perubahan UUD 1945, namun kultur politik mengalami kemunduran karena tersentral kepada tokoh bukan kepada sistem. Selain itu, reformasi dalam pengertian pembaruan yang bersifat kultural, lebih bermakna pemurnian (*purifikasi*) atas nilai dan norma kehidupan masyarakat.

Transformasi ialah suatu perubahan struktural dalam konteks struktur dan kultur masyarakat tertentu. Hal itu bermakna suatu proses konekstualisasi nilai, norma, dan informasi ke dalam struktur masyarakat tertentu. Misalnya, perluasan makna subyek hukum dari orang menjadi orang atau badan hukum antara lain dalam hukum perwakafan (*wakif* dan *nadzir*) dan pengelolaan zakat (*muzakki* dan *mustahiq*), merupakan suatu transformasi hukum Islam, dalam hal ini fiqh, dalam konteks sistem hukum nasional (Indonesia) dewasa ini. Sebagaimana telah dimaklumi, menurut ketentuan pasal 215 Kompilasi Hukum Islam: (2) Wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan benda miliknya; (5) Nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan

penguasaan benda wakaf. Sementara itu, menurut ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Jo. Pasal (5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. Atau dengan perkataan lain, terjadi transformasi hukum Islam **dimensi fiqh** menjadi **dimensi qanun** dalam kehidupan masyarakat bangsa Indonesia.

Adaptasi adalah suatu perubahan sosial (struktural dan kultural), berupa penyesuaian terhadap unsur yang lebih dominan. Atau penyesuaian diri dari subordinasi terhadap superordinasi. Terjadi akomodasi dari apa yang “dikehendaki” oleh yang lebih kuat kepada yang lebih lemah. Konsep ini dapat digunakan untuk memahami dan menjelaskan gejala kebudayaan, gejala pola interaksi sosial, dan gejala biologis. Oleh karena itu, sering digunakan dalam penelitian ekologi manusia yang berbasis pada biologi, yang dihubungkan dengan pola budaya dan struktur sosial.

Selanjutnya, konsep perubahan sosial mengandung dimensi lain, yaitu faktor determinan, arah, pelaku, dan bentuk perubahan. Berkenaan dengan hal itu, dikenal teori perubahan sosial menurut perspektif *linier* atau perspektif *cyclical*.⁴⁸ Teori perubahan sosial merupakan bagian dari teori perubahan kehidupan makhluk Allah, dan dapat diturunkan menjadi teori perubahan agama dalam kehidupan manusia. Salah satu teori perubahan di bidang biologi adalah teori evolusi Darwin, yang menggunakan empat konsep: *struggle for life*, *survival of the fittest*, *natural selection*, dan *progress*. Teori ini didasarkan kepada perspektif linier, yang dalam berbagai hal digunakan untuk menjelaskan perubahan sosial. Se-

⁴⁸ Perspektif *linier*, dianut oleh Comte, Spencer, Hobhouse, dan Mark. Sedangkan perspektif *cyclical* dianut oleh Pareto, Sorokin, dan Toynbee (Lihat: Soerjono Soekanto, 19-83: 17-21). Sementara itu, Ibn Khaldun dapat diidentifikasi sebagai penganut perspektif *cyclical*.

mentara itu, dalam wacana sosiologi dikenal *unilinier theories of evolution, universal theory of evolution, dan multilined theories of evolution* (Lihat: Soerjono Soekanto, 1996: 345-346). Berkenaan dengan hal itu, tipologi masyarakat *primitif-tradisional-modern (masyarakat tradisional-praindustri-industri)* didasarkan kepada teori evolusi linier. Demikian pula tipologi *masyarakat agraris-industri-informasi* yang digagas oleh Alvin Toffler, didasarkan kepada asumsi dalam teori itu meskipun dipandang sebagai revolusi (*rapid change*).⁴⁹

Di samping itu, perubahan sosial dapat dipandang sebagai peristiwa, atau proses, atau metode. Apabila perubahan sosial itu dipandang sebagai peristiwa, maka penekanannya pada berbagai unsur yang berinteraksi dalam peristiwa tersebut. Ia merupakan perwujudan interaksi sosial yang melibatkan berbagai pihak, baik dalam bentuk kerja sama, maupun persaingan atau konflik. Perubahan yang terjadi adalah sesuatu yang baru, yakni pertumbuhan atau perkembangan dari yang telah ada. Apabila perubahan sosial dipandang sebagai proses, maka penekanannya pada tahapan perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan itu terjadi secara bertahap, baik kualitatif maupun kuantitatif, sebagaimana yang dimaksud dengan pengembangan masyarakat. Apabila perubahan sosial dipandang sebagai metode, maka penekanannya pada pencapaian tujuan berdasarkan yang telah ditetapkan, sebagaimana dikenal pada konsep pembangunan,

⁴⁹ Revolusi merupakan suatu konsep tentang perubahan secara cepat (*revolutionary change*). Ia digunakan bagi berbagai bidang, di antaranya berkenaan dengan kekuasaan manusia, sebagaimana dikenal sebagai revolusi Perancis, revolusi Amerika, revolusi Rusia, dan revolusi Iran. Ia juga digunakan bagi revolusi industri pada akhir abad kedelapan belas dan ekspansi perdagangan dunia yang terjadi pada paruh akhir abad kelimabelas. Sementara itu, Wagner (1970), menggunakan konsep revolusi bagi urbanisasi yang terjadi di dunia, yang kemudian disebut urbanism. Ia merupakan variabel dalam berbagai bidang kehidupan manusia, dari yang bersifat pemenuhan kebutuhan fisik sampai perkembangan intelektual. Demikian pula, revolusi digunakan untuk menjelaskan perkembangan ilmu (Lihat: Kuhn, 1970).

yaitu suatu perubahan yang disengaja, direncanakan, dan diorganisasikan. Oleh karena itu, pembangunan bidang agama dapat dipandang sebagai metode,⁵⁰ walaupun terbuka untuk dijelaskan sebagai peristiwa atau proses.

Ketika konsep perubahan sosial dihubungkan dengan agama, berkenaan dengan penelitian “agama dan perubahan sosial”, maka diperlukan pemilahan tentang agama sebagai sasaran penelitian. Harsya W. Bachtiar (1992: 8-9), misalnya, memilah agama sebagai sasaran penelitian sebagaimana berikut: (1) kepercayaan yang dipeluk oleh individu atau kelompok masyarakat, (2) pranata keagamaan, (3) organisasi keagamaan, (4) kegiatan keagamaan, (5) agama dan pelapisan sosial, (6) agama dan golongan sosial, (7) gerakan keagamaan, (8) pengalaman dan perasaan keagamaan, (9) agama sebagai motivasi untuk bertindak, (10) peranan agama dalam perubahan sosial, (11) agama sebagai faktor integrasi masyarakat, (12) agama sebagai faktor pemisah dan pertentangan masyarakat, dan (13) hubungan antar golongan agama.⁵¹ Berkenaan dengan hal itu, penelitian agama lebih diarahkan untuk menjelaskan agama dalam wujud pengalaman kultural dan kenyataan sosial. Ia mencerminkan hubungan antara “apa yang diyakini sebagai kebenaran” dengan “apa yang mengitari diri”, yang memberi bentuk dan irama dari dinamika sosial dan,

⁵⁰ Tampaknya pencapaian pembangunan bidang agama yang dirancang secara nasional mengalami kesulitan untuk dijelaskan secara kuantitatif. Hal itu disebabkan karena kriteria, indikator, dan tolok ukur yang digunakan belum pernah “dibakukan”. Oleh karena itu, ada kesulitan untuk menjawab pertanyaan: apakah selama tiga puluh tahun terakhir pembangunan bidang agama telah mengalami kemajuan atau jalan di tempat atau mengalami kemunduran? Pertanyaan itu muncul oleh karena kerukunan (integrasi) umat beragama mengalami gangguan (konflik) meskipun, ia, menjadi mata program utama dalam pembangunan bidang agama.

⁵¹ Rincian tentang sasaran penelitian agama --ditulis wilayah kajian sosiologi agama-- dapat dilihat dalam Dadang Kahmad (2000: 93-112).

sebaliknya, seberapa besar dinamika itu menentukan bentuk hubungan kedua hal itu (Lihat: Taufik Abdullah, 1983: v).

Relasi antara sasaran penelitian agama dengan berbagai konsep perubahan sosial di atas, merupakan suatu wilayah penelitian “agama dan perubahan sosial”, atau secara lebih spesifik, penelitian “agama dan pembangunan”. Wilayah penelitian itu terbentang sangat luas (Cf. Kadir H. Din, 1996), mulai dari yang sangat abstrak sampai yang konkret, sehingga memberi peluang kepada pakar IAI dan ilmu-ilmu sosial untuk melakukan berbagai penelitian. Dalam penelitian itu, agama ditempatkan sebagai unsur dalam pola kebudayaan dan struktur sosial, yakni keyakinan, nilai, dan kaidah sosial; serta tercermin sebagai pola interaksi sosial dalam satuan masyarakat tertentu.

Memang patut diakui secara jujur, bahwa penelitian “agama dan perubahan sosial” akan menghadapi beberapa kendala. Pertama, kesiapan mental peneliti untuk menempatkan “agama sebagai unsur dalam sistem sosial” --yang secara teknis menjadi variabel dalam penelitian-- sebagaimana yang menjadi pandangan para pakar ilmu-ilmu sosial. Hal itu berarti menggunakan pandangan tentang relativitas agama, dalam pengertian bervariasi, dapat dibandingkan, dan mengalami perubahan. Namun demikian, kendala itu akan dapat diatasi karena “pembangunan bidang agama”, bahkan “sektor agama” telah menjadi wacana dan bidang kehidupan masyarakat bangsa yang melibatkan para pakar IAI. Kedua, kelengkapan unsur informasi dan unsur metodologi bidang IAI masih sangat terbatas. Keterbatasan itu sangat tampak dalam hasil penelitian, yang seringkali terjadi “loncatan” dari “apa yang dipahami”, bahkan dari “apa yang seharusnya”, “loncat” kepada “apa yang senyatanya”, tanpa penjelasan tentang rangkaian proses hubungan kedua gejala tersebut. Namun demikian, pembekalan teori dan metode penelitian yang diadaptasi dan

dimodifikasi dari ilmu-ilmu sosial melalui proses pengajaran dan pelatihan, memberi peluang untuk diaplikasikan dalam kegiatan penelitian. Ketiga, penelitian tersebut sangat rumit dan membutuhkan waktu yang relatif lama, karena proses perubahan sosial berada dalam dimensi ruang dan waktu tertentu. Namun demikian, hal itu dapat dilakukan terutama dalam suatu kawasan yang relatif kecil, serta didukung oleh pengalaman sebagai “pelaku” dari satuan sosial yang mengalami perubahan. Dengan perkataan lain, dalam kapasitas sebagai anggota komunitas tertentu, pakar IAI memiliki posisi sebagai pelaku perubahan sosial.

7. Prioritas Penelitian

Apabila ditanyakan kepada seorang anak kecil tentang permainan sepakbola, maka jawabannya: sepak bola itu mudah karena hanya memperebutkan sebuah bola oleh dua kesebelasan (22 orang). Cukup dikejar, digiring, dan ditendang. Apalagi bagi penjaga gawang, hanya ditangkap dalam ruangan yang sangat terbatas. Namun demikian, hanya sebagian kecil pemain sepakbola yang memiliki kemampuan menjadi anggota kesebelasan berkaliber dunia. Sepakbola bermula dari hobi, kemudian prestasi, kemudian profesi, kemudian gengsi. Demikian pula, apabila ditanyakan kepada seorang mahasiswa tentang penelitian agama, maka akan muncul jawaban yang serupa: penelitian itu gampang. Karena perubahan sosial itu dialaminya sendiri, baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat. Jawaban itu dapat dibuktikan dalam tulisannya, misalnya, skripsi, tesis, dan disertasi, yang sebagian besar dapat diselesaikan. Namun demikian, produk penelitian yang dilakukan belum tentu menemukan temuan baru, baik berupa teori atau maupun model pengembangan masyarakat yang terkait langsung dengan fokus

penelitian.

Ilustrasi di atas menunjukkan bahwa sepakbola atau penelitian memerlukan latihan, menguasai “aturan main”, dan memosisikan diri dalam seluruh kegiatan. Oleh karena itu, penelitian yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pendidikan tinggi dapat dipandang sebagai media latihan bagi calon ahli pada bidangnya masing-masing. Ia dilakukan di bawah “pengawasan” pelatih, yakni pembimbing atau promotor. “Intervensi” pembimbing, tidak dapat dihindarkan, baik dalam pemilihan unsur-unsur penelitian yang dipandang tepat maupun hal lain yang bersifat teknis. Latihan itu dilakukan secara terus menerus sebagai persiapan untuk memasuki “arena pertandingan”, sebut saja, semisal, “penelitian kompetitif”, mulai dari yang diorientasikan bagi pengembangan ilmu sampai yang diorientasikan bagi pertukaran jasa keahlian dan komersial.

Atas perihal di atas, penelitian agama dan perubahan sosial dapat dilakukan secara bertahap, mulai dari tahapan pelatihan yang berkesinambungan sampai penelitian mandiri untuk mencapai titik puncak bagi pengembangan ilmu dan pengembangan masyarakat. Latihan itu dapat dilakukan secara individual dengan menggunakan jasa keahlian “pembimbing”; maupun secara kolektif, yang juga menggunakan jasa keahlian pembimbing. Manakala hal itu dapat dilakukan secara terus menerus, dengan sendirinya pengalaman penelitian akan dapat diraih. Dalam proses itu, “aturan main” dapat dikuasai, dan posisi diri dapat didefinisikan. Sementara itu, “aturan main” dapat berupa cara mengorganisasikan unsur-unsur penelitian, terutama unsur informasi dan metodologi yang akan digunakan,⁵² dan prosedur

⁵² Unsur penelitian yang perlu dikuasai adalah teori dan metode penelitian yang akan digunakan. Dewasa ini, teori-teori perubahan sosial yang relatif dekat dengan gejala kehi-

penelitian serta aspek-aspek teknis yang ditetapkan oleh satuan instansi penyelenggara penelitian.

Untuk menuju ke arah penelitian yang menyeluruh dan memiliki kadar ilmiah yang tinggi dan bermanfaat, dapat dimulai melalui penelitian kecil yang mudah dijangkau dan terbatas. Kecil, dalam arti cakupan fokus penelitian yang sederhana dan spesifik. Kecil, juga dalam arti pada ruang dan waktu yang terbatas. Namun demikian, yang dijadikan sasaran penelitian merupakan gejala yang bersifat umum dan mudah ditemukan, bukan barang langka, agar penelitian dapat dilakukan dengan gampang. Sebagai tahapan awal, dapat dipilih dari gejala kehidupan sehari-hari yang berada di sekitar lingkungan kehidupan peneliti. Misalnya, di sekitar rumah; di sekitar tempat kerja; di sekitar mesjid; di sekitar majelis taklim; di sekitar pasar; dan seterusnya.

Apabila pada suatu pagi hari dua orang mahasiswi UIN “berjilbab” dan “bercelana jean” lewat di depan rumah peneliti, ia dapat mengundang beberapa pertanyaan. Pertama, sejak kapan pemakaian jilbab itu dilakukan oleh mahasiswi dan perempuan pada umumnya? Pertanyaan ini diajukan karena gejala itu relatif baru, terutama setelah revolusi Iran pada tahun 1979. Hal itu menunjukkan perubahan mode dalam menutup bagian aurat Muslimah. Dari pertanyaan ini dapat dikembangkan lebih lanjut, berkenaan dengan pemakaian jilbab di kalangan siswi sekolah menengah umum dan mahasiswi di berbagai perguruan tinggi. Kedua, sejak kapan pemakaian celana jean itu dilakukan oleh mahasiswi dan perempuan pada umumnya? Pertanyaan ini diajukan karena gejala itu, juga, relatif baru, mengiringi gejala yang pertama. Dari kedua gejala itu dapat diajukan pertanyaan lebih lanjut, sejak kapan kedua mahasiswi tersebut memakai jilbab

dupan masyarakat Indonesia, antara lain dalam Astrid S. Susanto (1983: 157-308); Judistira K. Garna (1992: 87-123); dan Munandar Soelaeman (1998: 113-178).

dan celana jeans? Apa hubungan antara pemakaian jilbab dan jeans itu dengan keharusan melaksanakan norma agama dan perkembangan mode menurut pandangan yang bersangkutan? Ketiga, dari kedua pertanyaan itu muncul pertanyaan lain, bagaimana proporsi mahasiswi pada angkatan yang bersangkutan dalam satuan program studi, fakultas, dan perguruan tinggi? Apakah proporsi itu mengalami perubahan dari tahun ke tahun dalam masing-masing satuan itu? Apabila mengalami perubahan, mengapa hal itu terjadi? Keempat, karena mahasiswi itu pada umumnya bertempat tinggal terpisah dari orang tua mereka, maka muncul beberapa pertanyaan. Bagaimana interaksi antara mereka dengan kedua orang tuanya? Bagaimana cara pengawasan kedua orang tua terhadap mereka? Bagaimana hubungan antara mereka dengan teman sejenis dan yang berlainan jenis kelamin? Bagaimana otoritas mereka dalam memilih dan menentukan calon suami? Bagaimana hubungan antara mereka dengan kedua orang tuanya dalam memilih dan menentukan calon suami itu? Jawaban atas berbagai pertanyaan tersebut akan menemukan beberapa bentuk perubahan di kalangan agregat mahasiswi Muslimah, yang dalam berbagai hal, berhubungan dengan sosialisasi dalam keluarga, afiliasi paham keagamaan, tingkat pemahaman terhadap ajaran agama, dan apresiasi terhadap ajaran agama mereka.⁵³

Sekelumit contoh di atas dapat dikembangkan menjadi penelitian yang lebih besar, atau lebih spesifik. Ia dapat dikembangkan menjadi penelitian tentang hubungan antara revolusi dengan aliran paham keagamaan. Atau sebaliknya,

⁵³ Contoh di atas menunjukkan tentang agama dan perubahan sosial yang bertitiktolak dari pelakunya (Muslimah) dalam konteks kehidupan masyarakat secara makro. Penelitian Horikoshi (1987) tentang *Kyai dan Perubahan Sosial (A Traditional Leader in a Time of Change: The Kijaji and Ulama in West Java)*, bertitiktolak dari kedudukan kyai sebagai mediator antara kepentingan budaya “bawah” (masyarakat) dan kepentingan “atas” (pemerintah).

tentang hubungan antara aliran paham keagamaan dengan revolusi. Ia juga dapat dikembangkan menjadi penelitian tentang perubahan mobilitas vertikal di kalangan Muslimah dalam bidang pendidikan dan lapangan kerja dan partisipasi politik. Di samping itu, ia dapat dikembangkan menjadi penelitian tentang hubungan antara durasi dan frekuensi pengawasan orang tua dengan hak prerogatif wali nikah dalam perkawinan. Tentu saja, amat banyak pilihan penelitian tentang agama dan perubahan sosial yang dapat dilakukan, yang berpangkal dari dua orang mahasiswi yang lewat di depan rumah itu.

Manakala penelitian agama dan perubahan sosial itu dihubungkan dengan kompetensi ilmiah peneliti, dalam hal ini di bidang IAI, tinggal mengkonstekstualisasikan kompetensi itu ke dalam gejala kehidupan yang paling mudah ditemukan. Berkenaan dengan hal itu, terdapat beberapa topik penelitian yang dapat ditawarkan, yang mencerminkan kompetensi ilmiah peneliti. Namun demikian, ada hal lain yang memerlukan pemahaman yang memadai, yakni pemahaman terhadap anatomi dan proses perubahan sosial. Hal itu menunjukkan bahwa dalam penelitian itu ada dua konsep yang akan dihubungkan, yakni konsep operasional tentang agama (Lihat: agama sebagai sasaran penelitian) dan konsep perubahan sosial (Lihat: rincian makna perubahan sosial). Konsep agama, dapat ditemukan dan dirumuskan sesuai dengan kompetensi ilmiah peneliti (dengan ragam subkeahlian). Sedangkan konsep perubahan sosial, dapat ditemukandalam wacana sosiologi, atau ilmu-ilmu sosial pada umumnya.

Atas perihal di atas, terdapat berbagai topik penelitian yang ditawarkan sebagaimana berikut ini. Pertama, bidang Qur'an meliputi beberapa topik, antara lain: (1) Hubungan antara *nuzūl al-Qur'ān* dengan perkembangan tugas kerasulan Nabi Muhammad

Saw. pada periode Makkah dan Madinah;⁵⁴ (2) Perkembangan penerjemahan dan penafsiran Qur'an dalam perspektif sejarah Islam; (3) Perkembangan pengajaran Qur'an dalam kelompok sosial tertentu;⁵⁵ (4) Proses transformasi Qur'an dalam penataan kehidupan bernegara dan organisasi kemasyarakatan;⁵⁶ (5) Perkembangan pengajaran tafsir dalam lingkungan pesantren dan perguruan tinggi agama; (6) Relasi antara tradisi pembacaan Qur'an dengan perkembangan kebudayaan lokal; dan (7) Perkembangan apresiasi terhadap Qur'an, antara lain melalui musabaqah tilawatil Qur'an.

Kedua, bidang Hadis meliputi beberapa topik, antara lain: (1) Hubungan antara *asbāb al-wurūd* (*al-Sunnah*) dengan tradisi lokal dan perkembangan misi kerasulan Nabi Muhammad Saw.; (2) Proses pengumpulan dan pembukuan hadis (*tadwīn al-hadīths*) dalam perspektif tradisi besar; (3) Perkembangan penyebaran kitab hadis dalam perspektif sejarah Islam; (4) Perkembangan apresiasi masyarakat terhadap hadis sebagai sumber ajaran Islam; (5) Perkembangan pengajaran hadis dalam lingkungan pesantren dan PTAI; dan (6) Hubungan antara penggunaan hadis dengan masalah dan peristiwa penting dalam kehidupan manusia.

⁵⁴ Topik-topik ini pernah ditawarkan kepada calon pemakalah Majelis Diskusi Malam Reboan, yang digabungkan dengan usulan lain, dalam proses penyusunan jadwal diskusi tahun 2014. Baru sebagian topik dapat dijadualkan. Yang lainnya dapat dijadualkan pada tahun berikutnya. Mungkin baru selesai dipilih oleh para peminat, atau dengan cara memilih calon pemakalah, pada tahun 2020.

⁵⁵ Kelompok sosial dapat bermakna aliran paham keagamaan (madzhab), organisasi keagamaan, satuan masyarakat tertentu (desa-kota), kelompok jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), kelompok umur (anak-anak dan dewasa), dan seterusnya.

⁵⁶ Transformasi di sini dapat dijelaskan sebagai suatu wujud kesepakatan melalui proses interaksi antar elit masyarakat. Dalam proses itu terjadi serangkaian relasi, yang secara garis besar berupa konflik dan integrasi. Apa yang dikenal sebagai "asas tunggal" bagi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan pada era pemerintahan Orde Baru, merupakan produk kompromi antara elit yang berkuasa dengan elit strategis, termasuk para pemimpin organisasi kemasyarakatan yang mengemban misi qur'ani bagi kehidupan masyarakat bangsa. Interaksi itu mencakup internal maupun eksternal.

Ketiga, bidang pemikiran meliputi beberapa topik antara lain: (1) Hubungan antara matarantai intelektual dengan produk pemikiran kalam; (2) Hubungan antara paham teologi dengan etos kerja dan perkembangan ekonomi; (3) Hubungan antara kebudayaan dengan perkembangan tasawuf; (4) Hubungan antara keanggotaan tarekat dengan dinamika kebudayaan lokal; (5) Perkembangan tarekat dalam masyarakat desa dan masyarakat kota;⁵⁷ (6) Perkembangan tarekat dalam lingkungan pesantren; (7) Interaksi antar kelompok penganut aliran paham keagamaan; dan (8) Transformasi paham keagamaan dalam organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang berorientasi nasional.

Keempat, bidang hukum Islam dan institusi sosial meliputi beberapa topik, antara lain: (1) Perkembangan madzhab fiqh dalam perspektif sejarah Islam; (2) Hubungan antara penyebarluasan dan kepenganutan madzhab fiqh dengan struktur dan pola kebudayaan; (3) Internalisasi hukum Islam ke dalam institusi sosial di Indonesia; (4) Interaksi antara hukum Islam dengan kaidah lokal; (5) Difusi hukum Islam dalam tradisi lokal; (6) Transformasi fiqh ke dalam peraturan perundang-undangan; dan (7) Transformasi hukum Islam dalam berbagai bidang kehidupan domestik dan publik (ekonomi dan politik).

Kelima, bidang sejarah peradaban Islam meliputi beberapa topik, antara lain: (1) Hubungan antara gagasan dan tradisi politik dengan perkembangan imperium dalam perspektif sejarah Islam; (2) Hubungan antara Islamisasi dengan perkembangan intelektual di dunia Islam; (3) Hubungan antara perkembangan kehidupan beragama dengan kebudayaan lokal; (4) Hubungan antara perkembangan agama dengan basis orientasi kultural; (5) Interaksi

⁵⁷ Penelitian Dadang Kahmad (1998) tentang *Pengikut Tarekat di Perkotaan*, merupakan salah satu produk penelitian yang menghubungkan antara modernisasi dengan perilaku keagamaan pengikut Tarekat Qadiriyyah Naqsabandiyah (TQN) di Kota Bandung.

antara agama dengan tradisi lokal; (6) Hubungan antara tradisi besar dengan perkembangan wacana intelaktual di dunia Islam; dan (7) Hubungan antara implementasi ajaran agama dengan gerakan sosial, pemberontakan, dan revolusi dalam perspektif sejarah.

Keenam, bidang bahasa dan sastra Arab meliputi beberapa topik, antara lain: (1) Difusi kebudayaan Arab dalam konteks kebudayaan lokal; (2) Transformasi bahasa Arab ke dalam kosakata bahasa daerah; (3) Transformasi bahasa Arab dalam institusi sosial di Asia Tenggara; (4) Tradisi pembacaan syi'ir Arab dalam perkembangan kebudayaan daerah; (5) Interaksi antara bahasa Arab dengan bahasa asing lain dalam proses pengembangan bahasa Indonesia; dan (6) Perkembangan pengajaran bahasa Arab dalam lingkungan pesantren dan PTAI.

Ketujuh, bidang pendidikan Islam meliputi beberapa topik, antara lain: (1) Proses integrasi pendidikan agama dalam sistem pendidikan nasional; (2) Perkembangan kebijakan pendidikan agama dalam lingkungan sekolah; (3) Hubungan antara perkembangan teknologi dan masyarakat dengan perubahan kurikulum pendidikan agama; (4) Perkembangan pengajaran agama dalam lingkungan sekolah dan pesantren; (5) Perkembangan partisipasi masyarakat dalam program wajib belajar dalam lingkungan madrasah; (6) Perubahan pandangan orang tua terhadap pendidikan agama di sekolah dan madrasah, dan (7) Hubungan antara tradisi belajar dengan perkembangan psikologis di kalangan pelajar dan mahasiswa.

Kedelapan, bidang dakwah Islam meliputi beberapa topik, antara lain: (1) Perkembangan majelis taklim dalam masyarakat desa dan masyarakat kota; (2) Hubungan antara penyelenggaraan majelis taklim dengan solidaritas dan pengendalian sosial; (3) Perkembangan pengorganisasian tabligh lintas kawasan; (4)

Perkembangan bimbingan agama dalam kelompok sosial tertentu; (5) Perkembangan penyelenggaraan dakwah di kalangan organisasi kemasyarakatan yang berorientasi nasional; (6) Perkembangan penyiaran dan penerbitan buku keagamaan dalam konteks perkembangan teknologi komunikasi dan grafika; dan (7) Perkembangan manajemen organisasi keagamaan dalam konteks pengorganisasian negara.

Kesembilan, lintas bidang keahlian meliputi beberapa topik, antara lain: (1) Mobilitas kepemimpinan agama dalam struktur masyarakat Indonesia; (2) Hubungan antara agama dengan dinamika politik; (3) Konflik dan integrasi antara pendatang dengan penduduk asli dalam proses urbanisasi; (4) Dampak industrialisasi terhadap kehidupan beragama; (5) Persepsi pemimpin agama tentang peranan perempuan dalam urusan domestik dan publik; (6) Partisipasi pemimpin agama dalam pembangunan “jalur atas” dan “jalur bawah”; (7) Dampak kegiatan keagamaan dalam lingkungan kampus terhadap perkembangan kehidupan beragama dalam masyarakat; dan (8) Partisipasi mahasiswa dalam kegiatan keagamaan dalam masyarakat kota.

Topik-topik di atas mencakup ruang lingkup penelitian yang sangat makro. Oleh karena itu, ketika dipilih sebagai sasaran penelitian membutuhkan perumusan secara spesifik. Dalam proses perumusan itu dipilih konsep-konsep yang akan digunakan dalam penelitian. Berdasarkan hal itu, peneliti melakukan perjalanan ke “pasar” khazanah pengetahuan ilmiah untuk “membeli” atau “meminjam” teori yang akan digunakan dalam penelitian, kemudian dirumuskan dalam bentuk kerangka teori, yang untuk selanjutnya dijadikan kerangka analitis. Belanja teori memang sulit, apalagi merumuskannya menjadi kerangka penelitian. Namun kesulitan itu akan menjadi mudah apabila bertitiktolak dari

rasa keingintahuan terhadap gejala perubahan yang dihadapi sehari-hari. Atas dasar titiktolak itu, maka penelitian dipandang sebagai kegiatan yang gampang dilakukan. Segampang permainan sepakbola menurut pandangan seorang anak kecil.

8. Penutup

Ketika suatu penelitian itu dirancang dan dilaksanakan, pada dasarnya ia merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Demikian pula, secara kumulatif, penelitian itu merupakan suatu kompleks yang terdiri atas berbagai kegiatan penelitian. Oleh karena itu, penelitian tentang agama dan perubahan sosial memerlukan berbagai penelitian yang dilakukan secara berkesinambungan.

Suatu hubungan antara agama dengan perubahan sosial, baik perilaku maupun institusi dan pengorganisasian masyarakat, tampak secara kasat mata. Namun di balik itu, terdapat berbagai jalinan hubungan antar unsur --faktor perubahan, atau variabel-- yang sangat rumit, dan terjadi dalam jangka panjang. Ia bagaikan segelas kopi manis yang dapat diminum dan dinikmati, sambil menghisap sebatang rokok "gudang garam". Namun perjalanan kopi manis itu melalui suatu proses dari kebun tebu, kebun kopi, dan mata air. Bahan mentah, bahan baku, kemudian menjadi barang jadi (*cikopi*), sekurang-kurangnya, terdiri atas tiga unsur (kopi bubuk, gula kristal, dan air matang) yang berkohesi melalui perjalanan yang sangat panjang, apalagi bila dimulai dari penanaman pohon tebu dan pohon kopi. Demikian amsal yang amat sederhana tentang hubungan antara agama dengan perubahan sosial. Oleh karena itu, untuk memahami dan menjelaskan gejala hubungan antara agama dengan perubahan sosial, membutuhkan pemilahan antara agama di satu pihak dan perubahan sosial di pihak yang lain. Agama ditelusuri sebagai ruh,

atau aspek kultural dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan perubahan sosial ditelusuri sebagai jasad, atau aspek struktural dalam kehidupan masyarakat. Namun demikian, agama juga terwujud dalam struktur sosial, manakala ia didefinisikan sebagai perilaku keagamaan, institusi keagamaan, dan organisasi keagamaan. Demikian pula sebaliknya, arti perubahan dapat bermakna perubahan kebudayaan. Keduanya tercampur dalam sistem sosial, baik dalam satuan terkecil yakni keluarga; maupun satuan terbesar, yakni masyarakat dunia (sistem dunia). Agama memiliki dimensi struktural, dan perubahan sosial memiliki dimensi kultural. Untuk melakukan pemilahan dan penjelasan kohesi antara agama dengan perubahan sosial memerlukan penelitian yang berkesinambungan.

Kesinambungan penelitian agama dan perubahan sosial itu, minimal memiliki tiga makna. Pertama, gejala agama dan gejala perubahan sosial masing-masing merupakan gejala yang sangat abstrak yang bertemali dengan gejala lainnya. Oleh karena itu, penelitian tentang hubungan kedua gejala tersebut dapat dijelaskan menurut sudut pandang yang beragam, yang masing-masing membutuhkan waktu yang relatif panjang. Kedua, produk penelitian tentang agama dan perubahan sosial membutuhkan penelitian lebih lanjut, karena perubahan sosial berjalan cepat dan tanpa henti. Boleh jadi, ketika penelitian baru usai dilakukan, perubahan sosial mendahului proses penulisan laporan penelitian tersebut. Oleh karena itu, untuk mengikuti gejala perubahan sosial menuntut penelitian berikutnya, sehingga gejala tersebut dapat dipantau secara cermat dan terus menerus. Dengan cara demikian anatomi dan proses perubahan sosial dapat dijelaskan, yang memungkinkan adanya perumusan teori, model, dan metode baru. Ketiga, penelitian agama dan perubahan sosial hanya memiliki kegunaan praktis apabila hasilnya dapat dimanfaatkan

sebagai salah satu bahan dalam proses pengembangan masyarakat. Atau dengan perkataan lain, produk penelitian agama dan perubahan sosial dapat dijadikan salah satu instrumen bagi perubahan sosial yang disengaja dan direncanakan, yaitu pembangunan. Sementara itu, perubahan sosial sendiri membutuhkan instrumen lainnya, yakni kemauan politik, sumberdaya manusia yang tangguh, dan fasilitas material yang diperlukan.

Akhirnya, apa yang digagas oleh Mukti Ali, yang mengawali tulisan ini, tentang peranan agama dan pembangunan, hanya akan dapat diwujudkan secara aktual manakala terlebih dahulu dilakukan pemahaman yang mendalam terhadap dua unsur yang saling berhubungan itu. Ia, kemudian menjadi salah satu bahan dalam perumusan kebijakan nasional, kebijakan pembangunan, kebijakan sektoral, dan kebijakan operasional (teknis). Kebijakan pembangunan bidang agama merupakan bagian dari ranah kebijakan sektoral dan teknis yang digabung dengan kebijakan pembangunan regional. Produk kebijakan itu adalah aktualisasi pembangunan dalam arti luas: lintas sektoral dan lintas regional. Atas hal itu muncul pertanyaan, apakah dalam aktualisasi pembangunan itu agama telah menempatkan diri sebagai motivator, dinamisator, dan katalisator pembangunan sebagaimana dikemukakan Mukti Ali?

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti merumuskan beberapa poin penting formulasi penyajian mata kuliah Ilmu Perbandingan Agama pada jurusan Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin UIN Bandung, setelah diberlakukan kurikulum berbasis KKNI berikut ini :

1. Ilmu Perbandingan Agama adalah nama mata kuliah yang sekaligus juga menjadi nama jurusan (Jurusan Perbandingan Agama) yang ada di Fakultas Ushuluddin. Melalui beberapa pertimbangan akademik dan sosiologis, nama jurusan perbandingan agama berubah nama menjadi Jurusan Studi Agama-Agama berdasarkan SK Dirjen Pendidikan Islam..Atas pertimbangan akadermik dan sosiologis itu, maka penyajian mata kuliah Ilmu Perbandingaan Agama, sebagai salah satu mata kuliah utama dalam jurusan ini, diperlukan formulasi kurikulum baru, baik substansi maupun metodologi, dalam kegiatan proses belajar mengajar.
2. Berdasarkan struktur KKNI dan Visi Misi yang diformulasikan oleh Jurusan Studi Agama-Agama (SAA) Fakultas Ushuluddin UIN Bandung, setidaknya yang menjadi orientasi SAA adalah menyiapkan para lulusannya menjadi :
 2. Calon akademisi di bidang studi agama;
 3. Penggiat kerukunan hidup antar dan internal umat beragama; dan
 4. Peneliti fenomena dan dinamika hidup beragama.

Ketiga poin di atas, diformulasikan dalam bentuk silabi mata kuliah Ilmu Perbandingan Agama serta disinerjikan dengan beberapa mata kuliah sejenis, seperti sejarah agama, hubungan

antar agama, sosiologi agama, antropologi agama, fenomenologi agama dan metodologi penelitian agama.

3. Struktur kurikulum/silabi mata kuliah ilmu perbandingan agama, dikonstruksi dalam bentuk materi ajar yang difokuskan pada :
 - a. Konstruksi Ilmu Perbandingan Agama dibangun atas prinsip filsafat, teologi, dan pendekatan ilmiah (*scientific method*);
 - b. Keragaman keyakinan agama dan kepercayaan dalam dinamika interaksi social kultural umat beragama, dibangun melalui prinsip keterbukaan untuk menerima perbedaan, serta saling menghargai dan menghormati ditengah-tengah pergaulan antar manusia.
 - c. Ikut membantu memecahkan berbagai masalah dan memberi solusi dalam berbagai persoalan kehidupan beragama.
4. Prinsip dasar materi ajar (silabi), sebagaimana pada poin tiga (3) di atas, diturunkan dalam tujuan pembelajaran umum dan khusus. Tujuan pembelajaran umum, yaitu :
 4. Memberikan pengetahuan dan wawasan kepada para mahasiswa, bahwa setiap agama, khususnya Islam, memiliki dasar-dasar teologis tentang keharusan hidup rukun dan damai diantara para pemeluk agama dan faham keagamaan yang berbeda;
 5. Memberikan pengetahuan dan wawasan kepada para mahasiswa tentang bagaimana etika dan norma dalam pergaulan hidup antar umat beragama dan faham keagamaan yang berbeda; dan
 6. Memberikan pengetahuan dan wawasan tentang kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan pemikiran-pemikiran ilmiah dapat mempengaruhi dinamika kehidupan

beragama.

Adapun tujuan pembelajaran khusus diantaranya :

- f. Dapat memunculkan kesadaran beragama melalui pemahaman dan pengamalan agamanya, sehingga berdampak terhadap pergaulan hidup antar umat beragama dan faham keagamaan yang berbeda;
- g. Dapat membawa pemahaman agama secara kritis, tidak taklid dan menerima begitu saja suatu ajaran atau doktrin.
- h. Dapat mengungkap suatu fenomena tentang keanekaragaman tafsir agama, konteks nilai yang diperjuangkan dan sejenisnya;
- i. Dapat memahami kecenderungan perilaku umat dalam menafsirkan dan mempraktekkan (ajaran) keagamaan;
- j. Dapat memunculkan kesadaran intelektual, bahwa semakin banyak kajian-kajian akademis atas fenomena keagamaan dan disertai pula dengan publikasi yang meluas di tengah masyarakat maka akan mampu pula mencerdaskan cara beragama masyarakat.

B. Rekomendasi

Hasil penelitan ini tentu tidak lepas dari kelebihan dan kekurangannya. Diperlukan penelitian lanjutan berkaitan dengan berbagai persoalan social keagamaan untuk lebih mematangkan dalam penyajian mata kuliah ilmu perbandingan agama. Diharapkan hasil penelitian ini ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan untuk mereformulasi silabus mata kuliah ilmu perbandingan agama khususnya, dan beberapa mata kuliah sejenis yang menjadi mata kuliah inti pada jurusan Studi Agama-agama

DAFTAR PUSTAKA

- Adeng Muchtar Ghazali. 2005. *Ilmu Perbandingan Agama*. Bandung: Pustaka Setia.
- _____. 2006. *Ilmu Studi Agama*. Bandung: Pustaka Setia.
- Amin Abdullah, M. 1996. *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?* Cetakan Pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Eliade, M. 1959. *The History of Religions: Essays in Methodology*.
- _____. 1960. *The Sacred and the Profan*. New York: Brace & World.
- Hasting, James (ed.) t.th. *Encyclopaedia of Religion and Ethic*, Vol. 10. New York: Scribner's.
- Malefijit, A. K. 1968. *Religion and Culture, and Introduction to Antropology of Religion*. London: The MacMillan Company.
- Mukti Ali, A. 1968. *Ilmu Perbandingan Agama*. Yogyakarta: Yayasan Nida.
- Romdhon. 1996. *Metodologi Ilmu Perbandingan Agama*, Yogyakarta:
- Robertson, Roland. 1988. *Sosiologi Agama* (Diterjemahkan oleh..). Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Wach, Joachim. 1958. *The Comparative Study of Religions* (Edited by Kitagawa, J.M.). New York: Columbia University Press.
- Abd. Rahim Md. Nor dan Mohd. Fuad Mat Ali. 1996. "Economic Development and *Hajj*: Preliminary Observation from Asia

with Special Reference to Malaysia”, in Kadir H. Din (Editor), *Development and the Muslims*, Second Printing, pp. 193-208. Selangor: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Ali Munhanif. 1998. “Prof. Dr. A. Mukti Ali: Modernisasi Politik Keagamaan Orde Baru”, dalam Azyumardi Azra dan Saiful Umam (Editor), *Menteri-menteri Agama RI: Biografi Sosial-Politik*, hlm. 269-320. Jakarta: INIS Bekerjasama dengan PPIM.

Astrid S. Susanto. 1983. *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, Cetakan Keempat. t.tp: Binacipta.

Boserup, Ester. 1984. *Peranan Wanita dalam Perkembangan Ekonomi* (Diterjemahkan oleh Mien Joebhaar dan Soenarto), Cetakan Pertama. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Boulding, Kenneth E. 1969. “Technology and the Changing Social Order”, in David Popenoe (Editor), *The Urban-Industrial Frontier: Essays on Social Trends and Institutional Goals in Modern Communities*, pp. 150-167. Bombay: Vakils, Feffer and Simons Private Ltd.

Cik Hasan Bisri. 2000. *Abstracts of Dissertation and Theses on Islamic Subjects*. Bandung: Research Center of State Institute for Islamic Studies, Sunan Gunung Djati Bandung.

_____. 2001. *Ilmu, Pendidikan Tinggi, dan Penelitian: Wacana Pengembangan Ilmu Agama Islam*, Cetakan Pertama. Bandung: Lembaga Penelitian IAIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Coleman, James William and Cressey, R. Donald. 1984. *Social Problems*, Second Edition. New York: Harper & Row, Publishers.

Dadang Kahmad. 1998. *Pengikut Tarekat di Perkotaan: Kajian tentang Perkembangan Kehidupan Keagamaan Pengikut Tarekat Qadiriyyah Naqsabandiyah di Kotamadya Bandung*, Laporan Penelitian. Bandung: Pusat Penelitian IAIN Sunan Gung Djati Bandung.

_____. 2000. *Sosiologi Agama*, Cetakan Pertama. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Davis, Kingsley dan Blak, Judith. 1978. "Struktur Sosial dan Fertilitas: Suatu Kerangka Analitis" dalam Masri Singarimbun (Editor), *Kependudukan: Liku-liku Penurunan Kelahiran*, Cetakan Pertama. Jakarta: Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.

Fawcett, James T. 1984. *Psikologi Kependudukan: Masalah-masalah Penelitian Tingkah Laku dalam Fertilitas dan Keluarga Berencana* (Diterjemahkan oleh Eduard Jabarus dan Hendrik Kleden), Cetakan Pertama. Jakarta: Rajawali Pers.

Geertz, Clifford. 1977. *Penjaja dan Raja: Perubahan Sosial dan Modernisasi Ekonomi di Dua Kota Indonesia* (Diterjemahkan oleh S. Supomo), Cetakan Pertama. Jakarta: Gramedia.

Hagen, Everett E. 1963. *On The Theory of Social Change: How Economic Growth Begins*, 2nd Printing. Illinois: The Dorsey Press, Inc.

Harsja W. Bachtiar. 1992. "Penelitian Agama dan Ilmu-ilmu Sosial di Indonesia: Garis Besar Suatu Prasaran", dalam Sudjangi (Penyunting), *Kajian Agama dan Masyarakat: 15 Tahun Badan Penelitian dan Pengembangan Agama 1975-1990*, hlm. 7-10. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, Departemen Agama RI.

- Horikoshi, Hiroko. 1987. *Kyai dan Perubahan Sosial* (Diterjemahkan oleh Umar Basalim dan Andi Muarly Sunrawa), Cetakan Pertama. Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat.
- Hoselitz, Bert F. 1960. *Sociological Aspects of Economic Growth* (An Adaptation). New York: Feffer and Simons Inc.
- Jalaluddin Rakhmat. 1991. "Metodologi Penelitian Agama", dalam Taufik Abdullah dan M Rusli Karim (Editor), *Metodologi Penelitian Agama: Sebuah Pengantar*, Cetakan Ketiga, hlm. 91-96. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Judistira K. Garna. 1992. *Teori-teori Perubahan Sosial*. Bandung: Program Pascasarjana, Universitas Padjadjaran.
- Kadir H. Din (Editor). 1996. *Development and the Muslims*, 2nd Printing. Selangor: Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Kuhn, Thomas S. 1970. *The Structure of Scientific Revolutions*, 2nd Edition. Chicago: The University of Chicago Press.
- Makato Aso and Ikuo Amano. 1972. *Education and Japan's Modernization*. Japan: Ministry of Foreign Affairs.
- Maleong, Lexy. 1993. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan Keempat. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Meadows, Danella H., dkk. 1980. *Batas-batas Pertumbuhan: Laporan untuk Kelompok Roma* (Diterjemahkan oleh Masri Maris), Cetak-an Pertama. Jakarta: Gramedia.
- McClelland, David C. 1961. *The Achieving Society*. Bombay: Vakils, Fef-fer and Simons Private Ltd.

- McIver, Robeert M., and Page, Charles H. 1957. *Society: An Introductory Analysis*. New York: Rinehart and Company, Inc.
- Mukti Ali, A. 1980. "Penelitian Agama di Indonesia", dalam Muljanto Sumardi (Editor), *Metodologi Penelitian Agama: Masalah dan Pemikiran*, hlm. 18-27. Jakarta: Pusat Pengkajian Masalah Keagamaan dan Kemasyarakatan.
- _____. 1991a. *Memahami Beberapa Aspek Ajaran Islam*, Cetakan Pertama. Bandung: Mizan.
- _____. 1991b. "Metodologi Ilmu Agama", dalam Taufik Abdullah dan M Rusli Karim (Editor), *Metodologi Penelitian Agama: Sebuah Pengantar*, Cetakan Ketiga, hlm. 41-57. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Muljanto Sumardi. 1992. "Agama sebagai Sasaran Studi dan Penelitian (Religion as a Field for Study and Research)", dalam Sudjangi (Penyunting), *Kajian Agama dan Masyarakat: 15 Tahun Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, 1975-1990*, hlm. 1-3. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, Departemen Agama RI.
- Munandar Soelaeman, M. 1998. *Dinamika Masyarakat Transisi: Mencari Alternatif Teori Sosiologi dan Arah Perubahan*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Remmling, Gunter W., and Campbell, Robert B. 1976. *Basic Sociology: An Introduction to the Study of Society*. New Jersey: Littlefield, Adams & Co.
- Robertson, Roland (Editor). 1993. *Agama dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologis* (Diterjemahkan oleh Achmad Fedyani

Saifuddin), Ce-takan Ketiga. Jakarta: Rajawali Pers.

Rogers, Everet M. dan Shoemaker, Floyd F. 1982. *Memasyarakatkan Ide-ide Baru* (Disarikan oleh Abdillah Hanafi), Cetakan Pertama. Surabaya: Usaha Nasional.

Schoorl, J. W. 1982. *Modernisasi: Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-negara Sedang Berkembang* (Diterjemahkan oleh R. G. Soekadijo), Cetakan Ketiga. Jakarta: Gramedia.

Selo Sumardjan. 1981. *Perubahan Sosial di Yogyakarta* (Diterjemahkan oleh H. J. Koesoemanto dan Mochtar Pabotingi), Cetakan Pertama, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

_____. 1984. "Kemiskinan Struktural dan Pembangunan: Kata Pengantar", dalam Selo Soemardjan, Alfian, dan Mely G. Tan (Editor), *Kemiskinan Stuktural: Suatu Bunga Rampai*, Cetakan Kedua, hlm. 1-11. Jakarta: Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial dan Pulsar.

Soerjono Soekanto. 1983. *Teori Sosiologi tentang Perubahan Sosial*, Cetakan Pertama. Jakarta: Ghalia Indonesia.

_____. 1996. *Pengantar Sosiologi*, Cetakan Keduapuluh. Jakarta: Rajawali Pers.

Sudjangi (Penyunting). 1992. *Kajian Agama dan Masyarakat: 15 Tahun Badan Penelitian dan Pengembangan Agama 1975-1990*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, Departemen Agama RI.

- Suwarsono dan Alvin Y. So. 1991. *Perubahan Sosial dan Pembangunan di Indonesia: Teori-teori Modernisasi, Dependensi, dan Sistem Dunia*, Cetakan Pertama. Jakarta: Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.
- Taufik Abdullah (Editor). 1979. *Agama, Etos Kerja, dan Perkembangan Ekonomi*, Cetakan Pertama. Jakarta: Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.
- _____. (Editor). 1983. *Agama dan Perubahan Sosial*. Cetakan Pertama. Jakarta: Rajawali Pers.
- _____. dan M. Rusli Karim (Penyunting). 1991. *Metodologi Penelitian Agama: Sebuah Pengantar*, Cetakan Ketiga. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Tim LPSP-IPB. 1973. *Laporan Survey Penjajakan Pembinaan Potensi Sosial Pembangunan Masyarakat Desa*. Bogor: Lembaga Penelitian Sosiologi Pedesaan, Institut Pertanian Bogor.
- Tjondronegoro, Sediono M. P. 1982. 1984. *Social Organization and Planned Development in Rural Java: Study of the Organization Phenomenon in Kecamatan Cibadak, West Java, and Kecamatan Kendal, Central Java*. Singapore: Oxford University Press.
- Wagner, Stanley P. 1970. *The End of Revolution: A New Assessment of Today's Rebellions*. Bombay: Vakils, Feffer and Simons Private Ltd.
- Widjaja, Albert. 1982. *Budaya Politik dan Pembangunan Ekonomi*, Cetak-an Pertama. Jakarta: Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.

Zetterberg, Hans L. 1963. *On Theory and Verification in Sociology*.
New Jersey: The Bedminster Press.

Zuidberg, Lida, C. L. (General Editor). 1978. *Family Planning in Rural Java: The Serpong Project*. Jakarta: Institute of Cultural and Social Studies - Djambatan.